



Laporan Kinerja KBRI/PTRI Wina 2022



**Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Austria &
Slovenia dan Perwakilan Tetap untuk PBB &
Organisasi Internasional lainnya di Wina
Gustav-Tschermak Gasse 5-7, 1180 Wien**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Wina dapat melaksanakan program kinerja yang telah direncanakan dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti.

Sebagai bagian dari Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI, KBRI Wina telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan RI tahun 2022 dengan berpedoman kepada Penetapan Kinerja (PK) tahun 2022, Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020-2024, dan Rencana Strategis KBRI Wina 2020-2024.

Penyusunan LKj Perwakilan RI ini merupakan wujud pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta sebagai penjabaran dari pelaksanaan kinerja sepanjang tahun 2022. Laporan ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI no. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Luar Negeri RI No. 04 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kemenlu dan Perwakilan RI.

KBRI Wina merencanakan Program Kerja untuk mendukung pencapaian Nawa Cita Pemerintah RI dan prioritas kinerja Kementerian Luar Negeri. Di antaranya adalah mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa, meningkatkan kualitas hidup serta produktivitas dan daya saing rakyat Indonesia, memastikan kehadiran negara dalam melindungi dan memberikan rasa aman kepada seluruh WNI, mempertahankan kebhinnekaan Indonesia dan memperjuangkan kepentingan nasional di forum multilateral.

Kami berharap Laporan ini dapat menjadi bahan acuan akuntabilitas kinerja KBRI Wina dan pedoman dalam upaya peningkatan kinerja KBRI Wina secara berkesinambungan. Selain itu, penyusunan Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi unit operasional dan unit pendukung terkait di Kementerian Luar Negeri dalam memonitor dan mengevaluasi kinerja KBRI Wina pada tahun 2022 untuk mengoptimalkan anggaran secara efisien dan efektif.

Dari total 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) di tahun 2022, KBRI/PTRI Wina berhasil mencapai dan melebihi target pada 16 IKU. Terdapat 3 (tiga) IKU yang tidak mencapai target adalah: (i) Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Wina; (ii) Indeks Citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Wina; dan (iii) Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Wina.

Terdapat beberapa kendala utama yang teridentifikasi sehingga menghambat capaian ketiga IKU dimaksud, antara lain ketidakpastian ekonomi global dan pandemik COVID-19, dinamika konflik Rusia – Ukraina yang membuat inflasi ekonomi dan biaya energi tinggi di negara-negara akreditasi KBRI Wina yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi, serta keterbatasan jumlah sumber daya manusia KBRI Wina.

Guna mengatasi kendala-kendala di atas, langkah antisipasi yang dilakukan KBRI Wina antara lain: senantiasa giat melakukan diplomasi ekonomi yang optimal dengan melibatkan pelaku usaha Indonesia dan diaspora Indonesia, melakukan koordinasi erat dengan pusat dan mitra kerja di negara akreditasi, melakukan koordinasi dengan sekretariat berbagai organisasi internasional di Wina, melakukan *monitoring* SAKIP serta menyelenggarakan kegiatan dialog kerja.

Secara umum, pada tahun 2022, NCKO kinerja KBRI/PTRI Wina mencapai 107,11 dengan penyerapan anggaran 99,67% dengan efisiensi sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, capaian tahun 2022 kali ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja KBRI/PTRI Wina.

Wina, Januari 2023
Kepala Perwakilan RI



Dr. iur. Damos Dumoli Agusman
Dubes LBBP / Watapri

Ringkasan Eksekutif

Capaian kinerja KBRI Wina diukur dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI Wina Nomor SKP/100.1/II/2022 tentang Peta Strategis dan Indikator Kinerja Utama Perwakilan RI Wina Tahun 2022 telah ditetapkan Peta Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) KBRI/PTRI Wina, yang terdiri dari 11 Sasaran Strategis dan 19 IKU.

Dari penetapan tersebut, capaian kinerja KBRI/PTRI Wina selama tahun 2022 berdasarkan kategori perspektif masing-masing, yaitu:

Perspektif	Bobot	Nilai Perspektif
<i>Stakeholder</i>	25%	103,46%
<i>Costumer</i>	15%	113,33%
<i>Internal business</i>	30%	111,85%
<i>Learning and Growth</i>	30%	102,31%

Selanjutnya, merujuk pada kinerja, Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) Tahunan KBRI/PTRI Wina pada tahun 2022 adalah **107,11**. Persentase NCKO tahun 2022 ini meningkat dari tahun 2021 yang sebelumnya sebesar 98.47.

Berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri RI nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Wina adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, dengan wilayah akreditasi Republik Austria merangkap Republik Slovenia, serta terakreditasi untuk PBB dan organisasi internasional lainnya di Wina. Sejalan dengan mandat tersebut, KBRI/PTRI Wina menjalankan dua fungsi Perwakilan RI, yakni bilateral dan multilateral.

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut di atas, LKj KBRI/PTRI Wina tahun 2022 berisi informasi kuantitatif dan kualitatif atas berbagai capaian bilateral dan multilateral yang diraih oleh KBRI/PTRI Wina serta tantangan yang dihadapi dalam setahun sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) KBRI/PTRI Wina Tahun Anggaran 2022.

LKj KBRI/PTRI Wina tahun 2022 disusun secara terpadu dan sejalan dengan sistem keuangan negara sebagaimana tertuang dalam DIPA KBRI/PTRI Wina Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan DIPA Nomor Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran No: SP DIPA – 011.01.1.403856/2022 tanggal 17 November 2022, yang direvisi sebanyak 10 (sepuluh) kali, KBRI/PTRI Wina mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 52.623.248.000,00 (lima puluh dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk menunjang kegiatan strategis yang tertuang dalam 4 (empat program).

Program tersebut antara lain: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri; (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perwakilan RI di luar negeri; (iii) Program Perlindungan WNI di LN serta Pelayanan Publik; dan (iv) Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri.

Dengan demikian, LKj KBRI/PTRI Wina Tahun 2022 ini secara nyata merupakan gambaran yang sinergis dari kegiatan strategis yang dijalankan oleh setiap elemen fungsi yang bernaung di bawah KBRI/PTRI Wina.

Peningkatan capaian KBRI Wina disebabkan salah satunya karena KBRI/PTRI Wina mencoba beradaptasi dan memanfaatkan peluang yang didapatkan dari transformasi metode pelaksanaan kegiatan dan kemajuan teknologi informasi, dari yang dahulunya bersifat fisik menjadi daring yang lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan/program KBRI/PTRI Wina yang sepatutnya tetap dilaksanakan secara fisik untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Dari 19 IKU, tercatat sebanyak 16 IKU yang memenuhi dan bahkan melampaui target yakni:

No.	IKU	Capaian
1.	S.1.1 Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Wina	120,00%
2.	S.1.2 Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI Wina	120,00%
3.	S.2.1 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral	104,17%
4.	S.2.2 Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri multilateral	104,17%
5.	C.1.1 Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Wina yang diselesaikan	120,00%
6.	C.1.2 Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI Wina	100,00%
7.	C.1.3 Nilai persepsi pelayanan perlindungan WNI KBRI Wina	100,00%
8.	C.2.1 Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara akreditasi KBRI Wina	120,00%

9.	B.1.1 Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya dengan negara akreditasi KBRI Wina	100,00%
10.	B.1.2 Jumlah kesepakatan di bidang politik, keamanan, dan maritim dengan negara akreditasi KBRI Wina	100,00%
11.	B.1.3 Indeks Respon Positif terhadap informasi data <i>Economic Intelligence/Market Intelligence</i>	100,00%
12.	B.2.1 Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral di bidang sosial, ekonomi, dan budaya	111,11%
13.	B.2.2 Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral di bidang politik, keamanan, dan maritim	120,00%
14.	B.3.1 Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Wina yang terverifikasi di Portal Peduli WNI	120,00%
15.	L.2.1 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri	105,93%
16.	L.3.1 Nilai Kinerja Anggaran KBRI Wina	105,67%

Sementara itu, IKU yang tidak mencapai target adalah:

No.	IKU	Capaian
1.	S.1.3 Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Wina	85,59%
2.	S.3.1 Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI Wina	97,69%
3.	L.1.1 Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Wina	95,32%

Bila dibandingkan, jumlah target IKU yang dicapai pada tahun 2022 melebihi jumlah IKU yang dicapai pada tahun 2021. Peningkatan IKU yang mencapai target tahun 2022 berjumlah 16 buah, lebih tinggi di tahun 2021 yang berjumlah 15 buah IKU.

Terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2022 yang masih tidak terlalu jauh berbeda dengan kondisi tahun 2021 di mana seluruh negara masih dihadapkan dengan masalah global yang sama, yakni Pandemi COVID-19. Pada tahun 2022 sesungguhnya mendapat tantangan cukup berat akibat kondisi geo-politik yang tidak pasti dipicu konflik Ukraina-Rusia. Situasi di tahun 2022 memberikan tantangan tersendiri bagi KBRI/PTRI Wina dalam melaksanakan tupoksinya.

Banyak kegiatan yang idealnya dilaksanakan secara fisik dan dihadiri oleh publik tapi harus dilaksanakan secara virtual atau *hybrid* (kombinasi kehadiran fisik dan virtual) dengan protokol kesehatan (prokes) ketat dan pembatasan jumlah orang yang hadir.

Dalam konteks bilateral, hubungan baik RI – Austria dan RI – Slovenia dapat tetap terjaga. Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai kesepakatan, kunjungan dan kegiatan bilateral yang terlaksana sepanjang tahun 2022. Sebagai contoh, Pemri dan Austria berhasil membahas implementasi Kerja Sama Peningkatan Balai Vokasi dan Pelatihan Kerja Kemnaker yang mendapat pendanaan melalui skema *soft loan* dengan bunga 0 (nol)% dengan nilai total sebesar € 37.583.185,50. Pada tahun 2022, dilaksanakan peningkatan dan pembaruan Empat BBVPK (Balai Besar Vokasi dan Pelatihan Kerja) di Medan, Serang, Makassar dan Banyuwangi.

Selain itu, pada kunjungan Kerja Menteri Transportasi dan Menteri Bappenas ke perusahaan kereta gantung bulan September 2022, sebagai tindak lanjut kerja sama keuangan RI-Austria, berhasil dibahas tindak lanjut proses pembahasan pengadaan *cable car* tahap 1 di IKN yang diharapkan dapat terwujud akhir November 2023.

Selain itu, pada kunjungan Kerja Deputy Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Pungky Sumadi, dibahas tindak lanjut dari Perpanjangan *Memorandum of Understanding between the Indonesian Ministry of Finance and the Austrian Federal Ministry of Finance on Financial Cooperation* yang telah ditandatangani pada 9 Juli 2021 di Jakarta dan 18 Agustus 2021 di Vienna.

Indonesia dan Austria juga berhasil menyepakati dan menandatangani MOU RI-Austria untuk Kerja Sama Pelatihan Vokasi dan Pelatihan Berbasis Kinerja. Kesepakatan ditandatangani oleh Menaker RI, Ida Fauziyah dan Menteri Federal Austria untuk Ekonomi dan Tenaga Kerja, Martin Kocher, di Jakarta pada 10 November 2022.

Dalam konteks multilateral, KBRI/PTRI Wina secara konsisten terus memperjuangkan berbagai kepentingan nasional di forum-forum PBB dan internasional yang berkedudukan di Wina, Austria. Terdapat beberapa capaian, kesepakatan dan kegiatan multilateral yang terlaksana pada tahun 2022. Beberapa capaian bidang multilateral antara lain:

1. Penetapan Laboratorium BRIN sebagai *Collaborating Centre* IAEA Bidang *Climate Smart Agriculture*, Mei 2022;
2. Komitmen Kerjasama Penguatan Regulasi Teknologi Nuklir Baru melalui kerangka inisiatif *Nuclear Harmonization and Standardization Initiative* (NHSI) IAEA, Juni 2022;
3. Komitmen Politik dalam kerangka kerja sama *Regional Cooperation Agreement* (RCA) IAEA, September 2022;
4. Kerja sama Penguatan Riset Transisi Energi dan Lingkungan di bawah Kerangka Ketertuaan G20 Indonesia, April - Oktober 2022;
5. Komitmen Kerjasama Penyelenggaraan *Postgraduate Educational Course in Radiation Protection and the Safety of Radiation Sources* (PGEC), November 2022;
6. Kesepakatan Kerangka Kerja Sama Pengembangan Kompetensi SDM Riset Nuklir, 27 September 2022;

7. Komitmen Politik “*Strengthening national and international efforts, including with the private sector, to protect children from sexual exploitation and abuse;*”
8. Komitmen politik terkait upaya “*Strengthening the international legal framework for international cooperation to combat and prevent illicit trafficking in specimens of wild fauna and flora*”;
9. Komitmen Politik “*Promoting alternative development as a development-oriented drug control strategy, taking into account measures to protect the environment*”; dan
10. Kesepakatan dalam negosiasi *Ad Hoc Committee to Elaborate an International Convention on Countering the Use of ICTs for Criminal Purposes.*

Capaian kinerja program dan kegiatan KBRI/PTRI Wina tersebut di atas berbanding positif dengan capaian kinerja anggaran KBRI/PTRI Wina pada tahun 2022 (realisasi anggaran dalam DIPA 2022) per 31 Desember 2022, yakni sebesar Rp 52.621.511.432,8 atau sebesar **99.67%** dari anggaran terakhir yang telah direncanakan, yakni sebesar Rp. Rp52.623.248.000,00. Perbandingan positif tersebut menunjukkan bahwa **perencanaan kinerja dan serapan anggaran selama tahun 2022 terlaksana dengan baik.**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	1
Bab I Pendahuluan	2
Bab II Perencanaan Kinerja	26
Bab III Akuntabilitas Kinerja	31
Bab IV Penutup	115
Bab V Lampiran	124

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 108 tahun 2003, KBRI/PTRI Wina memiliki tugas pokok melaksanakan hubungan diplomatik dalam rangka mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan Pemerintah Indonesia. Serta melindungi WNI dan BHI di wilayah akreditasi, sesuai kebijakan politik luar negeri dan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan tupoksinya, KBRI/PTRI Wina merupakan Perwakilan RI yang memiliki fungsi ganda, baik sebagai perwakilan bilateral maupun multilateral. KBRI/PTRI Wina yang berkedudukan di Wina, Austria memiliki dua wilayah kerja yakni Austria dan Slovenia. Sementara itu, KBRI / PTRI Wina juga menaungi berbagai isu multilateral mengingat Wina menjadi markas atau sekretariat dari berbagai organisasi internasional (OI), baik yang di bawah naungan PBB (UNOV, UNODC, UNIDO, UNCITRAL, INCB, UNOOSA dll) maupun yang berada di luar PBB (IAEA, CTBTO, OPEC *Fund* dan IACA). Dengan demikian, kepentingan RI di wilayah kerja KBRI/PTRI Wina sangat besar.

Berdasarkan tupoksi dan besarnya kepentingan RI tersebut, KBRI / PTRI Wina terus berupaya mendukung pencapaian visi-misi Presiden dan Wakil Presiden (Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong) serta visi-misi Kementerian Luar Negeri (Memimpin diplomasi yang aktif dan efektif untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong) dengan menjalankan beberapa misi utama.

Pertama, KBRI/PTRI Wina memiliki misi untuk memberikan nilai manfaat ekonomi yang optimal di wilayah akreditasi untuk mendukung struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Misi pertama ini dijalankan antara lain dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti ikut serta pada pameran wisata dan pameran produk di negara akreditasi.

Kedua, KBRI/PTRI Wina memiliki misi untuk memberikan perlindungan WNI di wilayah akreditasi yang prima sebagai upaya perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Misi kedua ini dijalankan dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan perlindungan dan memberikan bantuan untuk WNI di wilayah akreditasi.

Ketiga, KBRI/PTRI Wina memiliki misi untuk meningkatkan citra positif Indonesia di wilayah akreditasi yang dilakukan dengan berbagai kegiatan promosi budaya sehingga semakin banyak warga asing di wilayah akreditasi yang mengenal Indonesia.

Terakhir, KBRI/PTRI Wina memiliki misi untuk memajukan kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh pada organisasi internasional yang berkedudukan di wilayah akreditasi antara lain dengan mengambil peran / posisi penting dan mengusulkan berbagai inisiatif dalam berbagai forum multilateral di wilayah akreditasi.

1.2. Struktur Organisasi KBRI/PTRI Wina

1. Susunan Organisasi KBRI/PTRI Wina

Susunan organisasi KBRI/PTRI Wina sebagaimana diatur dalam lampiran II-84 Keputusan Menteri No. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri, terdiri dari:

- Unsur Pimpinan, yaitu Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, dan Wakil Kepala Perwakilan;
- Unsur Pelaksana, yaitu Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang menangani masalah-masalah ekonomi, politik multilateral, dan penerangan sosial dan budaya, serta protokol dan konsuler dengan gelar 3 (tiga) *Minister Counsellor*; 1 (satu) *Counsellor*; 3 (tiga) Sekretaris I; dan 2 (dua) Sekretaris II. KBRI/PTRI Wina juga didukung oleh satu orang Atase Teknis yang menangani masalah kerja sama ilmu pengetahuan (nuklir);
- Unsur Penunjang, yaitu Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan 2 (dua) orang, serta unsur penunjang lainnya adalah Petugas Komunikasi 2 (dua) orang. Berdasarkan arahan Pusat dan mengingat tingginya beban pengiriman berita KBRI/PTRI Wina maka Pusat menetapkan bahwa formasi untuk petugas komunikasi adalah 2 (dua) orang.

2. Daftar Home Staff dan Pegawai Setempat Tahun 2022

DAFTAR HOME STAFF					
No.	Nama	Jabatan	Tanggal Tiba	Mutasi ke Jakarta	Keterangan
1.	Dr. iur. Damos Dumoli Agusman	Dubes LBBP RI	20 Januari 2022		
2.	A. Alfiano Tamala	Wakil Kepala Perwakilan	4 Agustus 2021		
3.	Adi Dzulfuat	Korfung Politik Bilateral dan Ekonomi Bilateral – Multilateral	1 Agustus 2019		Dilantik sebagai Eselon II di Kemlu
4.	Arsi Dwinugra Firdausy	Korfung Politik Multilateral	1 Februari 2020		
5.	Ricky Eka Virgana Ichsan	Korfung Pensosbud dan Protokol & Konsuler	5 Februari 2021		
6.	Arief Bramono	Staf Politik Bilateral dan Ekonomi Bilateral – Multilateral	20 September 2022		Menggantikan Sdr. Rahmat Kurniawan

7.	Masagus Salman Isfahani	Staf Politik Multilateral	8 Februari 2019		
8.	Arif Sulaksono	Staf Penerangan Sosial dan Budaya	8 Februari 2019		
9.	Erik Mangajaya	Staf Politik Multilateral	14 September 2021		
10.	Akbar Nugraha	Staf Politik Multilateral	8 Agustus 2020		
11.	Dyah Dinanti Puspitasari	Staf Politik Bilateral dan Ekonomi Bilateral-Multilateral	8 Februari 2021		
12.	Rahmat Kurniawan	Staf Politik Bilateral dan Ekonomi Bilateral - Multilateral	1 Agustus 2019		
13.	Fauziah Rahmah Muin	Staf Penerangan Sosial dan Budaya	11 Agustus 2022		Menggantikan Sdr. Arif Sulaksono
14.	Adelin Indah Marisa	Staf Protokol dan Konsuler	1 Februari 2020		
15.	Fritska Emelia Diniovi Pasaribu	Staf Protokol dan Konsuler	1 Februari 2022		Menggantikan Sdri. Adelin Indah Marisa
16.	Dimas Irawan	Atase Ilmu Pengetahuan	3 Agustus 2019		
17.	Benton Basuki Padmanegara	Petugas Komunikasi	28 Agustus 2020		
18.	Dwi Agusta Masanggara	Petugas Komunikasi	22 Agustus 2021		
19.	Riani Dewi	BPKRT	19 November 2019		
20.	Ridho Alief Noviawan	BPKRT	26 Agustus 2020		
21.	Palupi Satio Utami	BPKRT	2 Desember 2022		Menggantikan Sdri. Riani Dewi
* Sudah mutasi ke Jakarta					

Tabel I.1

Adapun daftar pegawai setempat (*Local Staff*) adalah sebagai berikut:

DAFTAR PEGAWAI SETEMPAT						
No	Nama	Tanggal Lahir	Pendidikan Formal Terakhir	Mulai Bekerja Di Kbri	Masa Kerja	
					Tahun	Bulan
1.	Ahmad Reza Khomeini			Maret 2012	8	9
2.	Dante Torres			Maret 2012	8	9
3.	Dragan Todorovic			Desember 2017	Mengundurkan diri Januari 2022	
4.	Evanesia S. Pinter			Maret 2017	Mengundurkan diri Februari 2022	
5.	Glady Yudha Ariefianto			April 2016	4	8
6.	Gonti Marulam Sitohang			September 2002	18	3
7.	Irna L. D. S. Führer			Januari 2012	8	11
8.	Ismayu Wahana			Desember 2017	3	-
9.	Juan A. O. Aguilar			September 2010	10	3
10.	Maurena Fennesz			April 1999	21	8
11.	Michael James O'Rourke			Februari 1992	28	10
12.	Hadasa P. Geiger			September 2018	2	3
13.	Nursahid			Januari 2003	17	11
14.	Pace Seprice Sakan			April 2016	4	8
15.	Sudino Karyono			Januari 1985	35	11
16.	Sunar Yuwono			Maret 1990	30	9

17.	Wingko Kaloman Silaen			Januari 1996	24	11
18.	Yulianto Hernawan			Juli 1995	25	5
19.	Nursin			Januari 2022		
20.	Jakaria			Januari 2022		
21.	Sri Murni			Januari 2022		
22.	Chika Apriska Aulia			Agustus 2021		
23.	Ibrahim Rizky			Agustus 2021		
24.	Irma Natalia			Agustus 2022		
25.	Yonathan			Agustus 2022		

Tabel I.2

3. Aspek Sarana dan Prasarana

Di bidang perlengkapan, sarana gedung kantor dan wisma KBRI/PTRI Wina, terdiri dari:

No	Unit	Alamat	Status	Luas	Tahun Perolehan
1	Gedung Kantor	Gustav Tschermak Gasse 5-7, 1180, Vienna	Hak Milik	3,346 m ²	1981
2	Wisma Duta Besar	Lannerstrasse 39, 1190, Vienna	Hak Milik	1,281 m ²	1984

Tabel I.3

Sarana transportasi yang dimiliki KBRI/PTRI Wina sebanyak 13 (tiga belas) unit kendaraan roda empat yang terdiri dari:

No	Nama Kendaraan	Tahun	Tipe/Seri	Keterangan
1	BMW 7 Series Limousine	2020	745Le xDrive	Mobil Duta Besar
2	Mercedes Benz S Class	2011	S 350	Mobil VIP
3	Mercedes Benz E Class	2017	E 400	Mobil Wakeppri
4	Mercedes Benz E Class	2021	E 220 d	Mobil Operasional Kantor

5	Mercedes Benz E Class	2014	E 220	Mobil Operasional Kantor
6	Mercedes Benz S Class	2005	S 350	Mobil Operasional Kantor
7	Mercedes Benz E Class	2000	E 280	Mobil Operasional Kantor
8	Mercedes Benz (van)	2012	Viano	Mobil Operasional Kantor
9	Mercedes Benz (van)	2014	Viano	Mobil Operasional Kantor
10	Mercedes Benz (van)	2014	V-Class	Mobil Operasional Kantor
11	Volkswagen (jeep)	2006	Touareg R5	Mobil Operasional Kantor
12	Volkswagen (van)	1997	Caravelle	Mobil Operasional Kantor
13	Volkswagen (van)	2007	Caravelle	Mobil Operasional Kantor

Tabel I. 4

4. Aspek Sumber Daya Keuangan

Dari aspek anggaran/keuangan, DIPA awal KBRI/PTRI Wina pada TA 2022 adalah sebesar Rp 52.460.843.000,00 (lima puluh dua miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah).

Sehingga besaran total DIPA akhir untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 52.623.248.000,00 (lima puluh dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Rincian Anggaran sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

Anggaran Tahun 2022 KBRI/PTRI Wina

No	Uraian	Pagu
1	Kerja Sama	Rp
2	Promosi	Rp
3	Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Rp
4	Pelayanan Publik (Kekonsuleran)	Rp
5	Pelindungan WNI di Perwakilan RI	Rp
6	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp
7	Layanan Sarana Internal	Rp
8	Layanan Prasarana Internal	Rp
	Total	Rp 52.623.248.000

Tabel I. 5

5. Indeks Perwakilan KBRI/PTRI Wina

Berdasarkan Pasal 1 dari Lampiran II-84 Keputusan Menteri Luar Negeri RI nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 tanggal 1 Juni 2004 dan Pasal 2 ayat (1) dari Lampiran II-84 Keputusan Menteri Luar Negeri RI nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 tanggal 1 Juni 2004 ditetapkan bahwa indeks perwakilan KBRI/PTRI Wina adalah **3,63** dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut:

**Politik (4,00), Ekonomi (4,00), Penerangan, Sosial dan Budaya (3,53)
dan Konsuler (3,00)**

Gambar I.1

Sesuai dengan gambaran fisik organisasi dan indeks perwakilan, kerja KBRI/PTRI Wina selama ini diarahkan pada pelaksanaan hubungan bilateral dan multilateral dengan pihak akreditasi dan organisasi internasional. KBRI/PTRI Wina memiliki arti penting dalam pelaksanaan hubungan diplomatik dan perlindungan kepentingan nasional NKRI dan perlindungan WNI di wilayah Republik Austria, Republik Slovenia, sekaligus memperjuangkan kepemimpinan RI dalam konteks multilateral di berbagai organisasi internasional yang berkedudukan di Wina, Austria.

1.2 Aspek Strategis

KBRI/PTRI Wina memiliki peran strategis dalam memperjuangkan kepentingan nasional baik di tingkat bilateral maupun di tingkat multilateral karena KBRI/PTRI Wina merupakan Perwakilan RI yang memiliki fungsi ganda, baik sebagai perwakilan bilateral maupun multilateral.

KBRI/PTRI Wina yang berkedudukan di Wina, Austria memiliki dua wilayah kerja yakni Austria dan Slovenia. Sementara itu, KBRI / PTRI Wina juga menaungi berbagai isu multilateral mengingat Wina menjadi markas atau sekretariat dari berbagai organisasi internasional (OI), baik yang di bawah naungan PBB (UNOV, UNODC, UNIDO, UNCITRAL, INCB, UNOOSA dll) maupun yang berada di luar PBB (IAEA, CTBTO, OPEC *Fund* dan IACA). Dengan demikian, kepentingan RI di wilayah kerja KBRI/PTRI Wina sangat besar.

Selama tahun 2022, KBRI/PTRI Wina membantu terpeliharanya hubungan bilateral antara Indonesia dengan Austria dan Slovenia melalui diplomasi ekonomi dan sosial budaya yang dituangkan dalam berbagai kesepakatan bilateral. Di level multilateral, KBRI / PTRI Wina juga secara akonsisten menunjukkan kepemimpinan dan berhasil diterimanya berbagai prakarsa/inisiatif demi kepentingan nasional.

Selain itu, KBRI/PTRI Wina juga secara aktif terus melakukan perlindungan WNI selama tahun 2022.

Terdapat beberapa kendala utama yang teridentifikasi sehingga menghambat capaian ketiga IKU dimaksud, antara lain ketidakpastian ekonomi global dan pandemik COVID-19, dinamika konflik Rusia – Ukraina yang membuat inflasi ekonomi dan biaya energi tinggi di negara-

negara akreditasi KBRI Wina yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi, serta keterbatasan jumlah sumber daya manusia KBRI Wina.

Guna mengatasi kendala-kendala di atas, langkah antisipasi yang dilakukan KBRI Wina antara lain: senantiasa giat melakukan diplomasi ekonomi yang optimal dengan melibatkan pelaku usaha Indonesia dan diaspora Indonesia, melakukan koordinasi erat dengan pusat dan mitra kerja di negara akreditasi, melakukan koordinasi dengan sekretariat berbagai organisasi internasional di Wina, melakukan monitoring SAKIP serta menyelenggarakan kegiatan dialog kerja.

Di bawah ini disampaikan uraian mengenai aspek strategis bilateral dan multilateral, sebagai berikut:

1. **ASPEK BILATERAL**

a. **Austria**

Politik

Situasi politik Austria sejak awal tahun 2022 tergolong dinamis. Karl Nehammer dari Partai Rakyat Austria/*Austrian People's Party* (ÖVP) dilantik pada Desember 2021 untuk menjabat sebagai Kanselir Federal Austria menggantikan pejabat sebelumnya, Alexander Schallenberg yang mengundurkan diri untuk kembali ke jabatan Menteri Luar Negeri. Karl Nehammer sekaligus menjabat sebagai Ketua Partai, yang saat ini menduduki kursi terbanyak di Dewan Nasional dengan 71 dari 183 kursi. Saat ini, ÖVP memegang pemerintahan berkoalisi dengan Partai Hijau.

Karl Nehammer menjabat sebagai Ketua ÖVP setelah ketua sebelumnya, Sebastian Kurz, mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia politik dan juga dari jabatan Ketua Partai Rakyat Austria (ÖVP) karena skandal korupsi. Jabatan Kanselir Federal biasanya dijabat oleh seorang ketua partai dan merupakan praktik yang lazim dilakukan di sebuah sistem demokrasi parlementer.

Karl Nehammer memiliki reputasi memiliki sikap yang keras di isu-isu kebijakan migrasi. Pada bulan Agustus 2021 lalu pernah mengusulkan kepada Uni Eropa agar proses deportasi bagi imigran Afghanistan yang ditolak suakanya tetap dilanjutkan dengan membangun pusat-pusat deportasi di negara-negara tetangga Afghanistan. Sikap ini muncul setelah opsi deportasi ke Afghanistan tidak dapat dilakukan akibat adanya krisis politik.

Karl Nehammer juga dikenal tegas dalam menangani ancaman terorisme dan kelompok radikal, khususnya ketika pada masa-masa setelah terjadinya kasus penembakan oleh teroris di pusat kota Wina pada bulan November 2020 dimana otoritas setempat melakukan razia atas 60 rumah dengan menarget individu dan perkumpulan yang diduga berafiliasi dengan kelompok *Muslim Brotherhood* dan Hamas. Langkah tersebut dilakukan dengan tujuan memerangi ekstremisme.

Pada isu penanganan COVID-19, Nehammer juga dikenal tegas dalam menerapkan denda untuk para pelanggar ketentuan pembatasan sosial khususnya pada masa-masa awal pandemi. Sikap tegas terhadap penanganan COVID-19

menjadi krusial mengingat Austria saat ini tengah berencana menerapkan program vaksinasi wajib mulai 1 Februari 2022, yang disertai sanksi denda dengan jumlah maksimal bisa mencapai 7.200 euro.

Keamanan

Austria merupakan salah satu negara yang terkena dampak besar dari masuknya pengungsi yang tengah terjadi di benua Eropa, khususnya karena pada awal 2022 terjadi konflik Rusia dan Ukraina.

Pada tahun 2022, Austria menerima 97.000 aplikasi suaka. Dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 8,5 juta jiwa, Austria menjadi salah satu negara dengan tingkat pencari suaka per kapita tertinggi di Eropa.

Awal terjadinya konflik Rusia dan Ukraina, Austria menjalankan kebijakan menerima pengungsi secara terbuka dengan pertimbangan sebagian besar pengungsi hanya menjadikan Austria sebagai tempat transit. Namun Austria menilai bahwa tidak adanya kejelasan mengenai solusi bersama di tingkat Eropa, mengakibatkan Austria mengubah kebijakannya melalui pembatasan jumlah pengungsi yang diterima.

Meskipun bukan negara yang tertutup untuk pengungsi dan imigran, Austria saat ini lebih mengutamakan agar arus pengungsi/imigran tetap terkendali dan para pengungsi yang telah berada di Austria dapat terintegrasi dengan baik dengan masyarakat dan sistem setempat. Austria juga berupaya agar arus imigran tetap berjalan melalui proses legal dan tidak memunculkan gangguan keamanan dalam negeri khususnya yang terkait dengan isu terorisme dan agenda radikal kelompok keagamaan tertentu.

Austria termasuk dalam gabungan 6 (enam) negara Uni Eropa (Jerman, Belgia, Yunani, Belanda dan Denmark) yang mendukung dan menjalankan program

deportasi paksa bagi orang asing asal Afghanistan yang ditolak permohonan pencari suakanya. Dengan perkembangan terbaru di Afghanistan Austria saat ini lebih cenderung setuju dengan wacana untuk membuka pusat deportasi di negara-negara di sekitar Afghanistan.

Ekonomi

Pelonggaran kebijakan penanganan pandemi COVID-19 berpengaruh besar dalam perekonomian Austria, dengan pertumbuhan yang cukup kuat pada semester pertama 2022, mencapai 7,5%. Tetapi, pertumbuhan ekonomi menunjukkan perlambatan pada semester kedua 2022, terutama karena dampak krisis di Ukraina yang menyebabkan hambatan di rantai pasok industri Eropa, serta melonjaknya inflasi mencapai 11% yang disebabkan oleh tingginya harga energi. Secara keseluruhan, perekonomian Austria pada tahun 2022 tumbuh sebesar 4,8%.

Tren perbaikan ekonomi Austria melambat pada akhir 2022 akibat tingginya angka inflasi. Inflasi di Austria pada bulan November 2022 tercatat sebesar 11% (sebelas persen). Lonjakan Inflasi di Austria terutama karena kenaikan harga energi, transportasi dan pangan. Sebagai perbandingan, inflasi di Austria biasanya berada pada kisaran 1-3% pada tahun-tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2022 meningkat tajam dan bahkan melebihi 10% sejak September 2022. Sejumlah analis perbankan memperkirakan inflasi pada bulan-bulan mendatang akan mencapai antara 12-15% dan diperkirakan bahwa di tahun 2023, harga pangan dan energi di Austria masih akan terus meningkat. Dampak dari Inflasi tinggi yang berkepanjangan di Austria adalah perubahan perilaku konsumsi dan gaya hidup penduduk Austria, tuntutan kenaikan upah dari Serikat Pekerja serta mulai terjadinya aksi demonstrasi. Inflasi di Austria terutama karena kenaikan harga energi, transportasi dan pangan. Biaya terkait *Household Energy Consumption* merupakan pemicu utama tingginya inflasi, diikuti oleh kenaikan harga BBM dan makanan. Inflasi di Austria terus melonjak tinggi disebabkan oleh kenaikan harga bahan pangan dan harga energi akibat konflik di Ukraina

Harga energi yang lebih tinggi memicu kenaikan harga di banyak kelompok produk lain dan menyebabkan kerugian pendapatan riil, meskipun pemerintah telah melakukan tindakan penanggulangan melalui kebijakan tiga paket kompensasi inflasi. Melemahnya konsumsi swasta dan tingginya tingkat ketidakpastian, termasuk yang berkaitan dengan pasokan energi, juga mengurangi keinginan perusahaan untuk berinvestasi, terutama karena prospek ekspor juga memburuk meskipun euro melemah. Perekonomian Austria diperkirakan akan kembali ke jalurnya secara perlahan-lahan pada tahun 2023, dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,4 persen pada tahun 2023.

Di tengah buruknya kinerja perekonomian, tingkat pengangguran justru mengalami penurunan dari 8% pada 2021 menjadi 6,3% persen di akhir 2022. Tingginya jumlah lowongan pekerjaan menangkal efek negatif dari perlambatan ekonomi. Diperkirakan tingkat pengangguran akan stabil pada rata-rata tahunan sebesar 6,4 persen pada tahun 2023 di tengah fluktuasi siklus sepanjang tahun.

Guna mendukung pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Austria menetapkan berbagai kebijakan ekonomi, antara lain:

- 1) Inisiatif promosi ekspor "*Go International*" dengan memberikan dukungan promosi bagi perusahaan-perusahaan yang berinisiatif melakukan ekspor.
- 2) Penyediaan bantuan keuangan. Sekitar EUR 1 miliar setiap tahunnya disediakan oleh Bank Kredit Austria dalam bentuk pinjaman bunga rendah atau hibah bagi pengusaha guna mendukung pembiayaan usaha.
- 3) Pengurangan birokrasi. Ribuan perusahaan kecil Austria tidak lagi diwajibkan untuk memperoleh perizinan lokasi usaha. Pembentukan sistem informasi usaha dibuat terintegrasi secara nasional sehingga pengusaha dapat melakukan permohonan perizinan secara online.
- 4) Reformasi perpajakan dimana terdapat pengurangan besar pajak penghasilan dasar dari 36,5 persen menjadi 25%. Pengenaan pajak maksimal juga hanya akan diterapkan bagi penghasilan tahunan mulai EUR 90.000, dimana sebelumnya dikenakan pada nilai EUR 60.000.
- 5) Penyediaan dana stimulus sebesar EUR 200 juta untuk penelitian, pelatihan, dan bantuan keuangan bagi UKM.
- 6) Bantuan pendidikan untuk universitas ditingkatkan sebesar EUR 615 juta. Sehingga total dana bantuan untuk periode 2016-2018 mencapai EUR 9,72 miliar.

Pada sisi moneter, Bank Sentral akan terus memperketat kendali kebijakan moneter, dan lebih cenderung bermain aman guna memerangi inflasi. Tingkat pendanaan kembali/*refinancing* di zona euro akan mencapai puncaknya pada 4,00% dengan suku bunga deposito 3,50% pada pertengahan 2023.

Kantor Statistik Austria mencatatkan nilai total impor barang pada periode Januari hingga November 2022 secara nominal mencapai € 197,02 milyar, sementara ekspor barang berjumlah € 179,12 milyar. Dalam periode Januari hingga November 2022, impor meningkat 21,1% dan ekspor 18,1%. Defisit neraca

perdagangan menunjukkan nilai € 17,90 milyar, dibandingkan dengan € 11,02 milyar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Austria mengimpor barang senilai € 12,24 milyar dari negara-negara anggota Uni Eropa pada November 2022, dan mengekspor barang senilai € 12,47 milyar ke negara-negara UE. Dibandingkan dengan November 2021, impor intra-Uni Eropa meningkat 8,3% dan ekspor intra-Uni Eropa meningkat 16,4%. Hal ini menghasilkan neraca perdagangan yang positif dengan negara-negara anggota Uni Eropa sebesar € 230 juta. Sementara impor dari negara-negara non-UE mencapai € 7,47 milyar pada November 2022, naik 37,4% (y-o-y), dan ekspor ke negara non UE meningkat 11,1% menjadi € 5,66 milyar. Dalam hal ini, defisit neraca perdagangan dengan negara-negara non-UE sebesar € 1,81 milyar.

Empat kelompok produk terpenting dalam perdagangan internasional Austria adalah (i) mesin dan kendaraan, (ii) barang olahan, (iii) produk kimia, dan (iv) barang manufaktur lainnya. Ekspor kelompok ini menunjukkan pertumbuhan 13,4% menjadi € 15,25 milyar. Pertumbuhan ekspor absolut terbesar dalam kelompok ini dicapai dengan mesin dan kendaraan (+16,7%; + € 960 juta). Di sisi impor, empat kelompok produk terpenting bersama-sama menunjukkan peningkatan sebesar 16,3% menjadi € 15,00 milyar. Dalam kelompok ini, mesin dan kendaraan (+17,1%; + € 920 juta) mencatat peningkatan nilai impor absolut tertinggi, diikuti oleh produk kimia (+40,2%, + € 920 juta). Sementara pertumbuhan impor terbesar secara absolut dicapai oleh subkelompok produk medis dan farmasi (+83,5%; + € 800 juta).

Industri pariwisata merupakan sektor penting bagi perekonomian Austria, dengan kontribusi sebesar 7,6% terhadap PDB pada tahun sebelum pandemi 2019 (2020: 4,5%, 2021: 4,1%). Nilai tambah pariwisata (langsung dan tidak langsung) mencapai € 30,3 milyar pada tahun 2019, namun situasi pandemi cukup mempengaruhi sektor pariwisata dan menurunkan nilai tambah menjadi € 17 milyar pada 2020, dan € 16,6 milyar pada 2021. Pada tahun 2022, tercatat 22,1 juta wisatawan mengunjungi Austria, turun hingga setengah dibandingkan tahun 2019 yang menikmati kunjungan 46,2 juta turis. Negara-negara penting yang menyumbangkan turis di Austria adalah Jerman dan Belanda. Bersama turis lokal, turis dari dua negara ini menghasilkan lebih dari 80% pendapatan sektor penginapan di Austria.

Ditengah ketidakstabilan politik dan kondisi ekonomi Austria yang belum sepenuhnya pulih sebagaimana disebutkan tersebut diatas, KBRI / PTRI Wina tetap dapat menjaga hubungan bilateral yang baik antara kedua negara. Berbagai kegiatan dan capaian KBRI / PTRI Wina dalam konteks politik dan ekonomi bilateral akan dibahas lebih lanjut pada Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Masyarakat Austria mempunyai tingkat apresiasi dan toleransi yang tinggi terhadap kebudayaan asing sehingga menjadi faktor pendukung besar bagi diplomasi promosi budaya Indonesia oleh KBRI/PTRI Wina. Serangkaian kegiatan yang dilakukan KBRI/PTRI Wina selama tahun 2022 intinya terus memperkenalkan budaya dan pariwisata Indonesia yang dapat berdampak pada

nilai ekonomi, serta menampilkan wajah Islam di Indonesia yang moderat dan demokratis.

Secara umum citra Indonesia di Austria dan Slovenia cukup baik, tidak terdapat kegiatan ataupun propaganda yang merugikan maupun mengancam sepanjang 2022. KBRI/PTRI Wina terus berupaya untuk meningkatkan Nilai Indeks Citra Indonesia melalui berbagai program promosi seni budaya Indonesia antara lain seminar, webinar, partisipasi pada kegiatan festival dan pameran serta memanfaatkan jaringan media sosial dan laman perwakilan.

Kendala bagi upaya KBRI/PTRI Wina adalah pandemi yang berkelanjutan menghambat rencana kegiatan promosi dan terus berdampak negatif secara global terhadap keyakinan masyarakat untuk berwisata dan berbisnis pada tahun 2022.

b. Slovenia

Politik

Slovenia adalah republik demokratis parlementer dengan sistem pemilihan proporsional. Semua warga negara dewasa Republik Slovenia memiliki hak untuk memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum, multi-partai, dan bebas. Kekuasaan dibagi tiga, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemegang kekuasaan legislatif adalah parlemen, yang terdiri dari Majelis Nasional dan Dewan Nasional. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Pemerintah dan kekuasaan yudikatif dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Pada April 2022, Slovenia telah melaksanakan pemungutan suara reguler pertamanya setelah tiga kali pemilihan umum. Dalam pemilu ini, Partai Gerakan Kebebasan dipimpin oleh Robert Golob berhasil memenangkan pemilu dan membentuk pemerintahan koalisi dengan mitra-mitranya, yaitu Partai Sosial Demokrat dan Partai Kiri. Koalisi ini merupakan mayoritas dengan 53 anggota parlemen dari 90 anggota parlemen. Robert Golob sebagai pemimpin partai pemenang pemilu kemudian menjadi Perdana Menteri, dengan agenda utama yaitu mengatasi kenaikan harga energi dengan langkah-langkah kebijakan senilai hampir € 5 miliar.

Slovenia mengadakan pemilihan presiden pada akhir Oktober 2022, yang dimenangkan oleh kandidat independen Natasa Pirc Musar. Beliau menjadi presiden wanita pertama Slovenia dengan raihan 53,9% suara, sementara saingannya Andze Logar (anggota partai sayap kanan Partai Demokratik Slovenia) meraih 46,1% suara. Presiden baru menggantikan Borut Pahor yang telah menyelesaikan dua kali masa jabatan lima tahunnya. Meskipun jabatan presiden sebagian besar merupakan peran seremonial di Slovenia, kepala negara masih dipandang sebagai orang yang memiliki otoritas dan pengaruh, termasuk dalam hal kebijakan luar negeri.

Komite Pemilu Slovenia resmi menetapkan Natasa Pirc Musar, sebagai presiden wanita pertama Slovenia dengan jumlah dukungan suara sebesar 53,86%, dan

mengalahkan kandidat lainnya yaitu Anze Logar. Natasa Pirc Musar berusia 54 (lima puluh empat) tahun dan adalah seorang pengacara, sedangkan Anze Logar, sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Slovenia. Natasa Pirc Musar menjadi presiden Slovenia ke-5 (kelima), menggantikan presiden sebelumnya, Borut Pahor, dan merupakan Presiden wanita pertama bagi Slovenia. Kemenangan Natasa Pirc Musar diantaranya oleh karena:

- 1) Dikenal secara luas di Slovenia karena sebelumnya pernah menjadi pembawa berita dan komisioner penerangan dan informasi di Slovenia;
- 2) Selain itu, Natasa Pirc Musar dikenal memiliki *track record* kinerja yang cukup baik dikenal sebagai advokat untuk Hak Asasi Manusia dan penegakan hukum;
- 3) Pada putaran kedua, mendapatkan *boost* berupa dukungan dari Perdana Menteri Slovenia yaitu Robert Golob, yang juga merupakan Ketua Partai *Freedom Movement*, yang juga sekaligus partai pemenang;
- 4) Selain dukungan dari partai *freedom movement*, Natasa Pirc Musar juga mendapatkan dukungan dari *Youth Party* dan Partai *Green*;
- 5) Natasa Pirc Musar dianggap membawa program baru dan angin segar di tengah dinamika kawasan yang sedang bergejolak dengan inflasi tinggi, konflik Rusia-Ukraina, serta potensi krisis energi dan pangan sebagai salah satu dampak konflik;
- 6) Pada putaran kedua, secara khusus Natasa Pirc Musar mendapatkan dukungan dari Presiden Slovenia sebelumnya, yaitu: Danilo Turk.

Ekonomi

Pada paruh pertama 2022, Slovenia menikmati pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat mencapai 9% dibandingkan periode sebelumnya. Namun momentum pertumbuhan melambat pada paruh kedua 2022, menjadi 3,4% (y-o-y) dengan lemahnya sisi konsumsi sektor swasta. Grup Penelitian Bank Erste memperkirakan pertumbuhan pada tahun 2022 adalah 5,4%, sementara pertumbuhan tahun 2023 sekitar 1% akibat melemahnya permintaan eksternal, tekanan inflasi, dan tingkat ketidakpastian yang masih cukup tinggi.

Menurut laporan lembaga peneliti pemerintah *Institute of Macroeconomic Analysis and Development of the Republic of Slovenia* (IMAD) pada akhir 2022, pertumbuhan ekonomi Slovenia berada di level 3 persen dari yang sebelumnya mencapai 6 persen pada akhir 2021. Perubahan tersebut didasari atas kondisi inflasi tinggi sebagai dampak konflik Rusia dan Ukraina serta masih belum pulihnya ekonomi pasca pandemi. IMAD memperkirakan level pemulihan dari satu sektor ke sektor lain akan berbeda. Sektor manufaktur dan konstruksi merupakan dua sektor yang akan menunjukkan pertumbuhan lebih awal. Pertumbuhan nilai investasi juga diperkirakan akan relatif kuat khususnya pada proyek infrastruktur dan perumahan. Sektor yang diprediksi paling lambat pemulihannya adalah sektor pariwisata dimana IMAD memproyeksikan sektor tersebut baru mencapai di titik sebelum krisis pada tahun 2024.

Sementara itu, tingkat inflasi secara keseluruhan masih mendapatkan tekanan kenaikan harga yang kuat, indeks harga konsumen menunjukkan penurunan ke

angka satu digit, sebagai hasil dari kebijakan pemerintah untuk memitigasi dampak kenaikan harga energi. Inflasi diperkirakan akan tetap berada di kisaran 10% pada akhir tahun, diikuti dengan penurunan bertahap menuju tingkat yang lebih rendah pada 2023. Di sisi fiskal, target defisit anggaran 2023 lebih akomodatif, yang mencerminkan upaya pemerintah dalam mengatasi krisis energi.

Slovenia memiliki infrastruktur yang sangat baik, tenaga kerja yang berpendidikan baik, dan lokasi yang strategis antara wilayah Balkan dan Eropa Barat, menjadikan Slovenia sebagai salah satu negara dengan nilai PDB per kapita tertinggi di antara negara Eropa Tengah.

Data PDB Slovenia pada kuartal 3 tahun 2022 menunjukkan peningkatan sebesar 3,4% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan peningkatan dari sisi permintaan domestik. Sektor konsumsi privat menunjukkan data yang agak bertentangan dengan indikasi data jangka pendek, dengan peningkatan hanya sebesar 2,6% (y-o-y), dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 16,1% pada paruh pertama 2022.

Slovenia termasuk negara yang bergantung pada perdagangan dan nilainya hampir setara 120% pada PDB negara dan memiliki neraca perdagangan yang surplus. Komoditas ekspor terbesar Slovenia adalah kendaraan bermotor, perabot dan peralatan listrik rumah tangga, produk farmasi dan pakaian. Ekspor Slovenia berorientasi pada negara-negara Uni Eropa lainnya, terutama Jerman, Austria, Italia, dan Perancis. Komoditas impor terbesar Slovenia adalah barang mesin dan peralatan transportasi, barang-barang manufaktur, bahan kimia, bahan bakar dan pelumas dan makanan. Mitra impor utamanya adalah negara-negara Uni Eropa khususnya Jerman, Italia, Austria dan Perancis, serta Rusia.

Dari sisi perdagangan luar negeri, ekspor Slovenia pada tahun 2022 mencapai € 52,9 miliar dan impor sebesar € 56,8 miliar. Nilai perdagangan luar negeri jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dengan peningkatan pada ekspor sebesar 34,2% dan impor sebesar 36,6%. Defisit neraca perdagangan mencapai € 3,8 miliar, sedangkan rasio ekspor-impor adalah 93,2%.

Slovenia mengekspor bagian terbesar dari barang ke Swiss (21,0% dari total ekspor), diikuti oleh Jerman (14,4%), Italia (10,6%), Kroasia (8,4%), Austria (6,7%) dan Perancis (3,3%). Slovenia mengimpor bagian terbesar barang dari Swiss (14,6% dari total impor), diikuti oleh Jerman (12,5%), Italia (11,5%), RRT (8,9%), Austria (8,4%) dan Kroasia (5,0%).

Menurut *Standard International Trade Classification* – SITC, pangsa terbesar dari total ekspor pada tahun 2022 dikontribusikan sektor produk bahan kimia dan produk terkait (34,0% ekspor dan 31,9% impor), diikuti oleh mesin dan peralatan transportasi (26,7% ekspor dan 22,7% impor), barang-barang manufaktur yang diklasifikasikan terutama berdasarkan bahan (16,4% ekspor dan 14,5% impor), barang-barang manufaktur lainnya (sekitar 8,2% ekspor dan 7,0% impor), serta bahan bakar mineral, pelumas dan bahan terkait (8,0% dari ekspor dan 13,8% dari impor).

Risiko penurunan ekonomi Slovenia sangat terkait dengan dampak konflik Ukraina dan Rusia serta situasi ketidakpastian pasca pandemi COVID-19 di dalam negeri dan di mitra dagang utama Slovenia. Dinamika ekonomi Slovenia juga akan tergantung pada program vaksinasi, manajemen bencana, dan langkah-langkah mitigasi dan transisi yang berorientasi pada pembangunan yang merupakan bagian dari rencana pemulihan dan ketahanan Uni Eropa dan kerangka keuangan multi-tahun.

Di tengah dinamika politik dan kondisi ekonomi Slovenia dipengaruhi oleh tekanan inflasi dan krisis energi sebagaimana disebutkan tersebut diatas, KBRI / PTRI Wina tetap dapat menjaga hubungan bilateral yang baik antara kedua negara. Berbagai kegiatan dan capaian KBRI / PTRI Wina dalam konteks politik dan ekonomi bilateral akan dibahas lebih lanjut pada Bab III Akuntabilitas Kinerja.

2. ASPEK MULTILATERAL

a. *International Atomic Energy Agency (IAEA)*

Keanggotaan Indonesia pada Badan Tenaga Atom Internasional (*International Atomic Energy Agency/IAEA*) ditandai dengan penyerahan *instrument of ratification* terhadap perjanjian pendirian IAEA pada tanggal 7 Agustus 1957. Sejak saat itu, Indonesia terus berperan aktif dalam IAEA, antara lain dalam rangka mendorong kerja sama RI-IAEA yang difokuskan pada bidang-bidang yang terkait dengan 3 (tiga) pilar utama program IAEA, yaitu (a) *Nuclear Science and Technology Application*, (b) *Safety and Security*, dan (c) *Safeguard and verification*.

Pada tahun 2022, Indonesia melanjutkan memainkan peran dalam mendorong keseimbangan implementasi aktivitas kerja sama di bawah kerangka IAEA antara yang bersifat non-promosional seperti implementasi *safeguards*, keamanan dan keselamatan nuklir, dengan aktivitas promosional yang mendorong pemanfaatan teknologi nuklir di berbagai sektor pembangunan global yang bersifat strategis serta menjawab tantangan nyata komunitas global. Indonesia juga terus mendorong upaya keamanan nuklir global dengan mendukung peran IAEA sesuai mandat *Non Proliferation Treaty*, sebagai wujud komitmen dukungan terhadap upaya global untuk non proliferasi dan *disarmament*.

Prioritas kegiatan IAEA dalam lingkup pemanfaatan dan transfer teknologi nuklir untuk tujuan damai (*Peaceful Uses of Nuclear Energy / PUNE*) terus berkembang secara dinamis diselaraskan dengan perkembangan tantangan global, khususnya dalam aspek mitigasi dan pemulihan pasca pandemi penyakit zoonotik, aspek penanganan dampak dan mitigasi perubahan iklim, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas kesehatan dan nutrisi, serta penguatan rezim keselamatan dan keamanan nuklir. IAEA juga terus mengkampanyekan kerja sama dengan pemangku kepentingan non tradisional dari unsur organisasi internasional, organisasi non pemerintah dan sektor privat dalam mendorong hilirisasi aplikasi teknologi nuklir di berbagai sektor strategis dan prioritas.

Dalam kerangka kerja sama teknis, sepanjang tahun 2022 KBRI/ PTRI Wina berpartisipasi aktif dalam negosiasi dan pembahasan beberapa isu strategis yang berkembang dalam kerangka IAEA, di antaranya kelanjutan proyek kerjasama teknis penanganan pandemi COVID-19, penguatan layanan penanganan penyakit kanker melalui program *Rays of Hope*, serta kelanjutan program *Zoonotic Disease Integrated Action Project* (ZODIAC), proyek NUTEC *Plastics*, serta pembahasan program kerja sama teknis IAEA tahun 2023.

Selain itu, Pemerintah RI juga terus mendorong untuk memastikan agar pendanaan program kerja sama teknis melalui *Technical Cooperation Fund* (TCF) dapat *sufficient, assured and predictable* (SAP). Hal ini merupakan upaya agar IAEA tidak hanya dikenal sebagai *nuclear watchdog*, melainkan juga dipandang relevan karena kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Dalam kerangka keselamatan, keamanan dan *safeguards*, sepanjang tahun 2022 terdapat beberapa isu strategis dimana Indonesia terus mengambil peran aktif di antaranya isu keselamatan dan lingkungan dalam penanganan dekomisioning fasilitas PLTN Fukushima Daiichi di Jepang, isu *safeguards* dan NPT dalam program *naval nuclear propulsion* (NNP), serta upaya penguatan peran IAEA dalam verifikasi implementasi kesepakatan antar pihak dalam JCPOA. Dalam lingkup keamanan nuklir, pada tahun 2022 Indonesia berperan aktif dalam *Review Conference Convention on of the Parties to the Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material* yang dilaksanakan pada periode bertepatan dengan krisis keamanan dan keselamatan nuklir di kawasan Eropa. Indonesia terus menunjukkan komitmen memperkuat rezim keamanan nuklir global yang menjadi isu strategis ditengah perubahan situasi politik kawasan dan global. Dalam lingkup keselamatan nuklir, terutama dikaitkan dengan *new technology*, Indonesia mengambil peran aktif dalam pembahasan kerangka pedoman dan regulasi keselamatan yang diperlukan industri nuklir global menyongsong perkembangan riset teknologi reaktor maju dan aplikasinya dalam satu dekade mendatang.

Dalam kerangka kerja sama bilateral Indonesia-IAEA, KBRI/PTRI Wina pada tahun 2022 melalui kerjasama dengan IAEA turut mendukung pencapaian target keketuaan G20 Indonesia, diantaranya dengan pembentukan tim perumus masukan peran energi nuklir dalam *Energy Transition Working Group* G20 serta dukungan riset teknologi nuklir untuk *sustainable use of biodiversity* yang menjadi tema utama *Research And Innovation Initiative Gathering* (RIIG) G20. Dalam lingkup kerjasama teknis, KBRI/PTRI Wina memfasilitasi koordinasi teknis pembahasan penyelarasan kerjasama teknis (*Technical Cooperation*) nasional Indonesia dengan perubahan instansi penjuror kerjasama teknis pada tingkat nasional seiring penggabungan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Penyelarasan dimaksud bertujuan untuk mendukung optimalisasi implementasi proyek kerja sama teknis nasional Indonesia pada siklus tahun 2022-2023. KBRI/PTRI Wina juga merintis pembahasan kelanjutan implementasi inisiatif *Regional Capacity Building Initiative* (RCBI) yang menjadi salah satu platform kerja sama pengembangan kapasitas

riset teknologi nuklir di kawasan Asia Pasifik, di antaranya melalui penetapan laboratorium BRIN sebagai *Collaborating Centre* IAEA untuk bidang *Climate Smart Agriculture* dan *Non Destructive Investigation*.

b. UNODC

Dalam arus globalisasi yang demikian pesat, kejahatan terorganisir lintas batas negara (*transnational organized crimes*) menjadi ancaman serius terhadap keamanan global.

Kompleksitas kejahatan lintas batas negara tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti arus globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat maupun situasi pandemi COVID-19 yang telah merubah modus operandi tindak kejahatan. Hal ini membutuhkan kerja sama kolektif negara-negara untuk mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk kejahatan lintas negara terorganisir seperti isu korupsi, pencucian uang, peredaran dan perdagangan gelap narkoba, perdagangan orang dan penyelundupan manusia, terorisme dan bentuk-bentuk baru kejahatan lainnya yang terus berkembang, termasuk kejahatan siber.

Kerja sama multilateral dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas negara terorganisir diatur di bawah kerangka *UN Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC), *UN Convention against Corruption* (UNCAC), *Single Convention on Narcotic Drugs* 1961, *Convention on Psychotropic Substances* 1971, dan *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988, yang keseluruhannya berada di bawah UNODC.

Indonesia merupakan negara pihak pada UNTOC dan dua protokolnya yaitu *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* dan *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea*.

Indonesia juga merupakan negara pihak pada tiga Konvensi anti narkoba yaitu *Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961; *Convention on Psychotropic Substances*, 1971; dan *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988.

Terkait isu korupsi, Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Indonesia juga berkomitmen untuk mengimplementasikan UNCAC secara menyeluruh.

Seiring perkembangan jaman dan situasi pandemi yang terus berkembang pada tahun 2022, negara-negara memberikan perhatian serius terhadap bentuk baru kejahatan lintas negara terorganisir, seperti *cyber crime*, penjualan produk-produk medis palsu maupun penggunaan ICT untuk memfasilitasi kejahatan.

Pada tahun 2022, Indonesia terus memainkan peran penting dan strategis dalam berbagai pertemuan dan pembahasan mengenai upaya pencegahan dan

penanggulangan kejahatan lintas negara terorganisir. Indonesia menjadi terlibat aktif dalam negosiasi tiga dokumen penting, yaitu:

- 1) Berpartisipasi dalam 3 (tiga) sesi negosiasi *draft* Konvensi PBB mengenai Siber dalam kerangka *Ad Hoc Committee to Elaborate an International Convention on Countering the Use of ICTs for Criminal Purposes* (AHC). Indonesia merupakan *rapporteur* pada AHC;
- 2) Mendorong pencalonan Indonesia sebagai anggota *Commission on Narcotic Drugs* (CND) Periode 2024 -2027 yang disampaikan pada sesi ke-65 CND;
- 3) Mendorong pencalonan Indonesia sebagai anggota *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* periode 2024-2027 yang disampaikan pada sesi ke-31 CCPCJ; dan
- 4) Aktif dalam berbagai pertemuan di bawah kerangka UNCAC seperti *Working Group on Asset recovery* dan *Implementation Review Group*.

c. Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization (CTBTO)

CTBTO adalah salah satu organisasi internasional dengan tugas pokok untuk menyiapkan suatu sistem verifikasi global memonitor kepatuhan terhadap Traktat pelarangan percobaan senjata nuklir (*Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty/CTBT*).

Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty (CTBT) masih belum berlaku karena masih diperlukan ratifikasi dari 8 negara dari *Annex II* CTBT (Amerika Serikat, China, India, Iran, Israel, Korea Utara, Mesir, dan Pakistan). Ratifikasi kedelapan negara tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi agar CTBT dapat diberlakukan (*entry into force*).

Adapun rangkaian pertemuan CTBTO yang dihadiri selama tahun 2022, antara lain:

- 1) Sesi ke-62 *Working Group A* di Wina, Austria, tanggal 19 - 21 Oktober 2022;
- 2) Sesi ke-61 *Working Group A* di Wina, Austria, tanggal 2-3 Juni 2022;
- 3) Sesi ke-59 *Working Group B* tanggal 22 Agustus - 2 September 2022;
- 4) Sesi ke-58 *Working Group B* tanggal 21 Februari - 4 Maret 2022;
- 5) Sesi ke-57 *Resumed Session of the Preparatory Commission* tanggal 17 Februari 2022;
- 6) Sesi ke-58 *Preparatory Commission*, tanggal 27 - 28 Juni 2022.
- 7) Sesi ke-59 *Preparation Committee*, tanggal 21-23 November 2022;
- 8) *Resumed session* pertemuan ke-59 *Preparation Committee* tanggal 2 Desember 2022; dan
- 9) *Resumed session* pertemuan ke-59 *Preparation Committee* tanggal 12 Desember 2022.

Indonesia juga menghadiri *CTBTO Science and Diplomacy Forum* yang dilakukan di Wina pada tanggal 6 – 9 Desember 2022.

Adapun beberapa isu pokok yang menjadi perhatian utama Pemri, antara lain:

- 1) Melanjutkan peran Indonesia dalam mendorong sejumlah posisi/prakarsa penting dalam forum pertemuan CTBTO, khususnya dalam senantiasa menekankan pentingnya CTBT sebagai rezim internasional untuk nuclear disarmament dan non-proliferasi nuklir. Indonesia juga aktif mendorong penguatan beberapa sektor teknis penting dalam rezim verifikasi dan monitoring dan verifikasi di mana Indonesia memiliki pengalaman dalam pengembangan teknik dan metode bersama CTBTO dan negara-negara lainnya;
- 2) Terkait dengan *entry into force*, KBRI/PTRI Wina dalam berbagai kesempatan mendorong pentingnya universalisasi *Comprehensive Test-Ban Treaty* dan pemberlakuan CTBT serta meminta agar negara-negara, terutama negara-negara pada *Annex II* CTBT yang belum meratifikasi, dapat melakukan proses tersebut;
- 3) Lebih lanjut, sebagai organisasi yang memiliki pemanfaatan teknologi verifikasi untuk tujuan sipil dan ilmiah Indonesia selalu menekankan bahwa pengembangan kapasitas dan program pelatihan di bawah 4 (empat) pilar utama CTBTO sangat penting bagi pengembangan dan kemampuan *Signatory States*, terutama bagi negara-negara berkembang. Dalam forum-forum pertemuan reguler tahunan, KBRI/PTRI Wina senantiasa menyampaikan posisi Indonesia terkait pentingnya implementasi program *capacity building* dan pelatihan dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh negara pihak, terutama negara berkembang;
- 4) Dalam hal keterwakilan pada organ-organ CTBTO, Indonesia senantiasa mendorong lebih jauh upaya meningkatkan *geographical distribution and gender balance* dalam rekrutmen PTS di semua tingkatan pada organ-organ CTBTO, khususnya bagi negara-negara berkembang; dan
- 5) Isu *noble gas background* dan pemanfaatan teknologi deteksi nuklir untuk mitigasi gempa bumi dan bencana alam.

d. United Nations Committee on Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS)

United Nations Committee on Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) merupakan forum multilateral di bawah PBB untuk mendorong penelitian, pertukaran informasi serta perkembangan iptek dan hukum internasional di bidang keantariksaan.

Indonesia yang merupakan anggota sejak tahun 1973 dan senantiasa aktif antara lain dengan menyuarakan perlunya pengembangan kapasitas melalui bantuan teknis bagi negara-negara berkembang guna menjembatani jurang teknologi keantariksaan antara negara maju dan negara berkembang. Seruan tersebut disuarakan secara individual maupun melalui kelompok *G77 and China*.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan beberapa pertemuan di bawah kerangka UNCOPUOS yang sempat tertunda pelaksanaannya karena pandemi COVID-19, yaitu:

- 1) *61st Session of the Legal Subcommittee (LSC)*, secara *hybrid* pada tanggal 28 Maret – 28 April 2022;
- 2) *59th session of the Scientific and Technical Subcommittee (STSC)*, secara *hybrid* pada tanggal 7 – 18 Februari 2022;
- 3) *65th session of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*, secara *hybrid* pada tanggal 1-10 Juni 2022.

KBRI Wina juga menghadiri *the United Nations/Chile Online Conference on Space Law and Policy: Governance and Legal Perspectives on Space Activities in Earth Orbit and Beyond* yang diselenggarakan di Wina, Austria pada tanggal 10-12 Mei 2022 dan pertemuan *Space Camp* yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2022.

Beberapa topik utama pembahasan utama yang menjadi kepentingan nasional Indonesia, antara lain:

- 1) Implementasi *Space2030 Agenda* hasil pertemuan Komite UNCPUOUS tahun 2021. *Space2030 Agenda* memuat kerangka kerja sama COPUOUS dan beberapa *milestones* bagi komunitas internasional dalam penyelerasan kebijakan luar angkasa dengan SDGs. Agenda memuat berbagai kerangka instrumen, mekanisme, program serta proyek regional dan internasional yang memfasilitas negara anggota memperoleh manfaat dari pengembangan teknologi luar angkasa dan aplikasinya, serta mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan global;
- 2) Terus mengusung isu *delimitation and definition of outer-space* sebab Indonesia merupakan negara yang memiliki ruang udara terbuka secara geologis dan memiliki ruang GSO terbesar di dunia;
- 3) Mengusulkan pembentukan sui generis GSOs untuk mengatur akses terhadap GSOs sebagai sumber daya alam terbatas yang penggunaannya harus secara adil dan terbuka bagi negara anggota, termasuk *slot* GSO untuk satelit telekomunikasi. Indonesia mencoba mendobrak sistem *first come first served* dalam ITU yang berlaku saat ini karena cenderung menguntungkan negara maju;
- 4) Isu *sustainable use of outer space* dan penggunaan teknologi antariksa secara damai bagi kepentingan telekomunikasi, kesehatan dan kedokteran, pangan, pertanian, penanganan dan mitigasi bencana alam, perubahan iklim, cuaca dan lain-lain;
- 5) Isu *dark and quite sky*;
- 6) Isu *safety and security*, termasuk isu *space debris mitigation*;
- 7) Isu *nuclear power of outer space*; dan
- 8) Isu *woman and youth* dalam *outer space*.

e. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR)

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) adalah organisasi internasional yang dibentuk oleh Sidang Umum PBB (*UN General Assembly*) pada saat pelaksanaan sidang ke-10 pada tanggal 3 Desember 1955. Berdasar Resolusi 913 (X), anggota komite UNSCEAR saat itu terdiri atas Argentina, Australia, Belgia, Brazil, Kanada, Ceko, Slowakia, Mesir,

Perancis, India, Jepang, Meksiko, Swedia, Inggris, Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Keanggotaan Indonesia diterima oleh Sidang Umum PBB melalui adopsi Resolusi 3154 (XXVIII) tahun 1973. Keanggotaan Indonesia pada UNSCEAR selaras dengan pengembangan program nuklir nasional untuk tujuan damai pada tahun tersebut yang telah cukup maju dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan nuklir dunia dan program kerja UNSCEAR.

Indonesia, seperti negara anggota lainnya, secara periodik berpartisipasi aktif dalam memberikan kontribusi data/informasi saintifik yang diperlukan UNSCEAR dalam penyusunan kajian. Data saintifik yang dikontribusikan diantaranya terkait besaran paparan radiasi yang diterima masyarakat dan pekerja dari berbagai jenis sumber radiasi di lingkungan dan tempat kerja (industri, kesehatan, dan lainnya); paparan akibat kecelakaan radiasi; paparan akibat pemakaian radiasi untuk keperluan medis; dan data lainnya yang spesifik.

Indonesia juga terlibat dalam penyusunan dokumen-dokumen sains UNSCEAR yang dirangkum dalam publikasi *Effects of Ionizing Radiation* sebagai laporan hasil kerja UNSCEAR kepada Sidang Umum PBB. Publikasi ini diterbitkan secara periodik dan umumnya terdiri atas dua volume serta dilengkapi dengan sejumlah lampiran ilmiah. Publikasi hasil kerja UNSCEAR ini sangat penting karena dijadikan sebagai rujukan oleh *International Commission on Radiological Protection* (ICRP), suatu organisasi ilmiah internasional nirlaba yang bergerak di bidang proteksi dan keselamatan radiasi, untuk menyusun rekomendasi terkait pelaksanaan proteksi dan keselamatan radiasi dalam aplikasi radiasi di berbagai bidang kehidupan manusia.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan beberapa pertemuan di bawah kerangka UNSCEAR, yaitu:

- 1) *69th Annual Scientific Committee Session*, secara hybrid pada tanggal 9-13 Mei 2022;
- 2) *Informal Contact Group (ICG) Meetings* pada tanggal 2 Maret, 3, 24 dan 31 Agustus 2022; dan
- 3) *Diplomatic Briefing on UNSCEAR Programme*, pada tanggal 28 November 2022.

Pada tahun 2022, Indonesia melanjutkan peran kontribusi terhadap program teknis komite sains UNSCEAR dalam beberapa topik strategis di mana Indonesia memiliki data teknis yang dapat memberikan kontribusi penting dalam konklusi komite, diantaranya *Biological Mechanisms Relevant For the Inference of Cancer Risks from Low-Dose and Low-Dose-Rate Radiation dan Levels and effects of radiation exposure due to the accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station: implications of information published since the UNSCEAR 2013 Report*. Indonesia juga menyampaikan komitmen dukungan lebih lanjut kepada program komite melalui pelibatan *stakeholder* nasional lintas kementerian/lembaga dan organisasi profesi terkait keselamatan radiasi.

Pada aspek penguatan kerja sama bilateral dengan UNSCEAR, KBRI/PTRI Wina memfasilitasi komunikasi dan koordinasi instansi penjuror nasional dalam upaya alih bahasa publikasi resmi UNSCEAR kedalam bahasa Indonesia untuk memperluas diseminasi hasil kajian UNSCEAR kepada pemangku kepentingan nasional sebagai bagian upaya memperkuat aspek keselamatan dan proteksi radiasi. KBRI/PTRI Wina juga memfasilitasi komunikasi penggunaan hasil riset para peneliti nasional sebagai referensi UNSCEAR dalam melakukan kajian sesuai program kerja hingga tahun 2025.

f. *United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)*

UNIDO adalah badan khusus PBB yang bertujuan untuk mempromosikan pengembangan industri untuk pengentasan kemiskinan, globalisasi dan keberlanjutan lingkungan yang inklusif. Prioritas Indonesia di UNIDO adalah mendorong kerja sama di bidang Industri 4.0, secara khusus pembangunan kapasitas UMKM Indonesia dalam rangka menghadapi era revolusi industri keempat.

Indonesia melalui Kementerian Perindustrian RI bersama UNIDO telah menandatangani *UNIDO Country Program (IUCP) 2021-2025* sebagai kelanjutan dari *Country Program 2016-2020*.

Selain itu, sebagai bentuk partisipasi aktif dan kepemimpinan Indonesia di organisasi internasional, untuk periode 2021-2022, Indonesia menduduki beberapa posisi penting di forum UNIDO. Pertama, Indonesia terpilih menjadi *President of the Industrial Development Board (2020 – 2021)*. Kedua, Indonesia juga dipercaya menjadi anggota *Programme and Budget Committee (PBC)* yang berakhir pada pertengahan 2022 dan *Industrial Development Board (IDB) 2019-2023*.

Keanggotaan ini dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pemajuan kepentingan Indonesia di organisasi tersebut. Indonesia terus berupaya mendorong kerja sama tersebut dalam berbagai pertemuan UNIDO di masa mendatang.

g. *United Nations Commission of International Trade Law (UNCITRAL)*

UNCITRAL memainkan peranan penting dalam harmonisasi dan unifikasi aturan perdagangan internasional secara umum dan aturan aktivitas komersial internasional secara khusus.

KBRI/PTRI Wina telah berperan aktif dalam berbagai pertemuan UNCITRAL, yaitu pertemuan Komisi UNCITRAL dan pertemuan *working group (WG) I – VI*, baik secara virtual dan fisik.

Dalam setiap pertemuan, masing-masing WG membahas berbagai dokumen hukum yang bertujuan untuk memperlancar aktivitas perdagangan dan komersial internasional serta reformasi hukum di masing-masing negaranya termasuk Indonesia.

Khusus pada isu WG III – *ISDS Reform*, Indonesia c.q. KBRI/PTRI Wina turut berkontribusi dalam pembahasan upaya reformasi sistem penyelesaian sengketa

investor – negara melalui *paper Indonesia's Perspective and Comment on the Initial Draft on the Establishment of Advisory Center on the International Investment Law*.

h. OPEC Fund for International Development (OPEC Fund)

Pada tahun 2022, pertemuan BOG OPEC Fund mulai dilakukan dengan format pertemuan langsung dan secara umum berjalan baik. KBRI/PTRI Wina secara konsisten memberikan dukungan yang diperlukan kepada Menteri Keuangan yang mewakili Indonesia di forum *Ministerial Council* dan Dirjen Anggaran Kemenkeu RI yang mewakili Indonesia di forum *Board of Governors* pada *OPEC Fund*.

Di tahun yang penuh tantangan seperti pandemi saat ini, bantuan dana dari OPEC Fund telah banyak membantu negara-negara yang kurang berkembang khususnya dalam menggerakkan ekonominya seperti melanjutkan pembangunan infrastruktur.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis KBRI/PTRI Wina Tahun 2022

Kinerja KBRI/PTRI Wina selama tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perwakilan RI untuk Austria, Slovenia, PBB dan Organisasi Internasional Lainnya di Wina. Renstra tersebut disusun sesuai dengan analisa strategis kekuatan dan kelemahan KBRI / PTRI Wina serta selaras dengan kebijakan luar negeri Indonesia.

Renstra mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan program KBRI/PTRI Wina tahun 2022-2040 sebagai berikut:

VISI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

“Memimpin diplomasi yang aktif dan efektif untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

VISI KBRI / PTRI WINA

“Memimpin diplomasi yang aktif dan efektif antara Indonesia dengan Austria, Slovenia dan Organisasi Internasional di Wina, Austria, untuk Indonesia Maju”

MISI KBRI KBRI / PTRI WINA

Memberikan nilai manfaat ekonomi yang optimal di wilayah akreditasi KBRI/PTRI Wina untuk mendukung struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

Memberikan perlindungan WNI/BHI di wilayah akreditasi KBRI/PTRI Wina yang prima sebagai upaya perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

Meningkatkan citra positif Indonesia di wilayah akreditasi KBRI/PTRI Wina dan Organisasi Internasional yang berkedudukan di Wina.

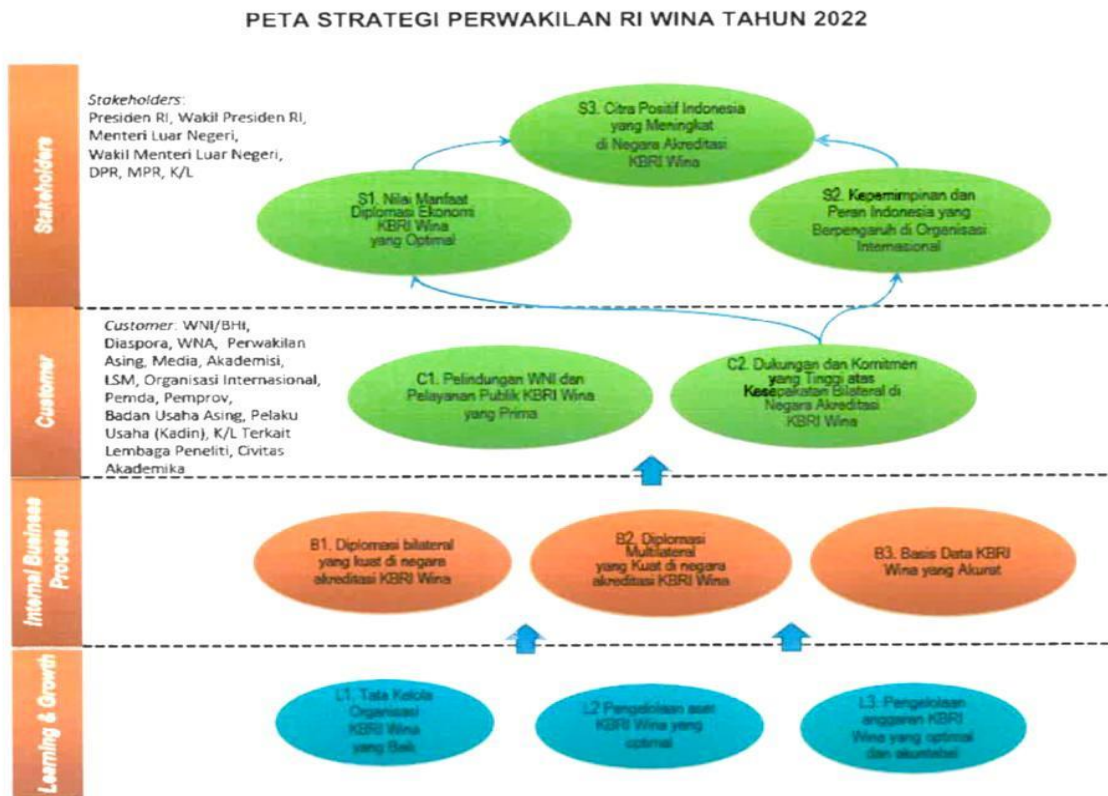
Gambar II.1

Pernyataan visi dan misi di atas menggambarkan komitmen yang akan diperjuangkan dan diwujudkan oleh KBRI/PTRI Wina, terutama melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari institusi penyelenggara hubungan dan pelaksana politik luar negeri.

2.2. Perjanjian Kinerja

Melalui konsultasi dengan pusat, KBRI/PTRI Wina telah menyusun Perjanjian Kerja (PK) dan Rencana Aksi (Renaksi) tahun 2022 sebagai panduan pelaksanaan kegiatan KBRI / PTRI Wina. PK dan Renaksi tersebut terdiri atas 4 (empat) *perspective*, yaitu: *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Business Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Keempat *perspective* tersebut memiliki total 19 IKU.

Adapun Peta Strategis Perwakilan RI Wina tahun 2022 dapat dijabarkan dalam gambar skema sebagai berikut:



Gambar II.2

Adapun table yang memuat Sasaran Strategis, IKU dan Target yang harus dicapai oleh KBRI/PTRI Wina tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Stakeholders Perspective				
S.1	Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KBRI Wina yang Optimal	IKU S.1.1	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Wina	90 %
		SUB IKU 1	Jumlah komitmen perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Wina	1
		SUB IKU 2	Nilai perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Wina	USD 280 juta
		IKU S.1.2	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI Wina	90%
		SUB IKU 1	Jumlah komitmen investasi dengan negara akreditasi KBRI Wina	1
		SUB IKU 2	Nilai investasi dengan negara akreditasi KBRI Wina	USD 50 juta
		IKU S.1.3	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Wina	90%
		SUB IKU 1	Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI Wina ke Indonesia	80%
		SUB IKU 2	Jumlah wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI Wina ke Indonesia	1750
S.2	Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di organisasi internasional	IKU S.2.1	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral	96%
		IKU S.2.2	Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri multilateral	96%

S.3	Citra positif Indonesia yang meningkat di negara akreditasi KBRI Wina	IKU S.3.1	Indeks Citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Wina	4 (skala 5)
Customer Perspective				
C.1	Pelindungan WNI dan pelayanan publik KBRI Wina yang prima	IKU C.1.1	Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Wina yang diselesaikan	80%
		IKU C.1.2	Nilai persepsi kepuasan pelayanan konsuleran KBRI Wina	4 (Skala 4)
		IKU C.1.3	Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI KBRI Wina	4 (Skala 4)
C.2	Dukungan dan komitmen yang tinggi atas kesepakatan bilateral di negara akreditasi KBRI Wina	IKU C.2.1	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara akreditasi KBRI Wina	90%
Internal Business Process Perspective				
B.1	Diplomasi bilateral yang kuat di negara akreditasi KBRI Wina	IKU B.1.1	Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya dengan negara akreditasi KBRI Wina	4
		IKU B.1.2	Jumlah kesepakatan di bidang politik, keamanan, dan maritim dengan negara akreditasi KBRI Wina	2
		IKU B.1.3	Indeks Respon Positif terhadap informasi data Economic Intelligence/Market Intelligence tentang negara akreditasi KBRI Wina	5 (skala 5)
B.2	Diplomasi multilateral yang kuat di negara akreditasi KBRI Wina	IKU B.2.1	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral di bidang sosial, ekonomi, dan budaya	90%
		IKU B.2.2	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral di bidang politik, keamanan, dan maritim	90%
B.3	Basis data KBRI Wina yang akurat	IKU B.3.1	Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Wina yang terverifikasi di Portal Peduli WNI	80%
Learning and Growth Perspective				
L.1	Tata kelola organisasi KBRI Wina yang baik	IKU L.1.1	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Wina	79,5 (BB)

L.2	Pengelolaan aset KBRI Wina yang optimal	IKU L.2.1	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri	2,7 (Skala 4)
L.3	Pengelolaan anggaran KBRI Wina yang optimal dan akuntabel	IKU L.3.1	Nilai Kinerja Anggaran KBRI Wina	92

Tabel II.3

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional di Perwakilan RI	Rp.2.846.182.000,-
2	Pelayanan dan Pelindungan WNI Perwakilan RI	Rp.271.366.000,-
3	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp.49.343.295.000,-
Pagu Anggaran KBRI Wina 2022		Rp. 52.460.843.000,-

Tabel II.4

Sesuai dengan DIPA KBRI/PTRI Wina TA 2022, KBRI/PTRI Wina melaksanakan 4 (empat) program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perwakilan RI di luar negeri (LN), Program Perlindungan WNI di LN serta Pelayanan Publik dan Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerja sama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri.

No	JENIS BELANJA	DIPA
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemlu	Rp. 47.289.331.000,00
	a. Gaji dan Tunjangan	Rp. 35.519.856.000,00
	b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 11.769.475.000,00
2	Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di LN	Rp. 3.118.076.000,00
3	Program Perlindungan WNI di LN serta Pelayanan Publik	Rp. 315.841.000,00
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perwakilan RI di LN	Rp. 1.900.000.000,00
Sub Jumlah		Rp. 52.623.248.000,00

Tabel II.5

Sebagai catatan, bila dibandingkan dengan Perjanjian Kerja (PK) KBRI Wina tahun 2021, terlihat bahwa PK KBRI / PTRI Wina tahun 2022 memiliki beberapa perubahan pada IKU, yaitu perubahan IKU terkait diplomasi ekonomi lebih difokuskan kepada tingkat efektifitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan, tingkat efektifitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dan tingkat efektifitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata. Masing-masing IKU tersebut memiliki sub-IKU yang memiliki target kuantitatif khusus baik peningkatan komitmen dan nilai perdagangan, investasi dan jumlah wisatawan mancanegara.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi perwakilan RI dan amanat kinerja Presiden RI, capaian diplomasi ekonomi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang perdagangan, investasi dan kunjungan wisatawan mancanegara. Hal ini ditujukan agar hasil diplomasi dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air.

Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal merupakan jumlah nominal manfaat secara ekonomi, keuangan dan pembangunan yang paling menguntungkan yang dihasilkan oleh berbagai kerja sama dan hubungan perdagangan, investasi dan pariwisata antar negara.

KBRI / PTRI Wina telah menetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang kemudian dijabarkan dalam 19 (sembilan belas) IKU sebagai ukuran keberhasilan guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Strategis KBRI / PTRI Wina Tahun 2020-2024.

Catatan: capaian IKU dan Sub IKU di bawah Sasaran Strategis Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KBRI Wina yang Optimal tahun 2022 sulit dibandingkan dengan capaian di tahun-tahun sebelumnya mengingat terdapat perubahan IKU di tahun 2022. Perubahan nomenklatur dan formasi IKU ini diharapkan dapat merefleksikan kinerja perwakilan yang lebih optimal dan memiliki tingkat kendali yang tinggi. Adapun IKU ini mengevaluasi capaian kinerja berdasarkan tingkat efektivitas diplomasi ekonomi yang dilakukan perwakilan dan tidak hanya berdasarkan kenaikan nilai perdagangan, investasi atau peningkatan jumlah wisatawan.

Berdasarkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan, seperti yang tercantum pada Bab II, maka Capaian Kinerja KBRI / PTRI Wina, dapat dijelaskan sebagai berikut:

S.1 NILAI MANFAAT DIPLOMASI EKONOMI KBRI WINA YANG OPTIMAL

Pembangunan nasional merupakan salah satu prioritas masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Untuk mendukung prioritas tersebut, Menteri Luar Negeri RI kembali menegaskan bahwa diplomasi ekonomi merupakan prioritas bagi diplomasi Indonesia. Definisi diplomasi ekonomi mencakup upaya meningkatkan perdagangan, investasi dan kunjungan wisatawan dari negara akreditasi seluruh perwakilan RI di luar negeri. Sehingga salah satu tolak ukur kinerja perwakilan RI di luar negeri adalah keberhasilan dalam meningkatkan kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata antara Indonesia dan negara mitranya.

IKU ini sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Kemenlu dan Perwakilan RI serta melaksanakan amanat Presiden RI dalam RPJMN 2020-2024, yakni kinerja diplomasi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang perdagangan agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air. IKU ini secara spesifik mengukur *value* yang diperoleh Indonesia dari upaya diplomasi ekonomi untuk perdagangan.

Berikut tabel informasi rincian target kinerja KBRI/PTRI Wina untuk IKU S.1.1:

	IKU/Sub IKU	Bobot	Target Sub IKU 2022	Proyeksi Realisasi 2022	Proyeksi Capaian 2022	Target IKU 2022
IKU-1	Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi KBRI Wina	33,33%				90%
Sub IKU 1	Jumlah komitmen perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Wina	70%	1	1	100%	70%
Sub IKU 2	Nilai Perdagangan Indonesia dengan Negara Akreditasi	30%	USD 280.000.000	USD 280.000.000	100%	30%

Tabel III.1 matriks informasi target IKU S.1.1 Tahun 2022

Efektivitas realisasi diplomasi ekonomi KBRI/PTRI Wina tahun 2022 di sektor perdagangan cukup tinggi, mengingat semua capaian pada IKU melebihi target.

	IKU/Sub IKU	Bobot	Realisasi Sub IKU 2022	Capaian Sub IKU 2022	Realisasi IKU 2022
IKU-1	Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi KBRI Wina				120%
Sub IKU 1	Jumlah komitmen perdagangan dengan negara akreditasi KRI Wina	70%	2	200%	120%
Sub IKU 2	Nilai Perdagangan Indonesia dengan Negara Akreditasi	30%	USD 580.300.000	207,25 %	120%

Tabel III.2 matriks informasi realisasi IKU S.1.1 Tahun 2022

Dengan demikian, IKU capaian perdagangan Indonesia dengan Austria dan Slovenia adalah sebagai berikut:

IKU S.1.1	Informasi Kinerja	2022
Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Wina	Sub IKU 1 Jumlah komitmen perdagangan dengan negara akreditasi KRI Wina	120%
	Sub IKU 2 nilai perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Wina	120%
	Target	90%
	Capaian	120%

Tabel III.3 Informasi Capaian Kinerja IKU S.1.1

Sub IKU 1: Jumlah komitmen perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Wina

Sebagaimana termuat dalam *Blue Book Bappenas*, pada tahun 2022, terdapat 2 (dua) dokumen komitmen perdagangan yang disepakati Indonesia dan Austria, yaitu:

1. Komitmen kerja sama perdagangan dalam bentuk revitalisasi peralatan kesehatan (alkes) dengan RS Ramelan senilai € 10.000.000; dan
2. Komitmen kerja sama pembangunan unit radiologi RSPAD senilai € 15.344.000.

Untuk meningkatkan hubungan perdagangan Indonesia dengan negara akreditasi, KBRI/PTRI Wina secara rutin melakukan berbagai upaya promosi dan mencari peluang pasar baru bagi produk Indonesia. Sebagai contoh, KBRI/PTRI Wina melakukan promosi produk kopi Indonesia di *Vienna International Center (VIC)* pada tanggal 2 September 2022. Ketertarikan tinggi pada kopi Indonesia dapat dilihat pada tingginya tingkat kehadiran pengunjung di *stand* Indonesia untuk mencicipi kekhasan cita rasa kopi Indonesia.

Sebagai catatan, format promosi di VIC yang bertepatan dengan perayaan acara *ASEAN Day* memang tidak memberikan kesempatan untuk terjadinya transaksi dalam jumlah besar. Meskipun demikian, KBRI berkomitmen untuk terus melakukan berbagai kegiatan promosi, guna mendorong peningkatan *branding* kopi Indonesia di Austria sebagai kopi berkualitas tinggi serta guna mendorong peningkatan ekspor produk kopi Indonesia di Austria.



Foto III.1

Promosi Kopi di *Vienna International Center (VIC)*, 2 September 2022

Capaian jumlah komitmen perdagangan dengan negara akreditasi dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini. Terlihat bahwa target komitmen perdagangan tahun 2022 telah tercapai 2 (dua) buah dari target awal sebanyak 1 (satu) buah komitmen atau 200% dari target.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi komitmen perdagangan 200% telah melebihi target 90% sehingga mencapai nilai efektifitas 120% (melampaui batas toleransi).

		Bobot	Realisasi Sub IKU 2022	Capaian IKU 2022	Realisasi IKU 2022
IKU 1	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Wina				
Sub IKU 1	Jumlah komitmen perdagangan dengan negara akreditasi KRI Wina	70%	2	200%	120% (melampaui batas toleransi)

Tabel III. 4 Realisasi jumlah komitmen

Adapun realisasi IKU capaian jumlah komitmen perdagangan dengan negara akreditasi KRI Wina adalah sebagai berikut:

IKU S.1.1	Informasi Kinerja	2022
Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Wina	Jumlah komitmen perdagangan dengan negara akreditasi KRI Wina	2
	Realisasi	2
	Target	1
	Capaian	120%

Tabel III. 5 Nilai capaian realisasi jumlah komitmen

SUB IKU 2: Nilai Perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Wina

Pada bagian ini akan dijelaskan realisasi nilai perdagangan Indonesia dengan negara akreditasi, yaitu Austria dan Slovenia, selama tahun 2022. Adapun jumlah nilai perdagangan total akan dilihat secara kumulatif dari data perdagangan Austria dan Slovenia.

Berdasarkan data Kemendag RI, nilai perdagangan Indonesia dengan Austria untuk bulan Januari sampai dengan November 2022 adalah sebesar USD 391.700.000. Adapun nilai perdagangan dengan Slovenia pada tahun 2022 mencapai USD 188.600.000.¹ Dengan demikian, nilai total perdagangan dengan kedua negara akreditasi pada tahun 2022 adalah sebesar USD 580.300.000.

¹ Data perdagangan dengan Austria dan Slovenia dapat diunduh dari laman: <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/neraca-perdagangan-dengan-mitra-dagang>

Realisasi nilai perdagangan dapat dijabarkan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

		Bobot	Realisasi Sub IKU 2022	Capaian IKU 2022	Realisasi IKU 2022
IKU 1	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Wina				
Sub IKU 2	Nilai perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Wina	30%	USD 580.300.000	207,25%	120% (melampaui batas toleransi)

Tabel III.6 realisasi nilai perdagangan

Adapun IKU capaian nilai perdagangan dengan kedua negara secara kumulatif adalah sebagai berikut:

IKU S.1.1	Informasi Kinerja	2022
Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Wina	Sub IKU 2 nilai perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Wina	
	Realisasi	USD 580.300.000
	Target	USD 200.000.000
	Capaian	120% (melampaui batas toleransi)

Tabel III.7 Capaian Kinerja IKU S.1.1

Nilai Perdagangan dengan Austria dan Slovenia

a. Nilai Perdagangan dengan Austria

Nilai perdagangan tahun 2022 dengan Austria naik dibanding periode yang sama tahun 2021, yaitu sebesar 18,77% dan melebihi nilai target perdagangan sebesar USD 200 juta, atau melebihi 195% dari target.

Kenaikan ini dihitung berdasarkan rumus yang telah ditetapkan dalam pedoman IKU, yaitu nilai perdagangan tahun ini dikurangi nilai perdagangan tahun sebelumnya dibagi nilai perdagangan tahun sebelumnya, yaitu untuk periode Januari-November 2021 sebesar USD 329,8 juta. Dibandingkan target kenaikan nilai perdagangan sebesar 4%, angka kenaikan akhir tersebut naik jauh lebih besar.

**NERACA PERDAGANGAN
INDONESIA dengan AUSTRIA**

*) Nilai : Juta US\$

AUSTRIA Unduh

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Trend (%) 17-21	Jan-Nov		Perub. (%) 22/21
							2021	2022	
TOTAL PERDAGANGAN	368.3	407.6	284.9	326.3	397.9	-0.68	329.8	391.7	18.77
MIGAS	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	45.73	0.0	0.0	-70.81
NON MIGAS	368.3	407.7	284.9	326.3	397.8	-0.68	329.7	391.6	18.78
EKSPOR	26.3	25.8	29.7	37.3	40.3	13.01	34.4	50.2	45.96
MIGAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
NON MIGAS	26.3	25.8	29.7	37.3	40.3	13.01	34.4	50.2	45.96
IMPOR	342.0	382.0	255.2	289.1	357.6	-1.88	295.4	341.5	15.61
MIGAS	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	45.73	0.0	0.0	-70.81
NON MIGAS	342.0	382.0	255.1	289.1	357.6	-1.88	295.4	341.5	15.61
NERACA PERDAGANGAN	-315.7	-356.2	-225.4	-251.8	-317.3	3.31	-261.0	-291.3	-11.61
MIGAS	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-45.73	0.0	0.0	70.81
NON MIGAS	-315.7	-356.2	-225.4	-251.8	-317.3	3.31	-261.0	-291.3	-11.62

Gambar III.1

b. Nilai perdagangan dengan Slovenia

Pada periode tahun 2022, nilai perdagangan dengan Slovenia mengalami peningkatan menjadi sebesar USD 188.600.000 juta. Nilai ini lebih tinggi dari nilai perdagangan tahun 2021 sebesar USD 131.100.000. Bila dibandingkan maka neraca perdagangan dengan Slovenia mengalami kenaikan mencapai 14,38%.

Berikut data neraca perdagangan dengan Slovenia yang diperoleh dari data Kemendag RI²:

**NERACA PERDAGANGAN
INDONESIA dengan SLOVENIA**

*) Nilai : Juta US\$

SLOVENIA Unduh

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Trend (%) 17-21	Jan-Nov		Perub. (%) 22/21
							2021	2022	
TOTAL PERDAGANGAN	120.7	121.9	127.4	108.5	152.3	3.56	131.1	188.6	43.80
MIGAS	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
NON MIGAS	120.4	121.9	127.4	108.5	152.3	3.60	131.1	188.6	43.80
EKSPOR	107.3	104.6	105.9	80.7	128.3	0.97	109.1	157.2	44.03
MIGAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
NON MIGAS	107.3	104.6	105.9	80.7	128.3	0.97	109.1	157.2	44.03
IMPOR	13.3	17.3	21.5	27.9	24.0	18.01	22.0	31.4	42.63
MIGAS	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
NON MIGAS	13.1	17.3	21.5	27.9	24.0	18.43	22.0	31.4	42.63
NERACA PERDAGANGAN	94.0	87.4	84.4	52.8	104.3	-2.92	87.2	125.8	44.39
MIGAS	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
NON MIGAS	94.2	87.4	84.4	52.8	104.3	-2.97	87.2	125.8	44.39

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan

Gambar III.2

² Data diunduh dari laman: <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/neraca-perdagangan-dengan-mitra-dagang>

Analisis (termasuk kendala, solusi dan proyeksi ke depan)

Meskipun capaian IKU S.1.1 ini cukup tinggi, namun terdapat **kendala dan tantangan** dalam menjalankan kerja sama bilateral di bidang perdagangan, antara lain, sering kali pembahasan kerja sama bilateral membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak stabilnya kondisi ekonomi negara akreditasi akibat krisis inflasi ekonomi dan krisis politik di Eropa.

Adapun **upaya solusi** untuk mengatasi kendala dan tantangan tersebut, KBRI / PTRI Wina terus berupaya untuk mempercepat proses pembahasan yaitu dengan mempercepat koordinasi bersama instansi teknis, khususnya Kemenkeu dan Bappenas agar proses pembahasan berjalan lancar. Koordinasi juga dilakukan secara erat dengan *counter-part* di negara akreditasi.

Kinerja perdagangan bilateral RI dengan negara akreditasi, yakni Austria dan Slovenia terbilang cukup baik pada tahun 2022. Alasan tercapainya target kinerja perdagangan dengan negara akreditasi tersebut tidak lepas dari mulai bergeliatnya kembali perdagangan internasional di masa pandemi COVID-19. Selain itu, alasan lain yang mendukung tercapainya target tersebut terkait dengan upaya konsisten KBRI / PTRI Wina untuk terlibat aktif dalam acara promosi di negara akreditasi yang memiliki nilai strategis bagi produk Indonesia serta membina hubungan baik dengan *Austrian Economic Chamber* (atau disebut WKO).

Diproyeksikan ke depan perdagangan dengan kedua negara akreditasi masih akan tetap bayang-bayangi ketidakpastian ekonomi global, khususnya ekonomi Eropa yang tidak stabil akibat konflik Ukraina – Rusia, serta belum selesainya Pandemi COVID-19. Oleh karena itu, diplomasi ekonomi KBRI/PTRI Wina akan terus ditingkatkan, antara lain melalui promosi, baik secara fisik dan *virtual*, termasuk *via* media sosial, mempercepat koordinasi dengan instansi terkait di negara akreditasi dan instansi pusat serta membangun *network* dengan *stakeholders* lainnya.

**IKU
S.1.2**

Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI Wina

IKU S.1.2 sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Kemenlu dan Perwakilan RI serta tujuan untuk melaksanakan amanat Presiden RI dalam RPJMN 2020-2024, yakni kinerja diplomasi yang perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang investasi agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air. IKU ini secara spesifik mengukur *value* yang diperoleh Indonesia dari upaya diplomasi ekonomi untuk investasi.

Adapun tabel informasi rincian target kinerja KBRI Wina untuk IKU S.1.2 adalah sebagai berikut:

	IKU/Sub IKU	Bobot	Target Sub IKU 2022	Proyeksi Realisasi 2022	Proyeksi Capaian 2022	Target IKU 2022
IKU 2	Tingkat Efektifitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI Wina	33,33%				90%
Sub IKU 1	Jumlah komitmen investasi dengan negara akreditasi KBRI Wina	70%	1	1	100%	70%
Sub IKU 2	Nilai investasi dengan negara akreditasi KBRI Wina	30%	USD 50.000.000	USD 50.000.000	100%	30%

Tabel III.8

Efektifitas diplomasi ekonomi KBRI Wina di sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI Wina untuk tahun 2022 dapat dinilai cukup baik, bahkan melebihi target. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian yang mengalami *rebound* baik di Austria dan Slovenia akibat pembukaan dan pelonggaran restriksi pandemi.

KBRI/PTRI Wina mencatat bahwa pada tahun 2022, nilai investasi total dengan Austria dan Slovenia berjumlah USD 71.112.000.

Berdasarkan data BKPM RI, realisasi investasi Austria di Indonesia pada tahun 2022 adalah sebesar USD 67.399.000. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari realisasi investasi Austria pada tahun 2021 senilai USD 63.349.000. Jika dibandingkan, maka **realisasi investasi Austria di Indonesia pada tahun 2022 naik lebih tinggi sebesar 72%** dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, berdasarkan data BKPM RI, peningkatan terjadi untuk realisasi komitmen investasi Slovenia di Indonesia pada tahun 2022 berada di angka USD 3.713.000 dari sebelumnya pada tahun 2011 berjumlah USD 53.800. Dengan demikian, terjadi **kenaikan signifikan angka investasi Slovenia ke Indonesia yang mencapai lebih dari 600%** dibanding tahun sebelumnya.

Adapun realisasi IKU S.1. 2 adalah sebagai berikut:

		Bobot	Realisasi Sub IKU 2022	Capaian IKU 2022	Realisasi IKU 2022
IKU 2	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI Wina				
Sub IKU 1	Jumlah komitmen investasi dengan negara akreditasi KBRI Wina	70%	2	200%	120% (melampaui batas toleransi)
Sub IKU 2	Nilai investasi dengan negara akreditasi KBRI Wina	30%	USD 71.112.000	142,2%	120% (melampaui batas toleransi)

Tabel III.9 Realisasi IKU S.1.2

Dengan demikian tingkat efektifitas IKU S.1.2 dapat dilihat sebagai berikut:

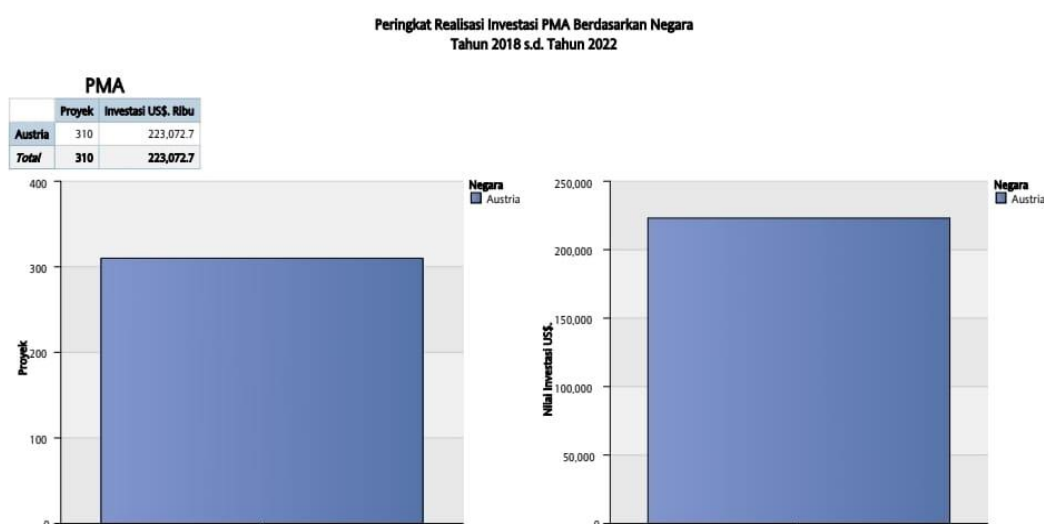
IKU S.1.2	Informasi Kinerja	2022
Tingkat Efektifitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI Wina	Sub IKU 1 Jumlah komitmen investasi dengan negara akreditasi KBRI Wina	2
	Sub IKU 2 Nilai investasi dengan negara akreditasi KBRI Wina	USD 71.112.000
	Target	90%
	Capaian	120% (melampaui batas nilai toleransi)

Tabel III.10 efektifitas IKU S.1.2

Capaian Kinerja

SUB IKU 1 : Jumlah Komitmen Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI Wina

Menurut menurut data BKPM RI,³ pada periode 2018-2022 investasi total sejumlah USD 223,072 juta terbagi atas 310 proyek. Investasi utama Austria di Indonesia adalah di bidang serat tekstil (rayon fiber); mesin dan elektronika (*hydro power*, jembatan); industri barang karet dan barang plastik; industri logam dasar, barang logam, serta industri lainnya seperti perdagangan dan reparasi, hotel dan restoran, pengangkutan, gudang dan komunikasi serta sektor jasa lainnya.



Gambar III.3

³ Data diunduh dari Laman: https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik

Pada tahun 2022, telah dicapai 2 (dua) dokumen komitmen Investasi, yaitu:

1. *Memorandum of Understanding* antara PT Pupuk Indonesia dengan Jordan Phosphate Mines Co. PLC untuk kerja sama stabilisasi kesediaan (*supply*) pupuk di Indonesia. Penandatanganan dilakukan pada tanggal 31 Mei 2022 saat Kunjungan Menteri Pertanian RI ke Wina, Austria; dan
2. *Memorandum of Understanding* antara Austria GmbH dengan Ditjen Binalavotas Kemnaker RI terkait Pengembangan Kerja Sama Pemagangan ditandatangani pada tanggal 10 November 2022.

Sesuai data KBRI/PTRI, beberapa perusahaan Austria yang telah melakukan investasi di Indonesia antara lain Lenzing AG (tekstil), Andritz-Hydro (PLTA), Waagner Biro (baja dan teknik mesin), Böhler Welding Group (*welding*), VA-Technologie (metalurgi dan pembangkit listrik), dan VAMED (sektor kesehatan).

IKU S.1.2	Informasi Kinerja	2022
Efektifitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI Wina	Sub IKU 1 Jumlah komitmen investasi dengan negara akreditasi KBRI Wina	
	Realisasi	2
	Target	1
	Capaian	120% (melampaui batas nilai toleransi)

Tabel III.11

Sub IKU 2 : Nilai Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI Wina

Di bawah ini akan dijelaskan kinerja nilai investasi Indonesia dengan negara akreditasi, yaitu Austria dan Slovenia.

a. Nilai Investasi Austria di Indonesia

Berdasarkan data BKPM RI, realisasi investasi Austria di Indonesia pada tahun 2022 adalah sebesar USD 67.399.000 juta. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka **realisasi investasi Austria di Indonesia pada tahun 2022 naik** sebesar 72% dibandingkan tahun 2021. Adapun realisasi nilai investasi Austria di Indonesia pada tahun 2022 dapat terlihat dalam tabel di bawah ini:

Data Investasi Austria di Indonesia

(dalam ribu dollar AS)

	2018		2019		2020		2021		2022	
	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)
AUSTRIA	47	71,406.7	68	19,696.7	89	1,221.4	54	63.349	46	67.399

Gambar III.4

*Sumber: BKPM

b. Nilai Investasi Slovenia di Indonesia

Sementara itu, berdasarkan data BKPM RI, peningkatan terjadi untuk realisasi nilai investasi Slovenia di Indonesia pada tahun 2022 yang berada di angka USD 3.713.000. Jumlah ini **jauh lebih tinggi** dari nilai investasi tahun 2011 yang berada pada angka USD 53.800. Dengan demikian, **terjadi kenaikan signifikan nilai investasi Slovenia ke Indonesia** yang mencapai lebih dari 600% dibanding tahun sebelumnya.

Sebagai ilustrasi, berikut tabel nilai investasi Slovenia di Indonesia untuk periode 2018 s.d. 2022:

Data Investasi Slovenia di Indonesia
(dalam ribu dollar AS)

	2018		2019		2020		2021		2022	
	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)
SLOVENIA	3	20,05	12	942,4	22	198,5	13	53,8	17	3,713.1

Gambar III.5

*Sumber: BKPM

c. Bila jumlah nilai investasi Austria dan Slovenia digabung maka akan terlihat capaian diplomasi nilai investasi dengan negara akreditasi berdasarkan IKU S.1.2 sebagai berikut:

IKU S.1.2	Informasi Kinerja	2022
Tingkat Efektifitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan negara akreditasi	Sub IKU 2 Nilai investasi dengan negara akreditasi KBRI Wina	USD 71.112.000
	Target	USD 50.000.000
	Capaian	142,2%
	Toleransi capaian	120%

Tabel III.12

Analisis (termasuk kendala, solusi dan poyeksi ke depan)

Untuk melakukan analisa, diperlukan gambaran komprehensif nilai investasi dengan kedua negara akreditasi selama 4 (empat) tahun terakhir. Secara historis, selama empat tahun ini, investasi Austria dan Slovenia di Indonesia memang mengalami fluktuasi yang sangat dinamis sebagaimana dapat dilihat di tabel berikut:

Data Realisasi Investasi Austria di Indonesia (dalam ribu dollar AS)

Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Negara
Tahun 2018 s/d 2022

		2018		2019		2020		2021		2022	
		Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)
Eropa / Europe	Austria / Austria	47	71,406.7	74	19,696.7	89	1,221.4	54	63,348.5	46	67,399.4
	Total Eropa / Europe	47	71,406.7	74	19,696.7	89	1,221.4	54	63,348.5	46	67,399.4
Total		47	71,406.7	74	19,696.7	89	1,221.4	54	63,348.5	46	67,399.4

Gambar III.6

*Sumber: BKPM

Data Realisasi Investasi Slovenia di Indonesia (dalam ribu dollar AS)

Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Negara
Tahun 2018 s/d 2022

		2018		2019		2020		2021		2022	
		Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)
Eropa / Europe	Slovenia / Slovenia	3	20.0	12	942.4	22	198.5	8	55.9	17	3,713.1
	Total Eropa / Europe	3	20.0	12	942.4	22	198.5	8	55.9	17	3,713.1
Total		3	20.0	12	942.4	22	198.5	8	55.9	17	3,713.1

Gambar III.7

*Sumber: BKPM

Dari perspektif capaian kinerja, realisasi investasi Austria ke Indonesia terbilang fluktuatif. Namun demikian, bila dilihat dari kaca mata makro, setiap tahunnya selalu dilakukan realisasi komitmen investasi. Secara konsisten terjadi pelaksanaan proyek dan total investasi yang terus mengalami peningkatan berdasarkan angka total investasi dari periode tahun 2018-2022.

Pada tahun 2022, tidak stabilnya ekonomi global dan inflasi tinggi di Eropa, termasuk negara akreditasi, menjadi **tantangan dan hambatan** dalam mengembangkan diplomasi ekonomi. Pandemi COVID-19, perekonomian global yang rentan akibat konflik Rusia – Ukraina terus memaksa Pemerintah mencari solusi guna mendorong investasi asing ke Indonesia.

Salah satu solusi yang diusulkan adalah mengembangkan kebijakan yang memberikan kemudahan investasi, kepastian usaha dan pemberian informasi secara lengkap mengenai investasi nasional sehingga diharapkan terjadi peningkatan investasi.

Kenaikan investasi dari kedua negara akreditasi menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi tujuan yang menarik untuk investasi, meskipun kondisi perekonomian di Eropa masih fluktuatif akibat tingginya inflasi, harga energi dan krisis di Ukraina. **Tantangan lain** dalam menarik investor adalah adanya preferensi investor Austria yang masih lebih mengutamakan untuk menanamkan modalnya di negara tetangga, khususnya di situasi pandemi COVID-19. Saat ini Austria tercatat sebagai investor asing terbesar di Slovenia, dengan proporsi 25% dari total investasi asing di Slovenia.

Sebagai upaya solusi, KBRI / PTRI Wina akan terus berupaya mempromosikan kemudahan investasi di Indonesia kepada *stakeholders* terkait di Austria dan Slovenia dan mempererat koordinasi dengan instansi terkait di pusat serta pihak Austria dan Slovenia, termasuk dengan konsul kehormatan yang dimiliki Pemri.

Apabila tren positif target kinerja investasi tersebut dapat dipertahankan, maka target rencana strategis 2020 – 2024 KBRI / PTRI Wina akan dapat tercapai. Namun demikian, sebagai proyeksi ke depan perlu diantisipasi belum pulihnya kondisi ekonomi Eropa yang dipicu konflik Ukraina – Rusia dan juga pandemi COVID-19. Oleh karena itu, berbagai solusi yang sudah dilakukan selama tahun 2022 tetap perlu terus diterapkan ke depan secara konsisten dan lebih intensif.

**IKU
S.1.3**

Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dari Negara Akreditasi KBRI Wina

Capaian Kinerja

Salah satu *output* dari diplomasi ekonomi yang dilakukan adalah promosi pariwisata. Efektivitas penyelenggaraan promosi tersebut dihitung dengan mengukur minat wisatawan mancanegara untuk melakukan kunjungan wisata ke Indonesia setelah mengikuti atau melihat materi promosi pariwisata dan budaya yang diselenggarakan oleh KBRI/PTRI Wina. Level ekspektasi diukur melalui survei yang mengindikasikan responden sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa promosi Indonesia telah berhasil meningkatkan minat untuk berkunjung ke Indonesia. Tingkat potensi kunjungan wisatawan dihitung berdasarkan jumlah responden yang menyatakan "setuju" dan "sangat setuju" bahwa promosi Indonesia telah berhasil meningkatkan minat untuk berkunjung ke Indonesia.

Adapun target IKU Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di sektor Pariwisata dari Negara Akreditasi KBRI Wina dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

	IKU/Sub IKU	Bobot	Target IKU 2022	Proyeksi Realisasi 2022	Proyeksi capaian 2022	Target IKU 2022
IKU-3	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Wina	33,33%				90%
Sub IKU 1	Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI Wina ke Indonesia	70%	45,82%	45,82%	100%	70%
Sub IKU 2	Jumlah wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI Wina ke Indonesia	30%	1750	1750	100%	30%

Tabel III.13 Target IKU

Adapun realisasi capaian tahun 2022 adalah sebagai berikut:

	IKU/Sub IKU	Bobot	Realisasi Sub IKU 2022	Capaian Sub IKU 2022	Realisasi IKU 2022
IKU-3	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Wina	33,33%			
Sub IKU 1	Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI Wina ke Indonesia	70%	34/58	58,62%	58,62%
Sub IKU 2	Jumlah wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI Wina ke Indonesia	30%	13.527	772,9%	120% (melampaui batas nilai toleransi)

Tabel III.14 Target IKU

Capaian IKU efektivitas diplomasi ekonomi KBRI Wina di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Wina untuk tahun 2022 dapat dinilai cukup baik karena jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia melampaui target. Tercatat sebanyak 13.527 orang dari Austria dan Slovenia yang melakukan kunjungan ke Indonesia. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan 772,9% dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian nilai capaian IKU mencapai 120% dan melampaui nilai toleransi.

Peningkatan jumlah wisatawan tersebut tidak diimbangi dengan tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara. Capaian hanya memperoleh nilai 58,62%. Dengan demikian, kinerja tingkat potensi kunjungan wisatawan tidak mencapai target.

Adapun efektivitas IKU S.1.3 dapat dijabarkan sebagai berikut:

IKU S.1.3	Informasi Kinerja	2022
Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Wina	Sub IKU 1 Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI Wina ke Indonesia	58,62%
	Sub IKU 2 Jumlah wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI Wina ke Indonesia	120%
	Target	90%
	Capaian	85,59%

Tabel III.15

Sub IKU 1 Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI Wina ke Indonesia

Pada SUB IKU 1 dengan realisasi tahun 2022 mencapai sebesar 58,62%. Angka tersebut bersumber dari survei Citra Indonesia yang dilakukan KBRI/PTRI Wina sepanjang tahun 2022

yang telah diverifikasi. Dari 58 orang responden, 34 di antaranya pernah menghadiri acara promosi ataupun melihat materi promosi pariwisata Indonesia. Dari 34 responden tersebut hanya 24 responden yang menyatakan ingin berkunjung ke Indonesia. Capai 58,62 % tersebut masih jauh dari target 70%.

Adapun **kendala dan tantangan** yang dihadapi adalah situasi ekonomi akibat perang di Ukraina yang turut menghambat rencana kegiatan promosi pariwisata wisatawan negara akreditasi. Selain itu, pandemi COVID-19 berdampak terhadap masih rendahnya keyakinan masyarakat Austria dan Slovenia untuk berwisata ke Indonesia selama tahun 2022.

Sebagai **upaya solusi** beberapa langkah dilakukan antara lain menggiatkan kegiatan promosi di berbagai *event*, termasuk kegiatan internasional di kantor PBB, *outreach* masyarakat umum dan lain-lain. Selain itu promosi melalui media sosial dan media *virtual* juga lebih digiatkan.

Diproyeksikan ke depan, kondisi perekonomian Eropa dan Pandemi COVID-19 masih akan tetap mempengaruhi animo wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Ke depan, KBRI/PTRI Wina akan lebih menggiatkan promosi dan diseminasi informasi mengenai langkah-langkah kebijakan Pemerintah dalam menekan COVID-19, perkembangan angka COVID-19 nasional yang terus menurun dan tingginya tingkat vaksinasi penduduk Indonesia.

Sub IKU 2 Jumlah wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI Wina ke Indonesia

a. Wisatawan Austria

Berdasarkan data BPS RI, jumlah wisatawan Austria yang berkunjung ke Indonesia selama tahun 2022 mencapai 12.188 orang. Jumlah ini meningkat cukup drastis dibandingkan jumlah wisatawan pada 2021 sebanyak 2.103 orang. Angka ini menunjukkan **kenaikan signifikan** sebesar 476,2% wisman Austria dibanding tahun sebelumnya.

b. Wisatawan Slovenia

Sementara itu, jumlah wisatawan dari Slovenia juga menunjukkan peningkatan menjadi 1.339 orang di tahun 2022. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 423 orang. Dengan demikian terjadi **kenaikan signifikan** sekitar 316,5% dibandingkan tahun sebelumnya.

c. Total jumlah wisatawan

Apabila dilihat secara kumulatif maka realisasi jumlah wisatawan Austria dan Slovenia ke Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

IKU S.1.3	Informasi Kinerja	2022
Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Wina	IKU 2 Jumlah wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI Wina ke Indonesia	
	Realisasi	13.527
	Target	1.750
	Capaian	772,9%
	Toleransi capaian	120% (melampaui batas nilai toleransi)

Tabel III.16 capaian IKU S.1.3

Secara umum maka untuk realisasi IKU S.1.3 dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

IKU S.1.3	Informasi Kinerja	2022
Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Wina	IKU 1 Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI Wina ke Indonesia	58,62%
	IKU 2 Jumlah wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI Wina ke Indonesia	120%
	Target	90%
	Capaian	85,59%

Tabel III.17

Analisis (termasuk kendala, solusi dan proyeksi ke depan)

Secara umum, jumlah wisatawan dari Austria dan Slovenia ke Indonesia relatif besar. Namun terdapat beberapa **hambatan dan tantangan** dalam upaya meningkatkan angka kunjungan wisata ke Indonesia, antara lain melemahnya ekonomi negara akreditasi akibat krisis ekonomi (tingginya inflasi) yang dipicu konflik Ukraina – Rusia serta efek pandemi COVID-19. Hal ini mengakibatkan jumlah wisatawan dari Austria dan Slovenia yang berkunjung ke Indonesia belum kembali ke jumlah normal sebelum pandemi.

Pada tahun 2022, pemulihan pasca pandemi cukup terlihat dampaknya, khususnya dengan pelanggaran kebijakan terkait penanganan COVID-19 yang mempermudah mobilitas perorangan. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan dari Austria dan Slovenia ke Indonesia.

Jumlah Wisatawan dari Negara Akreditasi ke Indonesia

Negara	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Austria	29.492	28.476	4.858	2.103	12.118
Slovenia	4.472	4.747	986	423	1.339

Tabel III.18

Dari perspektif capaian kinerja, realisasi jumlah wisatawan dari negara akreditasi ke Indonesia juga menunjukkan peningkatan pasca pandemi.

Guna menjaga animo publik Austria dan Slovenia agar tetap berkeinginan berwisata ke Indonesia dan mengoptimalkan potensi kunjungan wisatawan, sebagai **langkah solusi**, KBRI/PTRI Wina sudah dan akan terus melakukan kegiatan promosi wisata dan budaya. Sebagai contoh, KBRI/PTRI Wina konsisten melakukan upaya promosi pariwisata Indonesia, termasuk dengan pemasangan iklan pariwisata dan destinasi wisata Indonesia pada papan reklame di 11 (sebelas) lokasi strategis di Wina yang dilakukan pada Januari 2022. Papan reklame tersebut sehari-harinya banyak dilalui oleh warga setempat dan masyarakat Wina secara umum sehingga diharapkan promosi terlaksana secara efektif dan efisien. Selain itu, promosi melalui media sosial juga terus digiatkan.



Foto III.2

Pemasangan papan reklame destinasi wisata Indonesia pada titik-titik strategis di Wina

Diproyeksikan ke depan, kondisi ekonomi berbagai negara Eropa dan pandemi COVID-19 masih akan berpengaruh signifikan pada peningkatan wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. KBRI/PTRI Wina akan terus menggiatkan promosi dan diseminasi informasi mengenai langkah-langkah kebijakan Pemerintah dalam menekan COVID-19 dan perkembangan angka COVID-19 nasional yang terus menurun.

S.2 KEPEMIMPINAN DAN PERAN INDONESIA YANG BERPENGARUH DI ORGANISASI INTERNASIONAL

Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh dalam kerja sama internasional merupakan amanat dari Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 pada Sasaran Utama Bidang Politik Luar Negeri. Guna mencapai RPJMN tersebut ditetapkan beberapa IKU seperti di bawah ini:

Pada IKU ini, KBRI/PTRI Wina terus mendorong kepemimpinan Indonesia di dalam berbagai pertemuan baik sebagai *President*, *Vice Chair*, *Task Leader*, *Rapporteur* dari pertemuan internasional untuk mempromosikan agenda nasional dan berkontribusi pada berbagai isu global dalam bidang politik, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

**IKU
S.2.1**

Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Kerja Sama Multilateral

Capaian Kinerja

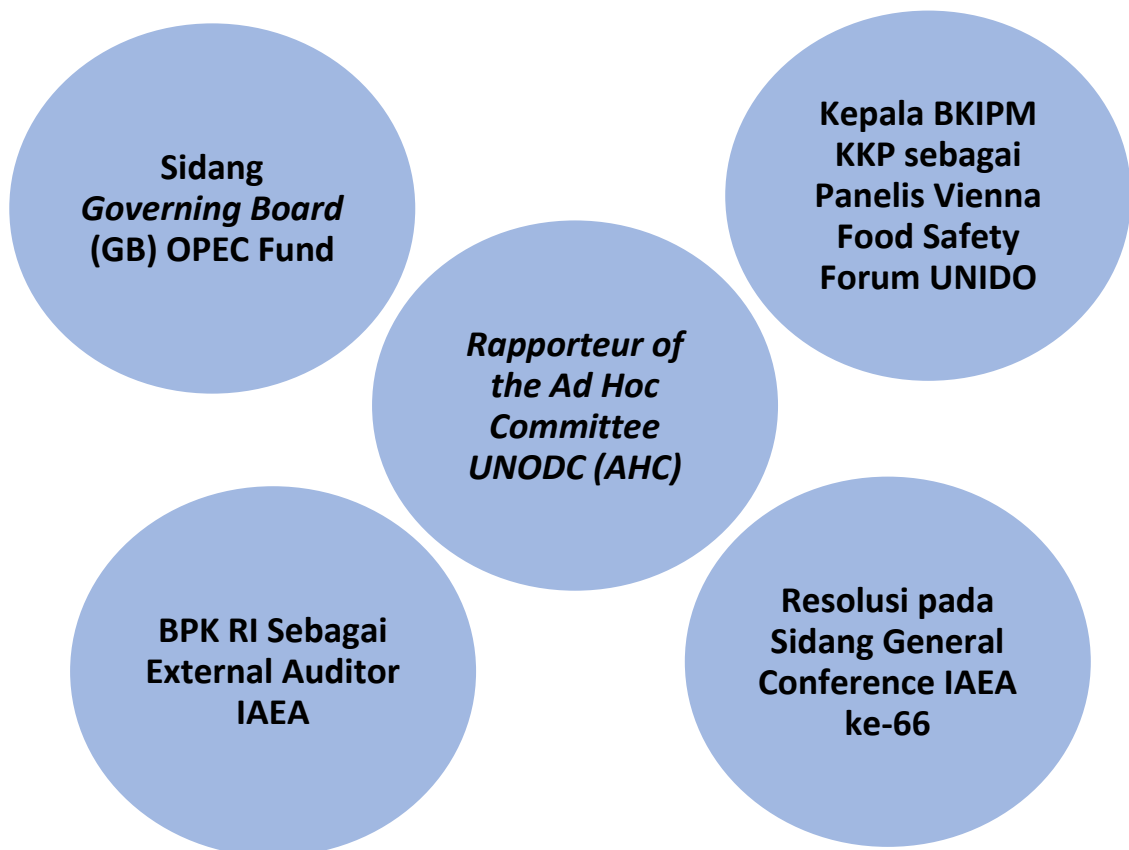
Pencapaian sasaran strategis KBRI/PTRI Wina pada “Kepemimpinan Indonesia yang Berpengaruh di Organisasi internasional” diukur salah satunya dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Multilateral”. Penilaian IKU “Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Multilateral” didasarkan atas jumlah pertemuan yang dipimpin oleh Indonesia di forum multilateral serta jumlah pencalonan yang berhasil, dibandingkan dengan jumlah pertemuan yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia serta jumlah pencalonan yang diusulkan.

Pada awal tahun 2022, target KBRI/PTRI Wina untuk IKU “Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Multilateral” adalah **96%**. Pada akhir tahun 2022, KBRI / PTRI Wina berhasil meraih realisasi sebesar **100%**. Dengan demikian capaian yang diraih adalah **104,17%**.

Gambar III.6

Pada tahun 2022, KBRI / PTRI Wina berhasil menunjukkan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral dengan mendapatkan 5 (lima) posisi penting pada 4 (empat) forum internasional, yaitu OPEC Fund, UNIDO, UNODC dan IAEA.

WUJUD KEPEMIMPINAN KBRI/PTRI WINA PADA FORUM MULTILATERAL TAHUN 2022



Gambar III.7

Adapun capaian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sidang *Governing Board* (GB) OPEC Fund

Pertemuan ke-182 *Governing Board* (GB) OPEC Fund dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2022 di Wina, Austria dan Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, Bapak Isa Rachmatarwata bertindak sebagai *Governor of Indonesia*.



Foto III.3

Dirjen Anggaran sebagai Governor RI Menghadiri pertemuan ke-182 *Governing Board* (GB) OPEC Fund



Foto III.4

Pertemuan *Governing Board* (GB) OPEC Fund, 15 Desember 2022, di Wina, Austria

Pertemuan menyepakati antara lain anggaran administratif 2023, *Business Plan 2023-2025*, *Capital Expenditure Budget 2023-2025* dan mencatat implementasi *Strategic Framework 2030* yang telah memasuki tahap kedua.

Pertemuan juga membahas mengenai pembentukan *Debt Relief Trust Fund* dan *OPEC Fund Tribunal*. Indonesia berkontribusi pada agenda pembentukan dan pengangkatan anggota Dewan Tribunal OPEC Fund, serta inisiatif proses terkait evaluasi efektifitas dari *Governing Board*, melalui mandat kepada Komite Etika OPEC Fund.

2. Kepala BKIPM KKP sebagai Pembicara Panelis Utama pada acara UNIDO

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi pembicara pada *Vienna Food Safety Forum* tanggal 4 Oktober 2022 pada *Plenary* sesi ke-4 dengan tema: *Cost and Benefits of Remote Audit and Verification in Regulatory Framework*. Hadir juga pembicara dari Komisi Uni Eropa, Badan Perikanan Kamboja, Kementerian Agrrikultur dan Ternak Brazil serta Analisis OECD.



Foto III.5

Kepala BKIPM KKP menjadi Pembicara pada *Vienna Food Safety Forum of UNIDO*, Oktober 2022

Konferensi *Vienna Food Safety Forum* (VFSF) diadakan pada tanggal 3-5 Oktober 2022 di *Vienna International Center* (VIC). Penyelenggara VFSF adalah UNIDO bekerja sama dengan Pemerintah Australia dan Lembaga *Standards and Trade Development Facility* (STDF). Selain itu, Kepala BKIPM melakukan pertemuan dengan Direktur UNIDO untuk Kerja Sama Teknis yaitu Mr. Steffen Kaeser dan *Project Manager*, Mr Nima Bahramalian, pada tanggal 4 Oktober 2022 di VIC. Pertemuan membahas pengembangan kerja sama teknis UNIDO dengan BKIPM, khususnya penyelenggaraan pelatihan terkait Prosedur Inspeksi Jarak Jauh serta pelatihan bagi pemeriksa (inspektur) perikanan BKIPM-KKP.

3. *Rapporteur of the Ad Hoc Committee to Elaborate a Comprehensive International Convention on Countering the Use of Information and Communications Technologies for Criminal Purposes, UNODC (AHC)*

Indonesia yang diwakili oleh Minister Counsellor / Koordinator Fungsi Politik Multilateral KBRI / PTRI Wina, Arsi Dwinugra FIRDAUSY, *Rapporteur* pada Komite *Ad Hoc*. Dalam kapasitas tersebut, Indonesia membantu Ketua AHC pada 3 sesi negosiasi yang berlangsung yaitu Sesi negosiasi pertama pada 28 Februari – 11 Maret 2022, Sesi negosiasi Kedua pada 30 Mei – 10 Juni 2022, dan Sesi negosiasi ketiga pada 29 Agustus – 9 September 2022. Sebagai *Rapporteur* pada Komite *Ad Hoc* tersebut Indonesia telah memainkan peran kepemimpinannya yang berkontribusi pada proses penyusunan standar internasional mengenai pencegahan dan penanganan kejahatan siber.



Foto III.6

Koordinator Fungsi Politik Multilateral berperan sebagai *Rapporteur* pada *Ad Hoc Committee*, UNODC

4. *BPK RI sebagai External Auditor IAEA*



Foto III.7

BPK RI dipercaya menjadi *External Auditor* Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) periode 2017-2022. Dalam pertemuan *Programme and Budget Committee* IAEA ke-319 tanggal 9-10 Mei 2022, Ketua BPK RI – Isma Yatun menyampaikan laporan hasil audit tim BPK RI terhadap anggaran dan kinerja IAEA selama periode tahun anggaran 2021. Berdasarkan hasil audit yang dipaparkan dalam pertemuan PBC ke-319, BPK RI berikan rekomendasi terhadap pengelolaan anggaran dan kinerja IAEA yang secara umum diberikan predikat opini wajar tanpa pengecualian. Kiprah BPK RI sebagai *external auditor* IAEA ini menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam turut mengawal pengelolaan anggaran IAEA yang sesuai dengan *the International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) serta manajemen kinerja IAEA yang sesuai dengan mandatnya, termasuk dalam mendorong pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan damai (*peaceful uses of nuclear technology*).

5. Sidang *General Conference* IAEA ke-66

Indonesia menjadi koordinator penyusunan rancangan resolusi *Strengthening the Agency's Activities Related to Nuclear Science, Technology and Applications* dalam rangkaian sidang *General Conference* Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) ke-66 pada tanggal 26 – 30 September 2022.

Resolusi yang penyusunan dan pembahasannya dipimpin oleh Delegasi RI ini mendorong pelaksanaan mandat IAEA dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan damai, khususnya dalam mendukung pencapaian tujuan SDG dalam bidang pangan, melalui pemanfaatan berbagai teknologi nuklir untuk meningkatkan ketahanan pangan, kesehatan ternak hingga keamanan produk pangan. Resolusi ini turut mendorong peningkatan program kerjasama teknis IAEA mulai tahun anggaran 2023 dalam bidang pangan, khususnya dalam rangka mendukung transfer teknologi dan pengembangan kapasitas negara anggota dalam aplikasi teknologi nuklir untuk pangan.



Foto III.8
Kepala BRIN menghadiri pertemuan *General Conference* IAEA ke-66

Dari perspektif capaian kinerja, realisasi IKU “Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Multilateral” oleh KBRI / PTRI Wina terbilang cukup baik khususnya pada dua tahun terakhir sebagaimana terlihat dari tabel di bawah ini:

IKU S.2.1	Informasi Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022
Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Multilateral	Jumlah pertemuan yang dipimpin oleh Indonesia + jumlah pencalonan yang dihasilkan	4	5
	Jumlah pertemuan yang disepakatai untuk dipimpin / diselenggarakan oleh Indonesia + jumlah pencalonan yang diusulkan	4	5
	Realisasi	100%	100%
	Target	84%	96%
	Capaian	104%	104,17%

Tabel III.18

Terjadi kenaikan yang tipis pada efisiensi kinerja tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, namun jumlah capaian kepemimpinan Indonesia lebih besar mengalami kenaikan menjadi 5 buah. Apabila tren positif realisasi IKU “Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Multilateral” dapat dipertahankan, maka target rencana strategis 2020 – 2024 KBRI / PTRI Wina akan dapat tercapai.

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Multilateral	Target: 84 % Realisasi: 100%	Target: 96% Realisasi: 100%	Target: 96 % Realisasi: 104,17%	Target: 96,67 %	Target: 96,67 %

Tabel III.19

Meskipun capaian kinerja sasaran KBRI/PTRI Wina sangat baik, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat **beberapa kendala utama** karena pandemi COVID-19. Pandemi berdampak berubahnya format penyelenggaraan pertemuan yang dilaksanakan secara virtual dan/atau *hybrid*. Dengan adanya kebijakan pembatasan pemerintah setempat akibat Pandemi COVID-19, sejumlah pertemuan harus dijadwal ulang ataupun ditunda hingga tahun 2023. Perubahan dinamika dimaksud juga menyebabkan banyaknya pertemuan yang tidak masuk dalam perencanaan namun tetap harus dihadiri dengan mempertimbangkan aspek kepentingannya bagi Indonesia. Pada pertengahan tahun 2022, secara bertahap restriksi pandemi mulai diangkat dan sebagian besar delegasi juga mulai menghadiri kembali sidang-sidang.

Hal lain yang menjadi kendala adalah adanya kebutuhan anggaran untuk melakukan diplomasi multilateral yang semakin banyak setelah *new normal* dan terdapat kegiatan prioritas yang muncul secara mendadak. Kegiatan yang sifatnya mendadak tersebut menyebabkan sumber daya yang tersedia harus dialihkan. Pemotongan anggaran juga berdampak pada beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk dilakukan pada tahun 2022 tidak sepenuhnya berjalan secara optimal.

Sebagai **upaya untuk mengatasi** kendala tersebut, KBRI/PTRI Wina memanfaatkan teknologi internet untuk memaksimalkan proses negosiasi. Perbaikan sistem jaringan dan koordinasi dengan pusat dan organisasi internasional menjadi salah satu kunci kelancaran proses negosiasi.

Adapun **proyeksi ke depan**, KBRI/PTRI Wina akan terus mendorong upaya kepemimpinan Indonesia dalam negosiasi forum multilateral di Wina dan mengupayakan revisi anggaran untuk kegiatan negosiasi di tahun mendatang, khususnya dalam masa *new normal* pandemik COVID-19.

Dalam berbagai forum multilateral di Austria, KBRI/PTRI Wina telah menyampaikan posisi dan usulan Indonesia terkait dengan isu-isu yang tengah dibahas. Seluruh posisi atau usulan yang disampaikan oleh KBRI/PTRI Wina di forum multilateral tersebut merupakan cerminan kepentingan nasional Indonesia. Semakin banyak posisi yang diterima, dapat disimpulkan bahwa semakin besar pengaruh Indonesia di dalam forum tersebut.

Capaian Kinerja

Berkait dengan IKU “Persentase Prakarsa dan Rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri multilateral”, KBRI/PTRI Wina mencatat bahwa dari target 96% posisi yang disampaikan, sebanyak 100% posisi telah diterima. Berdasarkan angka tersebut, capaian KBRI/PTRI Wina pada tahun 2022 adalah sebesar 104,17%.

IKU S.2.2	Informasi Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022
Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri multilateral	Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang diterima	4	4
	Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan	4	4
	Realisasi	100%	100%
	Target	84%	96%
	Capaian	119%	104,17%

Tabel III.20

Mengenai prakarsa, pada tahun 2022 terdapat 4 (empat) prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diajukan KBRI/PTRI Wina pada pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri multilateral bidang politik dan berhasil diterima di berbagai forum multilateral dengan detail sebagai berikut:

1. Inisiatif pembahasan peran energi nuklir dalam *global clean energy transition*, termasuk melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi reaktor nuklir maju dalam rangkaian pertemuan dalam kerangka keketuaan G20 Indonesia, khususnya pada Pokja *Energy Transition*;
2. Inisiatif pembahasan pengembangan standar regulasi teknologi *Small Modular Reactors (SMR)* dalam pertemuan *1st Nuclear Harmonization and Standardization Initiative Meeting of IAEA* bulan 23-24 Juni 2022;
3. Inisiatif pembahasan penguatan kapasitas penanganan penyakit kanker melalui program *Rays of Hope dalam General Conference of IAEA* pada Sidang Sesi ke-66 di Wina, pada 26 – 30 September 2022; dan
4. Proposal Indonesia mengenai perlunya untuk terus mengkaji aspek legal, teknis, dan prosedural NNP pada Sidang Sesi ke-66 IAEA di Wina, pada 26 – 30 September 2022.

Angka capaian IKU S.2.2 sebesar 104,17 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021, namun hal ini terjadi sebab target yang ditetapkan pada tahun 2022, sebesar 96%, lebih tinggi dari pada target tahun 2021 sebesar 84%.

Analisis (termasuk kendala, respon solusi dan proyeksi mendatang)

Pada tahun 2022, upaya pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendorong Prakarsa dan Rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri Multilateral dihadapkan pada beberapa **tantangan dan hambatan** seiring mulai pulihnya aktivitas organisasi internasional secara bertahap pasca pandemi Covid-19, di mana sebagian besar pertemuan tingkat tinggi yang tertunda pelaksanaannya selama periode pandemi mulai dialihkan pelaksanaannya pada periode tahun 2022, sehingga menyebabkan padatnya agenda kegiatan pertemuan tingkat tinggi khususnya pada semester ke-2 serta diperlukan koordinasi intensif dengan instansi penjurur pada tingkat nasional untuk optimalisasi partisipasi Delegasi RI serta optimalisasi upaya dorongan prakarsa dan rekomendasi Indonesia dalam pertemuan.

Hal ini juga terpengaruh oleh belum berubahnya postur anggaran KBRI/PTRI Wina pasca pandemi, sementara frekwensi pertemuan khususnya yang melibatkan kehadiran fisik delegasi pusat semakin meningkat. Hal ini menyebabkan tantangan dari segi alokasi sumberdaya baik SDM, pembiayaan fasilitasi pelayanan delegasi dalam rangkaian pertemuan, maupun penyelenggaraan aktivitas promosi dalam rangka nominasi keketuaan Indonesia di berbagai forum internasional.

Sebagai **respon solusi** terhadap tantangan dan kendala ini, KBRI/PTRI Wina mengintensifkan upaya negosiasi dan pendekatan baik pada berbagai kerangka pertemuan, baik yang bersifat informal maupun pertemuan teknis persiapan pertemuan tingkat tinggi, serta pelibatan pemangku kepentingan nasional dalam pertemuan-pertemuan *hybrid* yang memungkinkan upaya negosiasi secara langsung oleh delegasi pusat.

Dari aspek geopolitis, konflik Ukraina dan Rusia mempengaruhi pembahasan pada sidang di berbagai organisasi internasional yang menyebabkan fokus pembahasan yang bersifat teknis seringkali bergeser menjadi aspek politis. Hal ini terjadi pada kerangka organisasi internasional seperti IAEA dan UNSCEAR, di mana perubahan peta geopolitik selama krisis Ukraina juga turut mempengaruhi pembahasan berbagai isu strategis dalam aspek keselamatan, keamanan dan *safeguards* nuklir. Kondisi ini mengakibatkan banyak elemen isu strategis yang terhambat pembahasannya karena dikaitkan dengan dampak krisis Ukraina.

Sebagai **proyeksi ke depan**, khususnya menyikapi perkembangan geopolitik ini, KBRI/PTRI Wina berpandangan dalam beberapa isu strategis global, diperlukan peningkatan frekwensi penggalangan dukungan melalui pendekatan dan lobi-lobi yang lebih intensif, baik oleh KBRI/PTRI Wina dalam kapasitas perwakilan tetap RI di Wina maupun oleh instansi penjurur pada tingkat nasional.

KBRI/PTRI Wina berpandangan terdapat peluang optimalisasi peran Indonesia dalam berbagai forum kerja sama multilateral khususnya memanfaatkan posisi strategis Indonesia pasca keketuaan G20 pada tahun 2022 dan keketuaan ASEAN pada tahun 2023. Berbagai komitmen dalam kerangka G20 dan ASEAN di bawah keketuaan Indonesia dapat terus diperjuangkan untuk diselaraskan dengan kerja sama di bawah kerangka kerja sama organisasi internasional, di antaranya dalam isu *clean energy transition* yang potensial diselaraskan dengan kerangka kerjasama teknis IAEA, isu penguatan sektor kesehatan,

penanganan isu lingkungan dan ketahanan pangan dengan kerangka kerja sama teknis FAO, WHO, IAEA dan UNIDO.

Sebagai informasi tambahan, di bidang multilateral secara keseluruhan terdapat 15 (lima belas) posisi /prakarsa / rekomendasi yang diajukan KBRI / PTRI Wina dan berhasil diterima dengan detail sebagai berikut:

1. Resolusi Sesi ke-31 CCPCJ mengenai “*Strengthening the international legal framework for international cooperation to combat and prevent illicit trafficking in specimens of wild fauna and flora*” dan mengenai “*Strengthening national and international efforts, including with the private sector, to protect children from sexual exploitation and abuse;*”
2. Resolusi Sesi ke-65 CND mengenai “*Promoting alternative development as a development-oriented drug control;*”
3. Usulan mengenai elemen-elemen dalam *Draft Convention on ICT for Criminal Purposes* dalam kerangka *the Ad Hoc Committee to Elaborate a Comprehensive International Convention on Countering the Use of Information and Communications Technologies for Criminal Purposes;*
4. *Report of the Seventh Review Meeting of the Contracting Parties to the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, IAEA, pada bulan Juli 2022 dan Report of the 2022 Conference of the Parties to the Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material IAEA, April 2022;*
5. *Resolution on Strengthening the Agency's activities related to nuclear science, technology and applications, Joint Declaration of the Parties to the Regional Cooperative Agreement for Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technology for Asia and the Pacific (RCA) IAEA, dan Proposal Indonesia mengenai pengembangan Capacity Building in Nuclear Science and Technology serta penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Indonesia dengan Institut Internasional Energi Nuklir (I2EN) Perancis, dalam rangkaian Konferensi Umum ke-66 International Atomic Energy Agency (IAEA), yang disampaikan pada pertemuan IAEA General Conference tanggal 26-30 September 2022;*
6. Proposal program pelatihan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) yang bertajuk *Application of Double Haploidy for Mutation by Speed Breeding (MbyS), Toward Crop Improvement* yang bertempat di Hotel Mercure, Jakarta, tanggal 5 Desember 2022;
7. Proposal pembentukan *sui generis system* GSO dan Proposal *standing permanent* atas mata agenda delimitasi dan definisi *outer space* pada sidang *the 65th Session of Committee of the UNCOPUOS*, Wina, tanggal 28 Maret - 8 April 2022 dan tanggal 1-10 Juni 2022;
8. Proposal pengarusutamaan *gender* dan *geographical distribution system* khususnya dari kawasan ASEAN untuk kepegawaian CTBTO pada *Group B Meeting* pada tanggal 27-29 Juni 2022;
9. Proposal kerja sama dalam Pertemuan Menko Bidang Perekonomian Airlangga dengan Direktur Jenderal UNIDO (*United Nations on Industrial Development Organization*) Mr. Gerd Muller pada tanggal 22 September 2022 disela-sela sidang *Trade, Investment and Industry Ministerial Meeting* di Nusa Dua Bali;
10. *Indonesia's Perspective and Comment on Initial Draft on the Establishment of Advisory Center on the International Investment Law* pada forum UNCITRAL pada pertemuan sesi ke-76 di Wina tanggal 10-14 Oktober 2022;

11. Masukan atas poin 3.6 mengenai dekarbonisasi serta peran pendanaan iklim dalam rangka mempercepat transisi hijau dan poin 6.1, intensifikasi koordinasi kebijakan industri internasional, *sustainable recovery* dan peran Industri dalam pencapaian SDGs, pada pertemuan *Briefing to UNIDO Member States on the 2023 High Level Political Forum* tanggal, 22 Desember 2022;
12. Usulan penambahan satu poin paragraf terkait penguatan daya tahan/*resilience* sektor industri melalui peningkatan daya saing dan produktifitas tenaga kerja melalui peningkatan SDM (poin 6.7) pada pertemuan *Briefing to UNIDO Member States on the 2023 High Level Political Forum*, tanggal 22 Desember 2022;
13. Proposal pengembangan UMKM dalam pertemuan Working Group I (MSMEs) UNICITRAL on the work of its thirty-eighth session, Wina, 19–23 September 2022;
14. Proposal *capacity building* pada UNTOC *Conference of the Parties*, 17-21 Oktober 2022; dan
15. Proposal *capacity building* pada sesi ke-25 *Preparatory Commission Meeting of CTBTO*, Wina, 14 - 18 November 2022.

Dengan diterimanya berbagai usulan KBRI / PTRI Wina sebagaimana telah disebutkan di atas menunjukkan keberhasilan diplomasi Indonesia di dalam forum tersebut.

S.3 CITRA POSITIF INDONESIA YANG MENINGKAT DI NEGARA AKREDITASI KBRI WINA

Meningkatnya citra positif Indonesia di negara akreditasi bertujuan untuk meningkatkan visibilitas citra atau *image* Indonesia kepada masyarakat di Austria dan Slovenia.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya khususnya melalui diplomasi *soft power*. Upaya KBRI/PTRI Wina tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak di Austria dan Slovenia.

“Peningkatan indeks citra Indonesia dilakukan dalam berbagai upaya khususnya melalui diplomasi soft power”

IKU
S.3.1

Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI/PTRI Wina

Capaian Kinerja

Untuk mengetahui seberapa besar citra atau image Indonesia dikenal oleh masyarakat Austria dan Slovenia serta upaya apa saja yang perlu ditingkatkan oleh KBRI/PTRI Wina, terdapat 1 (satu) IKU yang digunakan sebagai alat ukur dalam menganalisis capaian Sasaran Strategis S.3 yaitu IKU S.3.1 *“Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI/PTRI Wina”*.

Pengukuran IKU *“Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI/PTRI Wina”* diukur melalui survei yang dilakukan oleh 58 (lima puluh delapan) responden, baik secara *online* maupun *offline* (manual), yang kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi database website yang dapat diakses melalui tautan <https://citraindonesia.kemlu.go.id>. IKU tersebut diukur dengan menggunakan metode Anholt yang dilakukan dengan penilaian pada 3 (tiga) dimensi yaitu *Tourism & Socio-Culture, Economy, Governance & Rule of Law*.

Pada tahun 2022, capaian KBRI/PTRI Wina pada IKU “Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI/PTRI Wina” ditargetkan sebesar 4 dengan realisasi sebesar 3,81 dan capaian 97.69%.

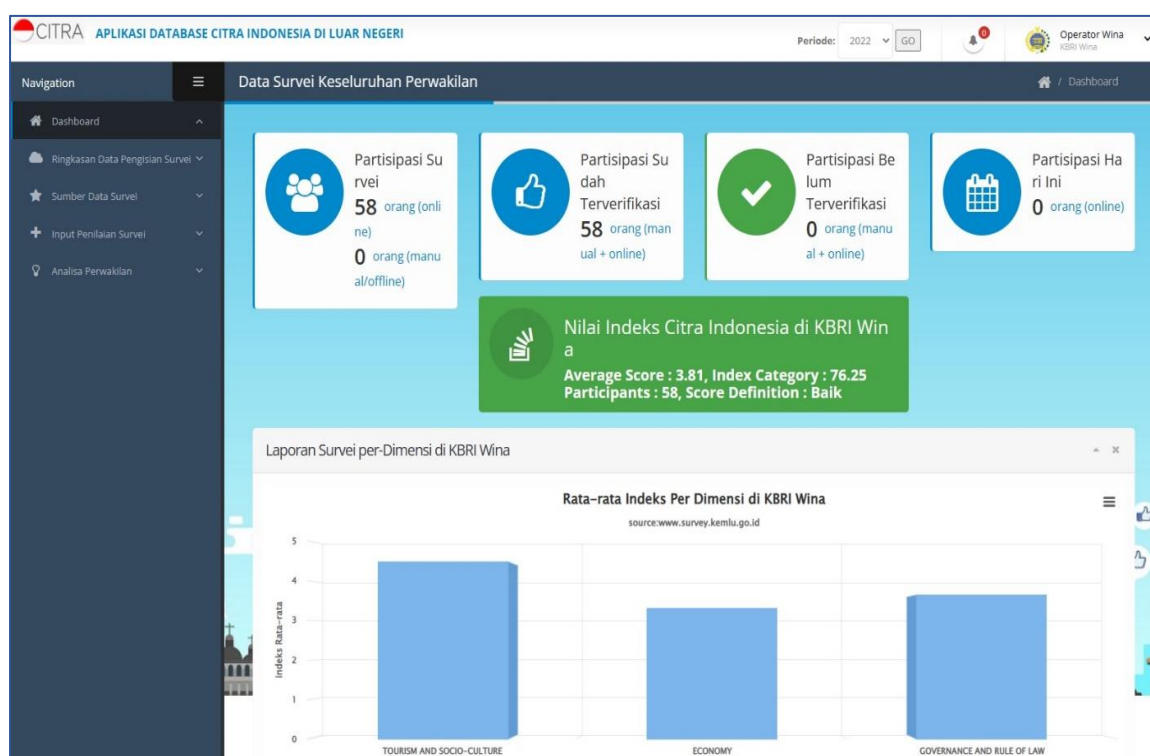
Berdasarkan hasil survei pada tahun 2022, realisasi IKU “Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi Wina” mencapai 3,81 dari target 4 atau memiliki capaian sebesar 97.69%.

IKU S.3.1	Informasi Kinerja	2021	2022
Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI/PTRI Wina	Indeks hasil survei terhadap citra Indonesia		
	realisasi	3,87	3,81
	target	3,85%	Target 4 (skala 5)
	capaian	100%	97,69%
	kategori	Baik	Baik

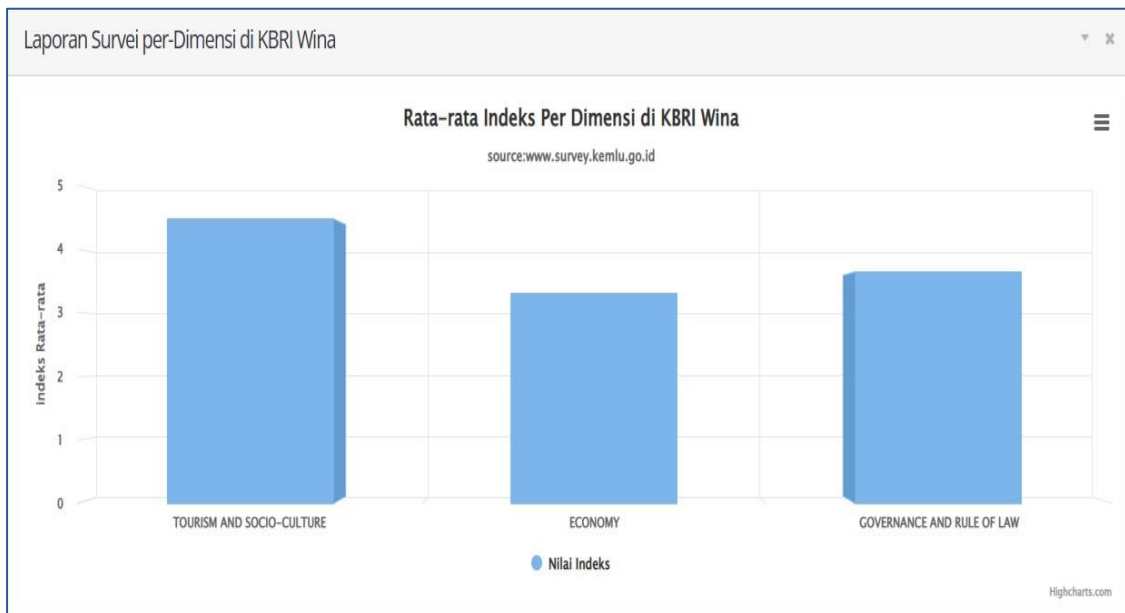
Tabel III.21

Analisis (termasuk kendala dan rekomendasi)

Pada *dashboard* aplikasi survey Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI/PTRI Wina tahun 2022, menunjukkan berbagai informasi sebagai berikut:

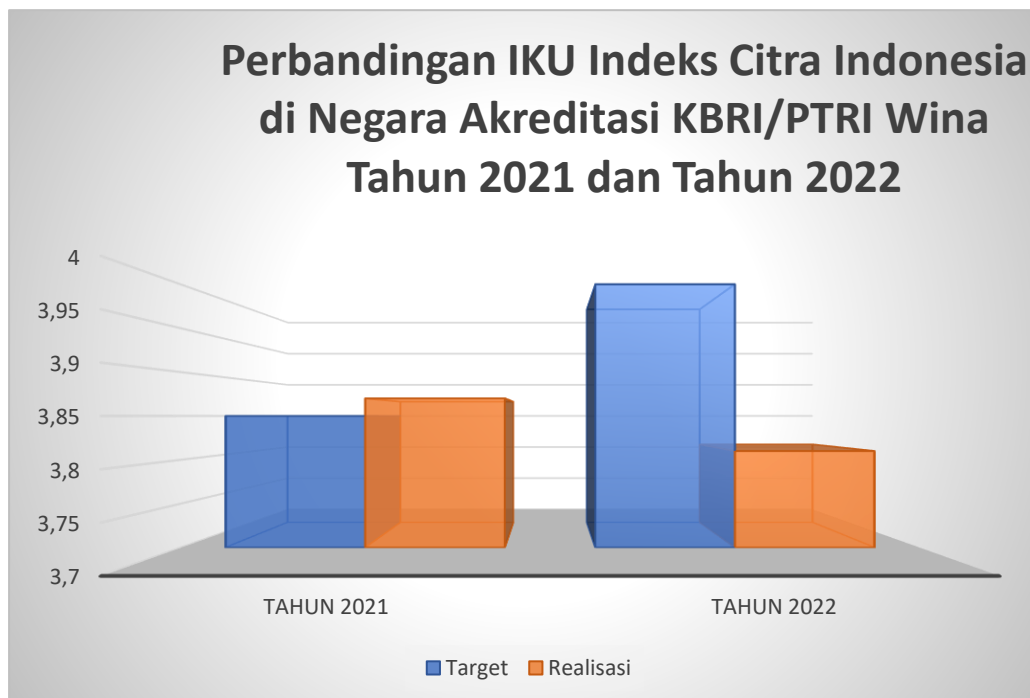


Gambar III.8



Gambar III.9

Berdasarkan hasil tersebut, jika dibandingkan dengan hasil pada tahun 2021, capaian IKU Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI/PTRI Wina pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan pada *Average Score* dan *Index Category*. Kendala situasi ekonomi akibat perang di Ukraina dan dampak pandemi hingga pertengahan tahun yang berkelanjutan menghambat rencana kegiatan promosi dan terus berdampak negatif secara global terhadap keyakinan masyarakat untuk berwisata dan berbisnis pada tahun 2022.



Gambar III.10

Secara umum Nilai Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI/PTRI Wina mencerminkan situasi kawasan Eropa dan khususnya wilayah kerja Austria dan Slovenia yang masih terdampak oleh situasi pandemi hingga pertengahan tahun 2022 serta situasi

inflasi ekonomi yang berdampak pada trend pariwisata antar kawasan. Namun demikian KBRI/PTRI Wina tetap dapat mencapai kategori “Baik”. Beberapa capaian konkret yang menegaskan pandangan positif dimaksud di tengah pandemi COVID-19 diantaranya kombinasi kegiatan KBRI/PTRI Wina yang dilakukan secara offline (tatap muka) dan online (virtual).

Program-program Seni-Budaya Indonesia pada tahun 2022

Dalam upaya untuk meningkatkan Nilai Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi Wina dan untuk lebih memperkenalkan seni-budaya Indonesia di kalangan masyarakat negara akreditasi, KBRI/PTRI Wina juga telah menyelenggarakan berbagai program promosi seni budaya Indonesia, antara lain:

1. Program Bahasa Indonesia Virtual Bagi Penutur Asing (BIPA) Semester Musim Panas dan Musim Dingin tahun 2022

Program BIPA (Kelas Bahasa Indonesia) di Austria dan Slovenia berlangsung sejak Maret 2018, di KBRI/PTRI Wina dan di Departemen Antropologi Sosial dan Budaya, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Wina (*Department of Social and Cultural Anthropology, Faculty of Social Science, University of Vienna - Universität Wien / Uniwien*). Program ini terlaksana dengan dukungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI. Sekarang program BIPA telah mejadi kurikulum resmi di Uniwien.

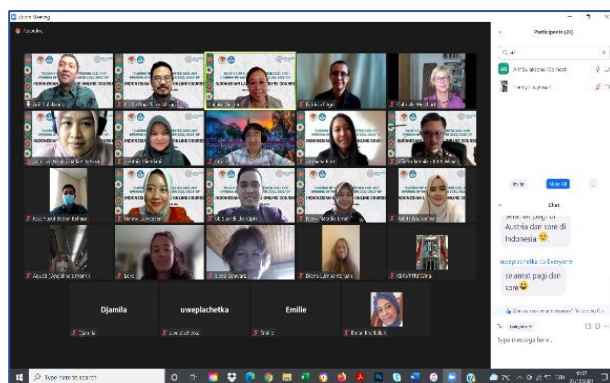


Foto III.9

Pengajaran Kelas Bahasa Indonesia secara online

Hingga saat ini program BIPA telah mencapai sepuluh semester dan terus mengalami peningkatan peminat dari beragam latar belakang siswa dari Austria dan Slovenia sejak 2018. Sejak awal pandemi tahun 2020, program ini dilaksanakan secara virtual. Pada tahun 2022, telah terlaksana program BIPA Untuk Semester Musim Panas (Maret - Juni 2022) dan Semester Musim Dingin (Oktober 2022 – Januari 2023). Dengan meningkatnya jumlah peminat tersebut, BPPB Kemendikbudristek RI kembali menugaskan tiga pengajar pada Semester Musim Panas 2022 dan Musim Dingin 2022/2023 untuk kelas Bahasa tingkat A1, A2, B1, B2 dan C1.

2. Penyelenggaraan Workshop Batik "Indigo" di Angewandte, 24 Januari 2022

KBRI/PTRI Wina bersama University of Applied Arts Vienna (Universität für angewandte Kunst Wien) telah mengadakan kegiatan workshop membatik pada tanggal 24 Januari 2022. Dalam pelaksanaan workshop, dalam rangka pemberdayaan elemen masyarakat

Indonesia mendukung promosi Indonesia, KBRI/PTRI Wina telah bekerjasama dengan WNI artis seni batik yang berdomisili di kota Klagenfurt, Sdr. Yosfiarso.



Foto III.10

Dalam pelaksanaan workshop, disepakati KBRI/PTRI Wina dan Angewandte untuk mengusung tema “Indigo Batik” dan memilih untuk menggunakan bahan-bahan alami seperti pewarna indigo dan malam alami. Sekitar 15 peserta murid-murid Universitas Angewandte telah berpartisipasi dan mengikuti pelajaran membatik secara seksama. Para peserta dalam desainnya berusaha memasukkan elemen desain *modern* bernuansa Austria

3. Promosi Tari Poco-poco, Februari – Desember 2022

KBRI/PTRI Wina bekerja sama dengan Austria-Indonesia Society (AIS) secara berkala pada hari Selasa pertama setiap bulan mengadakan kegiatan promosi kebudayaan tari Poco-poco selama bulan Februari – Desember 2022. Kegiatan berlangsung di depan Weltmuseum Wien, salah satu museum besar di tengah kota Wina yang ramai pengunjung dan dilewati para turis lokal dan asing.

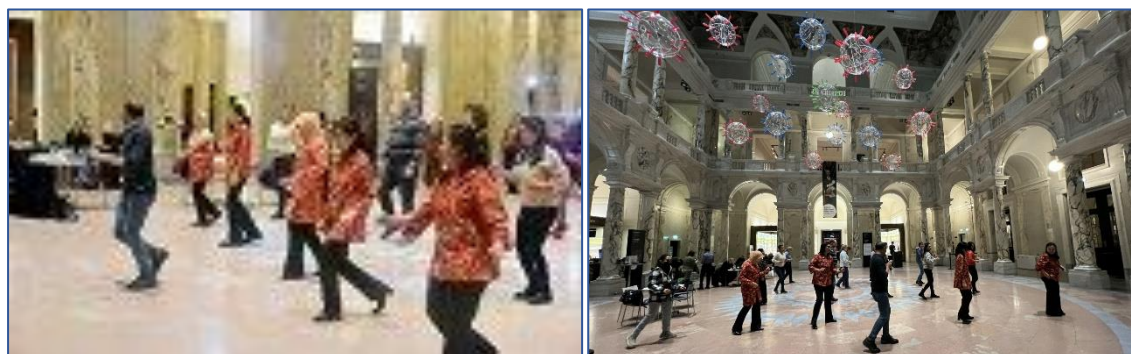


Foto III.11

4. Penayangan di ORF acara Sholat Idul Fitri dan Open House di KBRI/PTRI Wina

Pada tanggal 2 Mei 2022 KBRI/PTRI Wina kembali menggelar Sholat Idul Fitri di pekarangan KBRI Wina. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama KBRI Wina dengan kelompok masyarakat Warga Pengajian Austria (Wapena). Sejak bulan Maret, pemerintah Austria telah melakukan pelonggaran terkait kebijakannya untuk mengontrol pandemi antara lain dengan izin berkumpul dalam jumlah yang lebih banyak, relaksasi wajib penggunaan masker pada tempat terbuka dan mencabut aturan 3G (wajib bukti divaksin, dites dan dipulihkan) sebagai persyaratan untuk menghadiri suatu acara. Sekitar

200 WNI dan diaspora muslim Indonesia memadati perayaan akhir dari bulan Ramadhan 2022.



Foto III.12

Sesuatu yang khas pada pelaksanaan sholat Idul Fitri kali ini yaitu mendapatkan liputan khusus dari media setempat ORF.at yang juga meliputi tradisi kegiatan berbuka puasa keluarga muslim Indonesia di Austria. Rekaman ditayangkan pada tanggal 9 Mei 2022 secara nasional dan dapat dilihat di tautan <https://cloud.orf.at/index.php/s/rqnwPPBCwKL6Fi7>.

5. Promosi Alat Gamelan untuk murid *Vienna International School (VIS)*

KBRI/PTRI Wina kembali melakukan kegiatan promosi budaya di Wina, Austria yaitu pengenalan alat gamelan Jawa dengan para murid setingkat sekolah menengah atas *Vienna International School (VIS)* pada 11 Mei 2022, di KBRI Wina.



Foto III.13

Saat ini KBRI Wina memiliki alat musik tradisional gamelan Jawa dan Bali, angklung serta kolintang. Salah satu pelatih kelas gamelan bersama murid VIS itu adalah anggota kelompok pecinta gamelan asal Austria yang aktif dalam kegiatan terkait gamelan di Austria. Selain KBRI Wina, koleksi alat gamelan juga dimiliki oleh Univ. Kunst di kota Graz dan Weltmuseum di Wina. KBRI/PTRI Wina juga menggunakan kesempatan tersebut untuk mempromosikan kuliner Indonesia berupa kudapan ringan serta isu pariwisata Bali dan Keketuaan Indonesia di G20 untuk tahun 2022 dalam bentuk tayangan video informasi singkat.

6. Penyelenggaraan Bazaar Indonesia dan Pesta Rakyat 2022 di KBRI/PTRI Wina

KBRI/PTRI Wina telah melaksanakan perhelatan Pesta Rakyat 2022 pada tanggal 27 Agustus 2022 sebagai puncak rangkaian kemeriahan HUT RI ke-77 dengan tema "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat". Berbagai pertunjukan hiburan dimeriahkan oleh komponen masyarakat di Austria serta kehadiran Lia Emilia sebagai artis penghibur dari Indonesia. Bazaar kuliner dan produk seni Indonesia juga dijajakan dalam rangka mendukung upaya promosi keberagaman Indonesia.



Foto III.14

Sekitar 1000 pengunjung hadir Pesta Rakyat tahun ini dengan dukungan berbagai elemen masyarakat di Austria serta mitra kerja KBRI/PTRI Wina. Dibuka juga pelayanan jasa kekonsuleran melalui pojok Warung Konsuler untuk WNI yang membutuhkan. Sebagai bintang tamu hadir Lia Emilia menghibur para pengunjung dan mengundang para penonton untuk bergoyang bersama mengikuti alunan irama pop dan dangdut khas Indonesia. Acara juga diisi antara lain dengan partisipasi *band* dari KBRI/PTRI Wina, PPI Austria, WNI di Graz, Warga Pengajian Austria (Wapena), Keluarga Kristen Indonesia di Austria (KKIA), grup pencak silat "Anak Harimau", serta tarian-tarian dari daerah Bali, Sumatera Utara, dan Maluku.



Foto III.15

7. Partisipasi KBRI/PTRI Wina bersama ASEAN Vienna Community pada kegiatan ASEAN Day di VIC

Perayaan Hari Ulang Tahun ke-55 ASEAN (*ASEAN Day*) telah diselenggarakan oleh ASEAN Vienna Committee (AVC) pada hari ini, Jumat, 2 September 2022 di *Vienna International Center (VIC)*. Dubes RI Wina bersama Kepala Perwakilan negara anggota

ASEAN, pejabat *UN Office in Vienna* (UNOV) dan Organisasi Internasional, perwakilan Kementerian Luar Negeri Austria, serta tamu lainnya yang mencapai sekitar 400 orang hadir pada acara tersebut. Adapun rangkaian acara terdiri dari sambutan Duta Besar Myanmar selaku Ketua AVC, sambutan pejabat UNODC, sesi foto bersama, pagelaran busana/fashion show ASEAN, hingga sajian hidangan ASEAN secara buffet.



Foto III.16

8. Dukungan KBRI/PTRI Wina untuk pameran Ars Elektronika BINUS di Linz

Pada tanggal 5 dan 11 September 2022, KBRI/PTRI Wina telah memberikan dukungan delegasi dan dukungan teknis IT kepada delegasi Universitas Bina Nusantara (Binus) yang telah berpartisipasi pada pameran Ars Electronica Festival 2022 di kota Linz, negara bagian Upper Austria. Binus telah memamerkan “Angklung Otomatis” yang dikembangkan oleh periset anak bangsa dengan menggunakan teknologi embedded system (Raspberry Pie). Delegasi juga telah berkesempatan melakukan *Courtesy Call* kepada Dubes RI pada tanggal 12 September 2022 di Wisma Duta Besar dan melakukan acara seremonial pemberian hibah perangkat robotiks. Tim Binus juga telah memasang Angklung Otomatis di KBRI/PTRI Wina untuk pelaksaan demonstrasi teknis kepada WakepPri/DCM dan tim Petugas Komunikasi KBR/PTRI Wina.



Foto III.17

9. Dukungan KBRI/PTRI Wina untuk Malam Amal AIS, GPN, dan KKIA

Pada 7 September 2022, KBRI/PTRI Wina telah menghadiri undangan Austrian-Indonesian Society (AIS) and Friends yang menggelar malam amal untuk anak-anak yang membutuhkan di Indonesia dan disalurkan melalui ISCO Foundation di Indonesia. Acara merupakan kolaborasi AIS dengan berbagai unsur kelompok masyarakat WNI dan Diaspora Indonesia di wilayah Wina dan sekitarnya yaitu Keluarga Kristen Indonesia di

Austria (KKIA) dan Gema Puspa Nusantara (GPN) serta para relawan lainnya. Acara dimeriahkan oleh berbagai penampilan seni budaya Indonesia dan Austria untuk menghibur para hadirin. Dalam rangka pembinaan masyarakat WNI dan Diaspora serta mempererat hubungan dengan berbagai organisasi serta asosiasi Friends of Indonesia di Austria, KBRI/PTRI Wina telah memberikan perhatian dan dukungannya terhadap berbagai inisiatif kegiatan yang dilakukan secara mandiri oleh kelompok-kelompok pemangku kepentingan hubungan *people-to-people* antara kedua negara di Austria.



Foto III.18

10. *Batik Workshop*

KBRI/PTRI Wina telah menyelenggarakan kegiatan *Batik Workshop* pada tanggal 25 November 2022. Adapun narasumber dalam *Workshop Batik* adalah Sdr. Yosfiarso Florentinus, WNI dan pengrajin Batik yang menetap di Kota Klagenfurt, negara bagian Carinthia, Austria. Acara dibagi dalam dua sesi *workshop* yang diikuti oleh total 40 peserta warga negara Austria dengan latar belakang dan profesi yang beragam. Guna memperkenalkan kuliner khas Indonesia pada kegiatan *Workshop*, KBRI/PTRI Wina menyajikan hidangan masakan khas Indonesia berupa sate ayam, lumpia, mie bakso dan dadar gulung pandan. KBRI/PTRI Wina juga memanfaatkan kegiatan ini untuk menambah partisipasi masyarakat warga negara asing pada *Survei Citra Indonesia*.



Foto III.19

11. *Diseminasi Berbagai Informasi Ekonomi, Regulasi dan Budaya melalui Media Sosial KBRI/PTRI Wina*

KBRI/PTRI Wina senantiasa menyampaikan informasi berguna terkait pariwisata, ekonomi, regulasi dan budaya nasional melalui akun media social (Twitter, Facebook dan Instagram) dan website KBRI/PTRI Wina. Berikut beberapa contoh tayangan akun medsos KBRI/PTRI Wina;

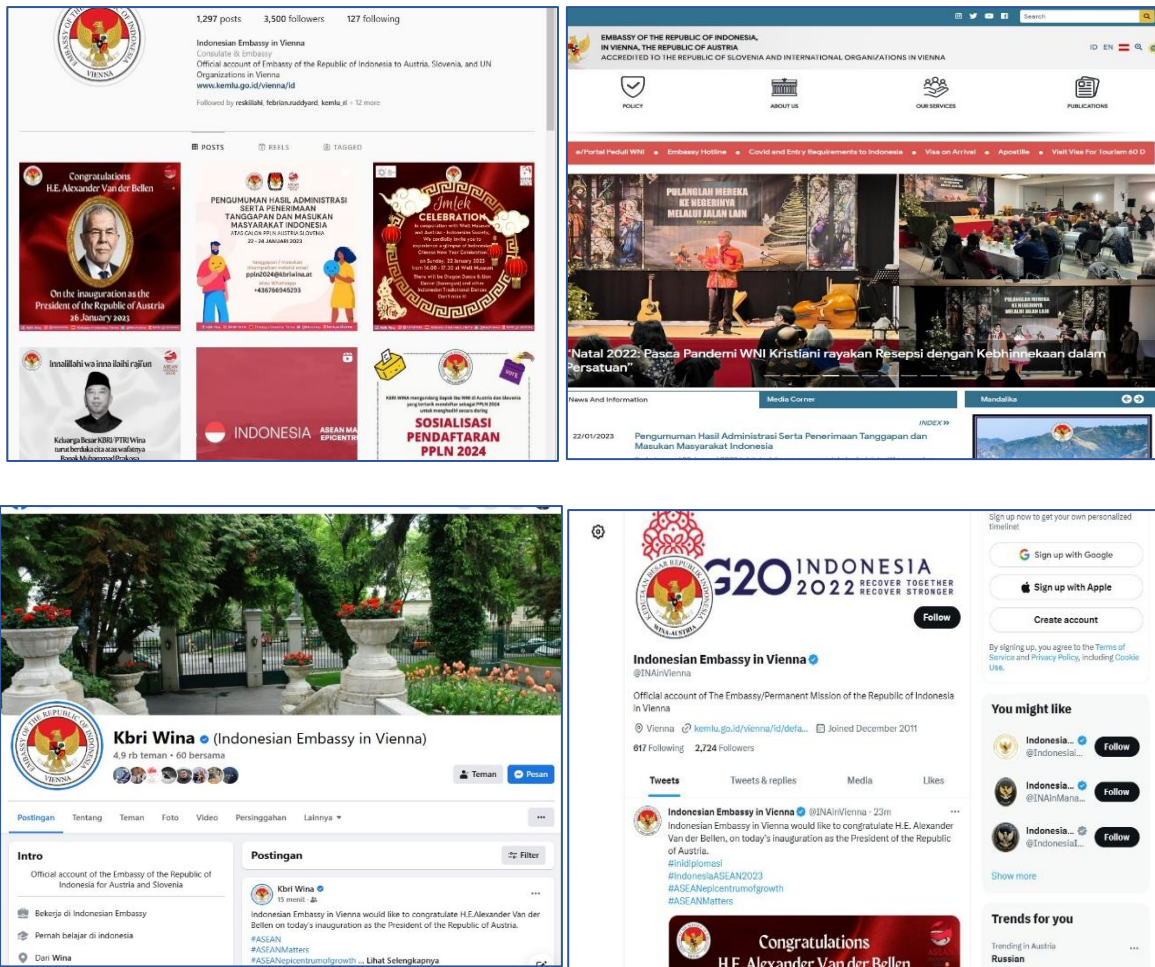


Foto III.20

Meskipun capaian Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi Wina mencapai target dengan nilai baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala diantaranya adalah situasi inflasi ekonomi yang tinggi akibat perang di Ukraina dan dikarenakan situasi pandemi COVID-19 yang terus berlanjut di paruh pertama 2022. Situasi ini berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan yang tadinya dapat dilaksanakan secara langsung di lapangan, namun harus diubah menjadi *virtual* atau *online*.

Pada paruh kedua setelah pandemi mulai mereda, geliat pariwisata dan kegiatan masyarakat masih melakukan *wait and see*. Hal ini turut mempengaruhi animo publik yang menjadi target kegiatan promosi secara umum.

Customer Perspective

C.1 PELINDUNGAN WNI DAN PELAYANAN PUBLIK KBRI WINA YANG PRIMA

Pelindungan WNI di luar negeri merupakan prioritas diplomasi Indonesia yang kedua. Oleh sebab itu, perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai ujung tombak diplomasi perlu untuk terus memberikan perlindungan dan pelayanan publik yang prima bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri dan dalam situasi apapun termasuk Pandemi COVID-19.

KBRI/PTRI Wina sesuai dengan salah satu tugas dan fungsinya memberikan perlindungan dan pelayanan publik yang mencakup pelayanan di bidang perlindungan kepada WNI dan pelayanan di bidang kekonsuleran kepada WNI dan Warga Negara Asing (WNA).

Adapun jenis perlindungan kepada WNI yang diberikan oleh KBRI/PTRI Wina adalah dalam bentuk bantuan pemulangan jenazah WNI ke Indonesia dan bantuan kekonsuleran seperti perlindungan dan pemulangan WNI terlantar, pendampingan hukum bagi WNI dan BHI yang bermasalah, serta bantuan logistik dan atau penampungan bagi WNI bermasalah. Sementara itu jenis pelayanan kekonsuleran yang diberikan oleh KBRI/PTRI Wina adalah dalam bentuk perpanjangan dan pembuatan paspor baru untuk WNI dan pelayanan visa kepada WNA terutama Austria dan Slovenia, serta melaksanakan fungsi pencatatan sipil terhadap warga negara Indonesia di Austria dan Slovenia, termasuk di dalamnya prioritas untuk persiapan Pemilihan Umum 2024 yaitu pemutakhiran data WNI melalui Portal Peduli WNI.

Pencapaian Sasaran Strategis KBRI/PTRI Wina ‘Perlindungan WNI/BHI dan Pelayanan Publik KBRI/PTRI Wina yang Prima’ diperoleh dari pengukuran 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU-1 “Presentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI/PTRI Wina yang diselesaikan”, IKU-2 “Indeks Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI/PTRI Wina” dan IKU-3 ‘Indeks Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI KBRI/PTRI Wina’.

IKU
C.1.1

Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Wina yang Diselesaikan

Capaian Kinerja

Sebagai ujung tombak dari perlindungan WNI, KBRI/PTRI Wina merespon peristiwa-peristiwa yang muncul untuk memastikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi para WNI di wilayah akreditasi. IKU ‘presentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI/PTRI Wina yang diselesaikan’ bertujuan untuk mengukur kinerja KBRI/PTRI Wina dalam memberikan perlindungan WNI di negara akreditasi. Adapun kasus yang ditangani KBRI/PTRI Wina bersifat 2 (dua) jenis kasus, yaitu kasus umum dan kasus bersifat khusus.

Kasus khusus yang diselesaikan

Adapun jenis kasus khusus yang ditangani adalah kasus yang memiliki kategori *high profile case* seperti antara lain: kasus penanganan pandemi COVID-19, hukuman mati, pelaku atau korban pembunuhan, korban penyiksaan fisik dan yang mendapatkan perhatian luas masyarakat dan media massa asing/nasional.

Dalam situasi pandemik yang berkepanjangan dan kemungkinan satu keluarga untuk menjalani karantina karena anggota keluarga yang lain terkena COVID-19, maka KBRI/PTRI Wina sejak tahun 2021 terus memberikan dukungan paket sembako, vitamin dan peralatan kebersihan (masker dan sanitizer) untuk dapat melewati masa kritis di masa-masa *lockdown* COVID-19. Tercatat tahun 2022 sebanyak **131** kasus COVID-19 yang dilaporkan masyarakat Indonesia kepada KBRI/PTRI Wina dimana dari jumlah tersebut telah dibagikan bantuan logistik COVID-19 kepada 91 orang WNI (kepala keluarga). Ini merupakan peningkatan dari hanya 21 kasus yang dilaporkan pada tahun 2021. Namun ketika Pemerintah Austria dan

Eropa menghapus kebijakan karantina per 1 Agustus 2022, maka program ini juga telah dihentikan.



Foto III.21

Dokumentasi penyaluran bantuan logistik bagi WNI yang terdampak COVID-19

Kasus umum yang diselesaikan

Sedangkan kasus penanganan umum adalah jenis kasus terkait permasalahan perdata, keimigrasian, ketenagakerjaan, meninggal dunia dan pelanggaran hukum dengan ancaman hukuman ringan. Sepanjang tahun 2022 terdapat **10** kasus umum yang ditangani oleh KBRI/PTRI Wina, berupa penanganan dan penyelesaian kasus hukum terkait dugaan wanprestasi/penipuan transaksi jual beli, dugaan pencucian uang, *shoplifting*, pendampingan dan pemulangan bagi WNI yang sakit, pemulangan jenazah WNI tanpa keluarga, pendampingan kasus kekerasan dalam rumah tangga, pengawasan hak asuh anak, serta kasus hukum lainnya.

Terkait kasus pemulangan jenazah, pada tanggal 21 Oktober 2022 KBRI/PTRI Wina telah terinformasi oleh anggota masyarakat Indonesia bahwa terdapat WNI yang koma di RS LKH Graz berusia 62 tahun dan KBRI/PTRI Wina langsung mencari dan menghubungi pihak keluarga di Jakarta. Pada tanggal 25 Oktober 2022 pasien WNI tersebut wafat dan atas persetujuan keluarga jenazah dikirim ke Indonesia

setelah dilakukan prosesi sholat jenazah, WNI dikirimkan ke Wina untuk lanjut ke Jakarta. Jenazah diterima keluarga di Bandar Udara Soekarno-Hatta pada tanggal 30 Oktober 2022 dengan bantuan PWNI Kemlu dan BP2MI.

Untuk kasus wanprestasi/penipuan oleh perusahaan suku cadang sepeda di Wina Austria terhadap importir dari Indonesia, KBRI/PTRI Wina telah menyarankan beberapa nama pengacara untuk membantu penegakan proses hukum setempat. Secara berkala KBRI/PTRI Wina memonitor *progress* dari kasus dan terinformasikan bahwa kasus sudah tertangani oleh pengacara terpilih dan sudah ada putusan hukum atas kasus tersebut.

Adapun perbandingan penanganan kedua jenis kasus terlihat dalam tabel berikut:

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Status (Selesai / Belum Selesai)
1.	Kasus WNI Meninggal & Pemulangan Jenazah	1	Selesai
2.	Kasus Pidana	5	Selesai
3.	Kasus Perdata Keluarga	1	Selesai
4.	Kasus Perdata Orang/Benda/Lainnya (Wanprestasi)	1	Selesai
5.	Kasus WNI sakit dan dipulangkan	2	Selesai
6.	Kasus WNI Positif COVID	131	Selesai (sudah beraktifitas normal setelah karantina mandiri)

Tabel III.22

Catatan: Kasus dengan status selesai adalah kasus yang tertangani secara tuntas dan mencapai solusi akhir sesuai prosedur, aturan hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak.

Persentase kasus khusus dan kasus umum yang diselesaikan

Di bawah ini merupakan tabel persentase penanganan kasus umum dan kasus khusus secara kumulatif pada tahun 2022.

IKU C.1.1	Informasi Kinerja	Jumlah
Presentasi Kasus WNI di negara akreditasi KBRI/PTRI Wina yang diselesaikan	Kasus yang selesai ditangani: kasus khusus dan kasus umum	131
	Kasus yang ditangani	131
	Realisasi	100 %
	Target	80%
	Capaian	120% (melebihi nilai batas toleransi)

Tabel III.23

Pada tahun 2022, realisasi presentasi kasus WNI di negara akreditasi KBRI/PTRI Wina yang diselesaikan mencapai angka 100% dari target 80%. Selain itu, realisasi presentasi kasus WNI di negara akreditasi KBRI/PTRI Wina pada tahun 2022 dan realisasi pada tahun 2021, dapat dilihat di tabel sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Capaian IKU C.1.1 Tahun 2021 dan 2022						
IKU C.1.1	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
Presentasi kasus WNI di negara akreditasi KBRI/PTRI Wina yang diselesaikan	74%	100%	120%	80%	100%	120%

Tabel III.24



Gambar III.11

Analisis (termasuk kendala, solusi dan proyeksi ke depan)

Pada umumnya WNI yang berdomisili di Austria dan Slovenia tidak memiliki permasalahan yang cukup serius, hal ini disebabkan sistem administrasi kependudukan, *social-care* dan peraturan hukum di Austria dan Slovenia yang sudah terbentuk dan dijalankan dengan baik.

Dalam penanganan kasus WNI, khususnya WNI positif COVID-19, **tantangan** isu perlindungan data pribadi atau *data privacy* di Austria dan Eropa pada umumnya, menjadi perhatian. Selain itu, pada beberapa kasus, KBRI/PTRI Wina baru mengetahui WNI positif COVID-19, setelah WNI tersebut sembuh dan menginfokan kepada KBRI atau sesama WNI lainnya. Sebagai **solusi pemecahan masalah**, pendekatan personal dan individual dilakukan KBRI/PTRI Wina untuk meyakinkan bahwa informasi hanya digunakan untuk kepentingan kekonsuleran dan perlindungan WNI semata sesuai peraturan perundangan Austria dan Indonesia. Seiring dengan peningkatan kepercayaan masyarakat WNI terhadap KBRI/PTRI Wina, tercatat jumlah pribadi pelaporan kasus WNI positif COVID-19 juga semakin meningkat di tahun 2022. **Diproyeksikan** ke depan perlindungan WNI akan terus diperlukan sehingga kerja sama dengan kelompok masyarakat Indonesia perlu diperkuat untuk dapat membantu pendekatan persuasif.

IKU
C.1.2

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI/PTRI Wina

Capaian Kinerja

“Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI/PTRI Wina” ditetapkan sebagai salah satu indikator pengukuran kinerja utama (IKU) KBRI/PTRI Wina dalam rangka memenuhi Sasaran Strategis Pelindungan WNI dan Pelayanan Publik KBRI/PTRI Wina yang Prima. Untuk mengukur realisasi terhadap target yang telah ditetapkan, KBRI/PTRI Wina melakukan penyebaran kuesioner kepada penerima pelayanan kekonsuleran yang datang ke Gedung KBRI/PTRI Wina maupun yang mendapatkan layanan secara online melalui email konsuler.

Tabel Capaian IKU C.1.2 Tahun 2022		
IKU C.1.2	Informasi Kinerja	Jumlah
Indeks Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI/PTRI Wina	Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI/PTRI Wina	4
	Realisasi	4
	Target	4
	Capaian	100 %

Tabel III.25

Pada tahun 2022, realisasi Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI/PTRI Wina mencapai angka 4 dari target 4 (skala 4) atau 100% dengan capaian Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran adalah 100%.

Angka 100% menunjukkan bahwa responden pada umumnya telah merasa puas terhadap kualitas pelayanan konsuleran yang diberikan oleh KBRI/PTRI Wina

Nilai realisasi Nilai Persepsi tersebut diperoleh dari perhitungan hasil kuisisioner terhadap kualitas pelayanan konsuleran yang diisi oleh para pemohon yang datang ke KBRI/PTRI Wina. Total jumlah kuisisioner yang telah dikembalikan dan diisi secara lengkap adalah **300** kuisisioner dan angka rata-rata kepuasan yang diperoleh adalah 4 dari target 4.



Gambar III.12

Tabel Perbandingan Capaian IKU C.1.2 Tahun 2021 dan 2022						
IKU C.1.2	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
Indeks Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI/PTRI Wina	4	4	100%	4	4	100%

Tabel III.26

KBRI/PTRI Wina dapat mempertahankan realisasi kepuasan pelayanan kekonsuleran di tahun 2022.

Analisis (termasuk kendala, solusi dan proyeksi ke depan)

Adapun **hambatan** yang dihadapi terkait layanan Konsuler adalah perubahan kebijakan dari Pusat yang belum dibarengi dengan sosialisasi menyeluruh dan petunjuk teknis kepada seluruh Perwakilan RI di luar negeri, beberapa contohnya adalah pembukaan kembali layanan visa kunjungan wisata, pencetakan kolom tanda tangan pada halaman *endorsement* paspor, apostille dan penerbitan paspor 10 tahun. Beberapa perubahan tersebut sudah dipublikasikan terlebih dahulu di dalam negeri namun Perwakilan RI seringkali terlambat mendapat surat edaran dan sistem di SIMKIM tidak langsung disesuaikan.

Sebagai **solusi** untuk mengatasi hambatan tersebut, sepanjang tahun 2022, KBRI/PTRI Wina telah berpartisipasi pada kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang diadakan oleh Pusat, dan lebih lanjut KBRI/PTRI Wina juga telah mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat Indonesia dan Slovenia.

Sebagai **proyeksi ke depan**, tugas pelayanan konsuler akan semakin tinggi sehingga diperlukan kecepakan fasilitas infrastruktur komputer dan sosialisasi perkembangan peraturan nasional.

IKU
C.1.3

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI KBRI/PTRI Wina

Capaian Kinerja

“Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan KBRI/PTRI Wina” ditetapkan sebagai salah satu indeks pengukuran kinerja utama (IKU) KBRI/PTRI Wina dalam rangka memenuhi Sasaran Strategis Pelindungan WNI dan Pelayanan Publik KBRI/PTRI Wina yang Prima. Untuk mengukur realisasi terhadap target yang telah ditetapkan, KBRI/PTRI Wina melakukan penyebaran kuesioner dalam bentuk *digital* kepada WNI penerima pelayanan perlindungan yang datang ke Gedung KBRI/PTRI Wina, Warung Konsuler, maupun yang mendapatkan layanan secara *online* melalui *email* konsuler KBRI/PTRI Wina.

Tabel Capaian IKU C1.3 Tahun 2022		
IKU C.1.3	Informasi Kinerja	Jumlah
Nilai Persepsi Pelayanan Perlindungan KBRI/PTRI Wina	Hasil <i>Survey</i> Kepuasan Pelayanan Perlindungan KBRI/PTRI Wina	4
	Realisasi	4
	Target	4
	Capaian	100 %

Tabel III.27

Angka 100% menunjukkan bahwa responden pada umumnya telah merasa puas terhadap kualitas pelayanan perlindungan yang diberikan oleh KBRI/PTRI Wina.

Nilai realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan hasil kuesioner terhadap kualitas pelayanan perlindungan yang diisi oleh para pemohon. Total jumlah kuisisioner yang telah dikembalikan dan diisi secara lengkap adalah 300 kuisisioner dan angka rata-rata kepuasan yang diperoleh adalah 4 dari target 4.

Pada tahun 2022, realisasi Nilai Persepsi Pelayanan Pelindungan KBRI/PTRI Wina mencapai angka 4 dari target 4 (skala 4) atau 100%

Analisis (termasuk kendala, solusi dan proyeksi ke depan)

Adapun **hambatan dan tantangan** yang mengakibatkan tidak tercapainya target pada IKU antara lain karena banyaknya faktor penentu di negara akreditasi yang mempengaruhi proses penyelesaian kasus seperti sistem hukum dan birokrasi setempat. **Sebagai solusi** untuk mengatasi hambatan tersebut, sepanjang tahun 2021 dan juga tahun 2022, KBRI/PTRI Wina telah dan akan terus melakukan peningkatan kapasitas internal berupa peningkatan pemahaman atas aturan negara setempat untuk mendukung upaya perlindungan WNI di luar negeri. **Sebagai proyeksi** ke depan di mana pelayan konsuler akan semakin meningkat, KBRI/PTRI Wina akan terus meningkatkan koordinasi dengan pusat dan juga *counterpart* di negara akreditasi.

C.2 DUKUNGAN DAN KOMITMEN YANG TINGGI ATAS KESEPAKATAN BILATERAL DI NEGARA AKREDITASI KBRI WINA

Dukungan dan komitmen terhadap kesepakatan bilateral di negara akreditasi diwujudkan dengan menindaklanjuti hasil kesepakatan bilateral yang telah dibuat. Semakin tinggi persentase tindak lanjut atas kesepakatan tersebut, maka berarti dukungan dan komitmen KBRI/PTRI Wina terhadap kesepakatan bilateral semakin tinggi.

Capaian Kinerja

Berkaitan dengan IKU “Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI Wina”, KBRI/PTRI Wina mencatat bahwa dari target rencana adalah mencapai 4 kesepakatan dengan nilai target 90%. Pada tahun 2022 telah dicapai 6 (enam) buah kesepakatan. Berdasarkan persentase tersebut, capaian KBRI/PTRI Wina untuk IKU tersebut mencapai 150%.

Rencana kerja IKU C.2.1 mengenai persentase tindak lanjut kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI Wina tahun 2022 dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

IKU C.2.1	Informasi Kinerja	2022
Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI Wina	Jumlah kesepakatan bilateral yang ditindaklanjuti/diimplementasikan	6
	Jumlah rencana kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi beserta negara rangkapan yang akan ditindaklanjuti	4
	Realisasi	150%
	Target	90%
	Capaian	120%

Tabel III.28

Pada tahun 2022, terdapat 6 (enam) jumlah kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara akreditasi yang berhasil ditindaklanjuti dan diimplementasikan melalui berbagai kunjungan kerja dan kedatangan delegasi RI dengan keterangan sebagai berikut:

1. Pertemuan Menaker RI dan Austria

Kunjungan kerja Menaker RI, Y.M. Ida Fauziyah, dan Direktur Jenderal Pembinaan, Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (Bina Lavotas) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Bapak Budi Hartawan, ke Wina, Austria, pada tanggal 14-15 Juni 2022 lalu. Menaker RI, Y.M. Ida Fauziyah, melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Tenaga Kerja dan Urusan Ekonomi Austria, Y.M. Martin Kocher.



Foto III.22

Tujuan Kunjungan kerja adalah membahas implementasi Kerja Sama Peningkatan Balai Vokasi dan Pelatihan Kerja Kemnaker yang mendapat pendanaan melalui skema *soft loan* dengan bunga 0 (nol)% dengan nilai total sebesar € 37.583.185,50. Pada tahun 2022, dilaksanakan peningkatan dan pembaruan Empat BBVPK (Balai Besar Vokasi dan Pelatihan Kerja) di Medan, Serang, Makassar dan Banyuwangi.

2. Kunjungan Kerja Menteri Transportasi dan Menteri Bappenas ke Perusahaan Doppelmayr Seilbahnen

Kunjungan Kerja Menteri Transportasi dan Menteri Bappenas ke perusahaan kereta gantung, Doppelmayr Seilbahnen di Wolfurt, pada 1 September 2022 untuk menindaklanjuti kerja sama keuangan RI-Austria. Hasil pertemuan adalah tindak lanjut proses pembahasan pengadaan *cable car* tahap 1 di IKN yang diharapkan dapat terwujud akhir November 2023.



Foto III.23

Adapun tindak lanjutnya, khususnya pembiayaannya diharapkan dapat menggunakan skema *financing* berupa pinjaman lunak Pemerintah Austria, sebagaimana yang tercantum dalam *MoU on Financial Cooperation* antara Kementerian Keuangan Austria dan Kementerian Keuangan RI.

3. Pertemuan Wakil Ketua MPR RI dengan *President of National Assembly Austria*



Foto III.24

Kunjungan Kerja Wakil Ketua MPR RI, serta Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) dilaksanakan pada tanggal 26-30 September 2022 di Wina, Austria. Tujuan kunjungan kerja adalah untuk mendorong peningkatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Austria, serta dalam rangka melakukan kajian terkait konstitusi dan sistem ketatanegaraan.

Pada kunjungan kerja di Wina tersebut, Delri telah melakukan pertemuan terpisah dengan dengan: (i) Presiden *National Council* Austria, Mr. Mag. Wolfgang Sobotka; dan (ii) Kepala *Hans Kelsen Institute*, Prof. Thomas Olechowski.

4. Kunjungan Kerja Menteri Pertanian, Mei 2022



Foto III.25

Menteri Pertanian telah melakukan kunjungan kerja ke kota Wina, Austria pada tanggal 30 – 31 Mei 2022. Kunjungan dimaksudkan untuk mengupayakan kelancaran pasokan pupuk dan bahan pokok pembuatan pupuk untuk Indonesia di tengah berbagai hambatan yang berasal dari isu global seperti perubahan iklim dan krisis konflik Ukraina. Terdapat 2 (dua) perusahaan pupuk besar yang ditemui Menteri Pertanian adalah *EuroChem* dan *Jordan Phosphate Mines Co. Plc.*

5. Pertemuan Deputi Bappenas, Pungky Sumadi dengan Dirjen Kementerian Ekonomi Austria

Kunjungan Kerja Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Pungky Sumadi. Kunjungan merupakan tindak lanjut dari Perpanjangan *Memorandum of Understanding between the Indonesian Ministry of Finance and the Austrian Federal Ministry of Finance on Financial Cooperation*, telah ditandatangani pada 9 Juli 2021 di Jakarta dan 18 Agustus 2021 di Vienna.



Foto III.26

MoU tersebut adalah kesepakatan kerja sama antara Kemkeu-Bappenas RI dan Kemkeu Austria-Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) dimana pihak Austria memberikan bantuan dana *soft loan* dari OeKB bagi proyek di Indonesia berdasarkan *List of Medium Term Planned External Loans and Grants (Blue Book)* dari Bappenas. Adapun sektor-sektor kerja sama indikatif antara lain *drinking and waste water, waste treatment, education and vocational training, infrastruktur, e-government solution, civil protection (e.g. firefighting, emergency warning), dan health sector.*

6. Kunjungan Kerja Kepala RSPAD Gatot Subroto didampingi Ketua Dewan Penasehat sekaligus dahulunya Menteri Kesehatan RI, Bapak Terawan ke VAMED Austria



Foto III.27

Kunjungan Kerja Kepala RSPAD Gatot Subroto didampingi Ketua Dewan Penasehat sekaligus dahulunya Menteri Kesehatan RI, Bapak Terawan ke VAMED Austria, 16-21 Oktober 2022. Kunjungan merupakan *inspection visit* sekaligus tindak lanjut Kerja Sama RSPAD Gatot Subroto dengan VAMED Austria untuk Pembangunan Sistem Unit Radiologi serta Peningkatan Peralatan Kesehatan.

Kerja Sama dilakukan melalui skema *soft loan* Pemerintah Austria bagi proyek-proyek pembangunan Indonesia.

Dari perspektif capaian kinerja, realisasi IKU “Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI Wina” oleh KBRI / PTRI Wina terbilang cukup baik khususnya pada dua tahun terakhir.

IKU	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI Wina	85 %	150 %	120%	90.5 %	100 %	110,5%	90% %	150 %	120%

Tabel III.29

Apabila tren positif realisasi IKU “Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI Wina” dapat dipertahankan, maka **diproyeksikan** target rencana strategis 2020 – 2024 KBRI / PTRI Wina akan dapat tercapai.

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI Wina	Target: 85 % Realisasi: 150%	Target: 90.5% Realisasi: 100%	Target: 90% Realisasi: 150%	Target: 91.5%	Target: 91.5%

Tabel III.30

Tantangan dan hambatan dalam meningkatkan kerja sama bilateral dengan negara akreditasi KBRI/PTRI Wina di tahun 2022 adalah sulitnya menentukan waktu jadwal pertemuan sebab belum pulihnya pandemi dengan persyaratan *health protocol* membatasi pertemuan fisik di Austria. Selayaknya dalam upaya meningkatkan hubungan bilateral perlu melibatkan pertemuan dan saling kunjung antar-pejabat lembaga negara dan pemangku

kepentingan dua belah pihak. **Sebagai upaya solusi**, proses pembahasan penyusunan kesepakatan dilakukan secara virtual dan lebih mengintensifkan komunikasi dengan berbagai *stakeholder* nasional dan rekan negara akreditasi. **Sebagai proyeksi ke depan**, implementasi kesepakatan yang telah dibuat dan rencana kerja sama lainnya perlu terus diidentifikasi.

B.1 DIPLOMASI BILATERAL YANG KUAT DI NEGARA AKREDITASI KBRI WINA

IKU B.1.1 Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya dengan negara akreditasi KBRI Wina

Capaian Kinerja

Diplomasi ekonomi, sosial, dan budaya yang kuat dapat dilihat dari jumlah kesepakatan yang dihasilkan antara Indonesia dengan negara sahabat. Dengan demikian, keberhasilan kinerja diplomasi KBRI/PTRI Wina juga tercermin dalam jumlah kesepakatan antara Indonesia dengan negara akreditasi.

Pada tahun 2022, capaian KBRI/PTRI Wina pada IKU “Jumlah Kesepakatan di bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya” ditargetkan sebanyak 4 dengan realisasi sebesar 4 dan capaian 100%.

IKU B.1.1	Informasi Kinerja		Jumlah
Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi dan sosial budaya yang terealisasi		4
	Target		4
	Realisasi		100%
	Capaian		100%

Tabel III.31

Adapun 4 (empat) jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penandatanganan MOU antara Menaker RI dan Menaker Ekon Austria

Pemri dan Pemerintah Austria sepakat menjalin kerja sama ketenagakerjaan, dalam rangka memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Penandatanganan MOU RI-Austria untuk Kerja Sama Pelatihan Vokasi dan Pelatihan Berbasis Kinerja dilakukan oleh Menaker RI, Ida Fauziyah dan Menteri Federal Austria untuk Ekonomi dan Tenaga Kerja, Martin Kocher, di Jakarta pada 10 November 2022. MOU menjadi payung pengembangan kerja sama bidang ketenagakerjaan, yang meliputi pelatihan vokasi, dan prakarsa

penempatan pekerja terampil Indonesia melalui pemagangan di Austria. Selain itu, juga dibangun Balai Latihan Kerja dan Pendidikan Vokasi di empat lokasi yaitu Medan, Serang, Banyuwangi dan Makassar, melalui skema pinjaman lunak dari Pemerintah Austria.

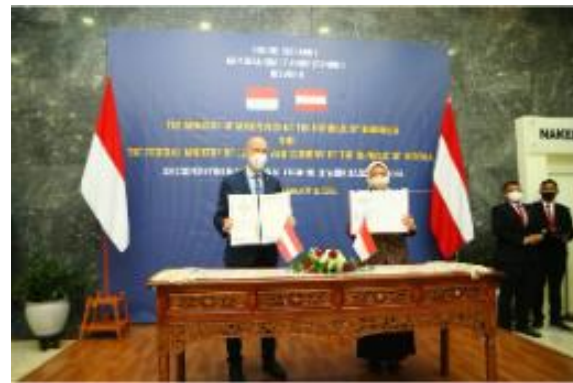


Foto III.28

2. Penandatanganan *Outcome FKB RI-Austria* berupa *Agreed Minutes* Kesepakatan Kerja Sama Bilateral

Pertemuan ke-5 Forum Konsultasi Bilateral (FKB) Indonesia-Austria diselenggarakan pada 25 November 2022 di Wina, Austria. Dirjen Amerop menjadi *Co-Chair* dalam pertemuan tersebut bersama Dirjen Political Austria. Pertemuan membahas kerja sama saling dukung di Organisasi Multilateral, serta kerja sama perdagangan dan investasi dan kerja sama bilateral lainnya.



Foto III.29

3. Penandatanganan *MOU on Intercultural and Interreligious Dialogue*



Foto III.30

Indonesia dan Austria menandatangani *MoU Intercultural and Interreligious Dialogue*, yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperluas kerja sama bilateral di bidang dialog lintas agama dan lintas budaya. Penandatanganan MOU juga merupakan tindak lanjut dari penyelenggaraan pertemuan ke-7 Dialog Lintas Agama (DLA) bulan September di Wina, Austria.

Pada kunjungan kerja di Wina tersebut, Delri telah melakukan pertemuan terpisah dengan dengan: (i) Presiden *National Council* Austria, Mr. Mag. Wolfgang Sobotka; dan (ii) Kepala *Hans Kelsen Institute*, Prof. Thomas Olechowski.

4. Penandatanganan Tindak Lanjut dan Perpanjangan Kerja Sama RSAL Dr. Ramelan Surabaya dengan VAMED Austria

Penandatanganan Perpanjangan Tindak Lanjut Kerja Sama RSAL Dr. Ramelan Surabaya dengan VAMED Austria untuk Peralatan Kesehatan. Kesepakatan pertama ditandatangani pada 2019 untuk peningkatan dan pengadaan peralatan kesehatan dan pembangunan unit radiologi. Kerja Sama dilakukan melalui skema *soft loan* Pemerintah Austria bagi proyek-proyek pembangunan Indonesia

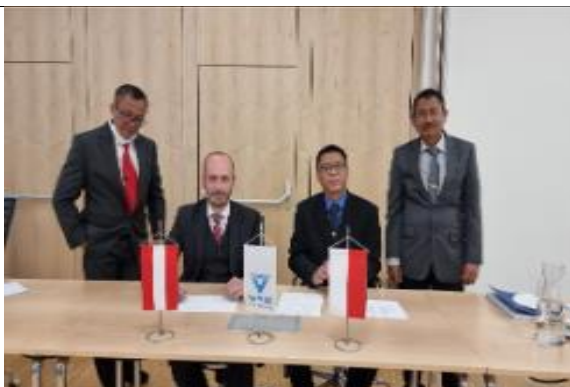


Foto III.31

Dari perspektif capaian kinerja, realisasi IKU terus membaik jika dilihat mulai dari periode 2018 - sekarang.

IKU	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kesepakatan di bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya	4	3	75%	4	2	50%	4	3	75%	4	3	75%	4	4	100%

Tabel III.32

Bila tren positif realisasi IKU tersebut dapat dipertahankan, maka **diproyeksikan ke depannya** target rencana strategis 2020 – 2024 KBRI / PTRI Wina akan dapat tercapai.

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Multilateral	Target: 4 Realisasi: 3	Target: 4 Realisasi: 3	Target: 4 Realisasi: 4	Target: 4	Target: 4

Tabel III.33

Salah satu tantangan adalah mendorong tindak lanjut dan penguatan implementasi kesepakatan bilateral serta masih adanya berbagai keterbatasan proses pembahasan kesepakatan akibat pandemi COVID-19. Selain itu, kebijakan pembatasan COVID-19 membuat proses jadwal pertemuan langsung sulit disepakati. **Sebagai solusi**, metode pembahasan / negosiasi berbagai kesempatan Indonesia dengan negara akreditasi umumnya dilakukan melalui *virtual* dan dilakukan secara tertulis dengan saling berkirim nota diplomatik.

Sebagai proyeksi ke depan pasca *new normal*, KBRI / PTRI Wina akan mencoba mendorong dilakukannya negosiasi langsung, maupun persiapan secara *virtual* dengan melibatkan berbagai antara kementerian terkait di Indonesia, *stakeholder* nasional dan wakil negara akreditasi sekiranya masih terdapat pembatasan pergerakan akibat COVID – 19.

**IKU
B.1.2****Jumlah kesepakatan di bidang politik, keamanan, dan maritim dengan negara akreditasi KBRI Wina****Capaian Kinerja**

Sebagai realisasi IKU B.1.2, Pemri telah menyepakati 2 (dua) kesepakatan, antara lain:

1. Penandatanganan *Outcome* FKB RI-Austria berupa *Agreed Minutes* Kesepakatan Kerja Sama Bilateral tanggal 25 Novemebr 2022 di Wina, Austria;
2. Kesepakatan bilateral RI – Austria untuk terus melakukan kerja sama saling dukung.

Capaian IKU dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

IKU B.1.2	Informasi Kinerja	Jumlah
Jumlah kesepakatan di bidang politik, keamanan, dan maritim dengan negara akreditasi KBRI Wina	Jumlah kesepakatan di bidang politik, keamanan, dan maritim dengan negara akreditasi KBRI Wina	2
	Target	2
	Realisasi	2
	Capaian	100%

Tabel III.34

Analisis (termasuk kendala dan rekomendasi)

Beberapa tantangan dan hambatan adalah masih adanya berbagai keterbatasan dalam melakukan pembahasan beberapa kesepakatan akibat pandemi COVID-19. Selain itu, kebijakan pembatasan COVID-19 membuat proses jadwal pertemuan langsung sulit disepakati. Di sisi lain, secara substansi terdapat perbedaan posisi negosiasi yang cukup jauh. **Sebagai solusi**, metode pembahasan / negosiasi berbagai kesepakatan Indonesia dengan negara akreditasi umumnya dilakukan melalui *virtual*, surel dan dan dilakukan secara tertulis dengan saling berkirim nota diplomatik.

Sebagai proyeksi ke depan pasca *new normal*, KBRI / PTRI Wina akan mencoba mendorong dilakukannya negosiasi langsung, maupun persiapan secara *virtual* dengan melibatkan berbagai antara kementerian terkait di Indonesia, *stakeholder* nasional dan wakil negara akreditasi sekiranya masih terdapat pembatasan pergerakan akibat COVID – 19.

Untuk IKU B.1.2 “Indeks Respon Positif terhadap Informasi Data *Economic/Market Intelligence* KBRI Wina”, KBRI / PTRI Wina menargetkan hasil survei 5 dari skala 5. Pada 2022, KBRI / PTRI Wina mendapat hasil survei 5 dari skala 5. Dengan demikian, capaian untuk IKU tersebut adalah 100%.

IKU B.1.2	Informasi Kinerja		2022
Indeks Respon Positif terhadap Informasi Data <i>Economic/Market Intelligence</i> KBRI Wina	Hasil Survei Kuesioner		5 (Skala 5)
	Realisasi		5 (Skala 5)
	Target		5 (Skala 5)
	Capaian		100 %

Tabel III.35

IKU B.1.3 Indeks respon positif terhadap informasi *Data Economic / Market Intelligence* KBRI Wina

Capaian Kinerja

Terkait data *economic / market intelligence*, KBRI/PTRI Wina telah menyusun komponen data kondisi ekonomi, tantangan yang dihadapi, proyeksi ekspor, dan strategi diplomasi ekonomi untuk negara akreditasi Austria dan Slovenia untuk periode 2022. Dari perspektif capaian kinerja, realisasi IKU “Indeks Respon Positif terhadap Informasi Data *Economic/Market Intelligence* KBRI Wina” terus membaik jika dilihat jika dibandingkan tahun sebelumnya.

IKU B.1.3	Tahun 2020			Tahun 2021			Target 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Respon Positif terhadap Informasi Data <i>Economic/Market Intelligence</i> KBRI Wina	4	1	25%	4	4	100%	5	5	100%

Tabel III.36

Apabila tren positif realisasi IKU tersebut dapat dipertahankan, maka diproyeksikan target rencana strategis 2020 – 2024 KBRI / PTRI Wina akan dapat tercapai.

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Multilateral	Target: 4 Realisasi: 1	Target: 4 Realisasi: 4	Target: 4 Realisasi: 4	Target: 4	Target: 4

Tabel III.37

Tantangan dan hambatan dalam penyusunan data *economic / market intelligence* tahun 2022 adalah masih adanya pembatasan kontak sosial akibat pandemi COVID-19, sehingga menyebabkan keterbatasan SDM dalam menyusun dokumen *economic intelligence* yang luas

cakupannya, memerlukan kedalaman analisis dan perlu melakukan pertemuan dengan *counterparts* terkait, serta koleksi data dan pengolahan data.

Sebagai upaya solusi untuk mengatasi masalah tersebut maka KBRI/PTRI Wina terus melakukan koordinasi dengan pusat, khususnya dalam pengolahan data. Ke depan akan **diproyeksikan** keperluan melakukan *market intelligence* sehingga perlu dipersiapkan jauh hari sebelumnya.

B.2 DIPLOMASI MULTILATERAL YANG KUAT DI NEGARA AKREDITASI KBRI WINA

Pada tahun 2022, KBRI/PTRI Wina menetapkan sasaran program sesuai dengan Renstra Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2024. Sasaran yang hendak dicapai dalam hal ini berkaitan dengan pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerja sama multilateral dalam rangka meningkatkan peran Indonesia di tingkat global dan mengimplementasikan komitmen nasional atas kesepakatan multilateral, khususnya pada bidang politik dan keamanan.

Peran, capaian dan implementasi komitmen tersebut diukur melalui Sasaran Strategis (SS) berjudul “Diplomasi Multilateral yang Kuat di Negara Akreditasi KBRI Wina“. Misi diplomasi polkam untuk pencapaian sasaran tersebut didasarkan pada 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu;

B.2.1 Persentase posisi / prakarsa / rekomendasi Indonesia yang diterima pada Forum Multilateral di bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya

B.2.2 Presentase posisi / Prakarsa / rekomendasi Indonesia di bidang polkam yang diterima pada forum multilateral di bidang politik, keamanan

Gambar III.13

Kedua IKU ini diharapkan dapat menunjang kinerja KBRI / PTRI Wina dalam melakukan koordinasi serta menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan bersama pemangku kepentingan terkait di dalam negeri. Selain itu, ketiga IKU ini juga bertujuan untuk mengukur sejauh mana kesepakatan kerja sama pada tingkat multilateral telah dicapai oleh KBRI/PTRI Wina yang dapat berkontribusi dalam memberikan masukan kepada para *stakeholders* terkait di dalam negeri.

Capaian Kinerja

Dalam kerangka kerja sama multilateral, sejumlah kesepakatan telah disetujui oleh Indonesia dan negara-negara lain. Berbagai bentuk kesepakatan dalam konteks kerja sama multilateral maupun prakarsa/rekomendasi nasional yang terwujud melalui forum internasional tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Indonesia dan masyarakat secara umum.

Sesuai dengan perencanaan tahun 2022, KBRI/PTRI Wina telah menetapkan target sebanyak 2 (dua) kesepakatan pada forum multilateral bidang ekonomi, sosial dan budaya. Adapun total jumlah kesepakatan berdasarkan rincian perhitungan realisasi sub-IKU Jumlah Kesepakatan Hasil Perundingan di Bidang Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah sebagai berikut:

IKU B.2.1	Informasi Kinerja	2022
Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada Forum Multilateral di bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya	Posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada Forum Multilateral di bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya	2
	Realisasi	100%
	Target	2
	Capaian	111,11%

Tabel III.38

Adapun beberapa kegiatan di mana Indonesia menyampaikan proposal dan rekomendasi dalam pertemuan multilateral antara lain:

1. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghadiri dan menjadi pembicara pada *Vienna Food Safety Forum* pada tanggal 4 Oktober 2022 dengan tema: *Cost and Benefits of Remote Audit and Verification in Regulatory Framework*.
2. Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, Bapak Isa Rachmatarwata selaku wakil *Governor of Indonesia*, berpartisipasi pada Pertemuan ke-182 *Governing Board (GB) OPEC Fund* yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2022 di Wina, Austria. Pertemuan menyepakati di antaranya anggaran administratif 2023, *Business Plan 2023-2025*, *Capital Expenditure Budget 2023-2025* dan mencatat implementasi *Strategic Framework 2030* yang telah memasuki tahap kedua.

Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada Forum Multilateral di bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya sebesar 111,11%.

Gambar III.14

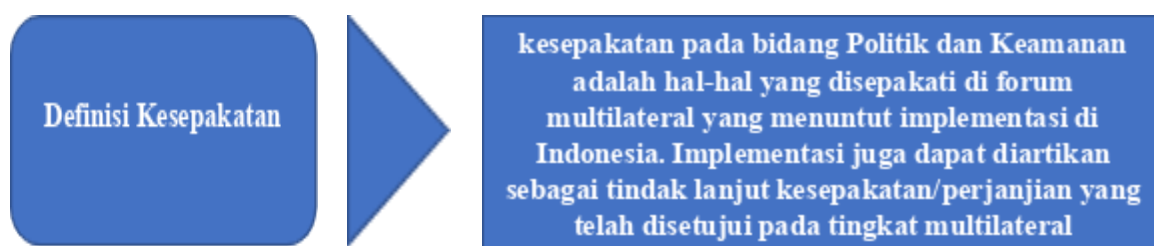
Analisis (termasuk kendala, solusi rekomendasi dan proyeksi)

Terdapat beberapa **hambatan dan tantangan** yang dihadapi antara lain masih terbatasnya pertemuan fisik di masa pandemi COVID-19 yang menyulitkan proses negosiasi *in person*. **Sebagai upaya solusi** untuk mengatasi masalah tersebut maka KBRI/PTRI Wina terus melakukan koordinasi dengan pusat, khususnya dalam proses pembahasan mengenai jadwal pertemuan dan substansi proposal ataupun rekomendasi pembahasan. Ke depan **diproyeksikan** kegiatan negosiasi di forum multilateral bidang ekonomi, sosial dan budaya akan semakin banyak sehingga memerlukan koordinasi dengan berbagai negara anggota organisasi internasional, khususnya *like minded countries*, agar posisi Indonesia dapat diterima.

IKU B.2.2 **Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada Forum Multilateral bidang Polkam**

Capaian Kinerja

Pada IKU B.2.2 ini dijelaskan mengenai persentase berbagai posisi dan rekomendasi Indonesia yang diterima di berbagai forum multilateral bidang politik dan keamanan. Diplomasi Indonesia tersebut ditujukan agar proposal atau rekomendasi diterima menjadi kesepakatan organisasi.



Gambar III.15 definisi kesepakatan

KBRI/PTRI Wina menjalankan diplomasi multilateral dalam kerangka PBB dan berbagai organisasi internasional lainnya yang berkedudukan di Wina, Austria. Pada forum-forum multilateral tersebut, KBRI/PTRI Wina telah menyampaikan posisi atau usulan terkait suatu isu tertentu baik di bidang politik keamanan. Seluruh posisi yang disampaikan oleh KBRI/PTRI Wina tersebut merefleksikan kepentingan nasional Indonesia. Semakin banyak posisi yang diterima, maka semakin besar pengaruh dan posisi tawar Indonesia di dalam forum-forum multilateral tersebut.

Adapun capaian IKU B.2.2 dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

IKU B.2.2	Informasi Kinerja	2022
Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada Forum Multilateral di bidang Polkam	Posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada Forum Multilateral di bidang Polkam	10
	Target	2
	Realisasi	500%
	Capaian	120,00%

Terdapat 10 (sepuluh) pertemuan di mana proposal, posisi dan rekomendasi Indonesia diterima pada forum kerja sama multilateral bidang polkam, yaitu:

1. **Penetapan Laboratorium BRIN sebagai *Collaborating Centre* IAEA Bidang *Climate Smart Agriculture*, Mei 2022**

- Indonesia melanjutkan peran aktif sebagai mitra IAEA dalam pengembangan teknologi nuklir dan aplikasinya untuk bidang pertanian serta pengembangan kapasitas SDM negara anggota kawasan Asia Pasifik, melalui penetapan Laboratorium Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN) BRIN sebagai *Collaborating Centre* IAEA Bidang *Climate Smart Agriculture* pada bulan Mei 2022.
- Kesepakatan antara Pemri dan IAEA ini melanjutkan kesuksesan laboratorium BATAN sebagai *collaborating centre* IAEA pada periode tahun 2017-2021 yang telah berkontribusi positif terhadap implementasi program kerja sama teknis IAEA; khususnya dalam memfasilitasi pengembangan kompetensi SDM negara anggota di kawasan Asia Pasifik, melalui *hosting* berbagai aktivitas pengembangan kompetensi, seperti *fellowship*, *training* hingga *scientific visit*.
- Kedepan, *Collaborating Centre* dimaksud memiliki potensi peran besar dalam memfasilitasi misi Pemri mendorong transfer teknologi nuklir untuk tujuan damai di Kawasan Asia Pasifik, khususnya dalam aplikasi bidang pangan yang menjadi salah satu fokus utama program kerja sama teknik IAEA di kawasan.

2. **Komitmen Kerja Sama Penguatan Regulasi Teknologi Nuklir Baru melalui kerangka inisiatif *Nuclear Harmonization and Standardization Initiative* (NHSI) IAEA, Juni 2022**

- Tren riset dan pengembangan teknologi baru dalam bidang energi nuklir telah bergulir sejak satu dekade terakhir. Seiring perkembangan teknologi baru ini yang ditandai dengan semakin dekatnya aplikasi pertama teknologi dalam industri nuklir global, Indonesia melalui Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) aktif mendorong penguatan sektor regulasi untuk menjamin keselamatan dan keamanan operasional fasilitas nuklir yang mengaplikasikan teknologi baru.
- Melalui kerangka kerjasama IAEA, Indonesia mengambil peran aktif dalam inisiatif *Nuclear Harmonization and Standardization Initiative* (NHSI) yang mengajak negara anggota membahas penyelarasan regulasi dan pengembangan teknologi baru. Dalam peluncuran inisiatif NHSI, Indonesia berkomitmen berkontribusi dalam penguatan standar regulasi teknologi baru energi nuklir melalui pengiriman pakar dalam pembahasan dokumen NHSI mulai bulan Juni 2022. Pembahasan akan dilanjutkan dalam periode tahun anggaran 2023.

3. **Komitmen Politik dalam kerangka kerjasama *Regional Cooperation Agreement* (RCA) IAEA, September 2022**

- Indonesia mengambil peran aktif dalam negosiasi pembahasan tindak lanjut pengembangan kerangka kerja sama *Regional Cooperation Agreement* (RCA)

IAEA dalam rangkaian IAEA *General Conference* ke-66 yang diselenggarakan pada tanggal 26-30 September 2022 di Wina, Austria. Indonesia turut mendorong *refocusing* program kerja sama RCA untuk diarahkan pada bidang-bidang strategis sesuai kebutuhan teknis negara pihak di kawasan.

- Komitmen Pemri bersama negara pihak RCA lainnya diwujudkan melalui penandatanganan *Ministerial Declaration RCA* yang sekaligus memperingati 50 tahun implementasi kerangka kerjasama RCA pada tanggal 27 September 2022.

4. **Kerja Sama Penguatan Riset Transisi Energi dan Lingkungan di bawah Kerangka Ketetuaan G20 Indonesia, April - Oktober 2022**

- Untuk mendukung keberhasilan program G20 selama periode Ketetuaan Indonesia pada tahun 2022, Indonesia menjalin kerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) khususnya dalam penguatan riset dan aplikasi teknologi nuklir untuk mendukung transisi energi bersih dan untuk bidang lingkungan.
- Selama periode ketetuaan Indonesia, dilaksanakan beberapa *workshop* teknis terkait *clean energy transition* yang difasilitasi oleh Departemen Kerjasama Teknis IAEA, serta pembahasan aplikasi teknologi nuklir untuk penanganan permasalahan limbah plastik dengan memanfaatkan aplikasi teknologi radiasi.

5. **Komitmen Kerja Sama Penyelenggaraan *Postgraduate Educational Course in Radiation Protection and the Safety of Radiation Sources (PGEC)*, November 2022**

- Indonesia mengambil peran aktif dalam penguatan rezim keselamatan nuklir melalui berbagai forum kerjasama dibawah kerangka IAEA, yang salah satunya diwujudkan melalui komitmen Pemri menjadi *host* kegiatan tahunan *Postgraduate Educational Course in Radiation Protection and the Safety of Radiation Sources (PGEC)* mulai tahun 2023. Proposal Indonesia diterima pertemuan.
- Pembahasan yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasion bersama KBRI/PTRI Wina dan Departemen Kerja Sama Teknis serta Departemen Keselamatan dan Keamanan Nuklir IAEA pada bulan November 2022, menghasilkan kesepakatan penyelenggaraan kegiatan PGEC di Indonesia mulai tahun 2023.
- Melalui kerja sama penyelenggaraan *PGEC* ini, Indonesia memberikan bantuan peningkatan kapasitas SDM keselamatan nuklir bagi 18 negara anggota di kawasan yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan rezim keselamatan nuklir global.

6. **Kesepakatan Kerangka Kerja Sama Pengembangan Kompetensi SDM Riset Nuklir, 27 September 2022**

- Indonesia menempatkan aspek pengembangan kapasitas SDM riset bidang teknologi nuklir untuk tujuan damai sebagai salah satu fokus utama penguatan riset

dan aplikasi teknologi nuklir untuk tujuan damai. Dalam berbagai forum, termasuk IAEA, Indonesia selalu menyuarakan penguatan kerjasama multilateral dan bilateral untuk pengembangan kapasitas SDM dalam bidang riset teknologi nuklir.

- Dalam rangkaian IAEA General Conference ke-66, Indonesia menyelenggarakan *side event* bertajuk “*Promoting Capacity Building in Nuclear Science and Technology*”. Dalam kesempatan yang sama Pemri melalui Badan Riset dan Inovasi Nuklir (BRIN) menandatangani perjanjian kerja sama dalam bidang pengembangan kompetensi SDM riset nuklir bersama *International Institute of Nuclear Energy (I2EN)* Perancis dan *Tomsk Polytechnic University* Rusia.
- Kerja sama yang dijalin diharapkan dapat memfasilitasi pengembangan kapasitas SDM dan transfer teknologi nuklir untuk tujuan damai antara Indonesia dengan negara sahabat.

7. Komitmen politik terkait upaya “*Strengthening the international legal framework for international cooperation to combat and prevent illicit trafficking in specimens of wild fauna and flora*”, Mei 2022

- Indonesia telah berkontribusi dalam rangkaian *negosiasi draft resolusi “Strengthening the international legal framework for international cooperation to combat and prevent illicit trafficking in specimens of wild fauna and flora”* yang dihasilkan dalam pertemuan *the 31st Session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice*, di Wina, Austria, 16-20 Mei 2022.
- Ranres yang berhasil diadopsi pada sesi ke-31 CCPCJ ini salah satunya akan menjajaki Protokol tambahan di bawah UNTOC mengenai Perdagangan Gelap Spesimen Fauna dan Flora Liar, dan pada isu-isu dan hal lainnya yang termasuk didalamnya.
- Selain itu, negara-negara juga sepakat untuk memperhatikan dampak perdagangan satwa liar yang dapat menyebabkan wabah penyakit, epidemi dan, dalam kasus ekstrim, pandemi, yang mungkin menjadi ancaman tidak hanya bagi lingkungan dan keanekaragaman hayati, tetapi juga bagi kesehatan manusia dan pembangunan ekonomi.

8. Komitmen Politik “*Strengthening national and international efforts, including with the private sector, to protect children from sexual exploitation and abuse*”, Mei 2022

- Indonesia telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam rangkaian *negosiasi draft resolusi “Strengthening national and international efforts, including with the private sector, to protect children from sexual exploitation and abuse”* yang diselenggarakan dalam pertemuan *the 31st Session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice*, di Wina, Austria, 16-20 Mei 2022.
- Resolusi ini memberikan perhatian terhadap maraknya eksploitasi dan *abused* terhadap anak untuk tujuan seksual di dunia digital dan mendorong negara-negara

untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan termasuk melalui kerangka *public private partnership*, khususnya *internet service provider*.

- Ranres juga mendorong negara-negara untuk menyusun suatu upaya yang efektif untuk meningkatkan kapasitas sistem peradilan guna mencegah dan menanggulangi eksploitasi dan pelecehan seksual anak. Dalam hal ini, termasuk melalui pelatihan tentang pendekatan yang berpusat pada korban dan *trauma-centered*, untuk membangun kepercayaan publik untuk terlibat dan melaporkan kasus-kasus kepada penegak hukum.

9. Komitmen Politik “Promoting alternative development as a development-oriented drug control strategy, taking into account measures to protect the environment”, Maret 2022

- Kesepakatan mengenai perlunya program *alternative development* yang mempertimbangkan upaya perlindungan lingkungan, dituangkan dalam bentuk resolusi yang dihasilkan dalam pertemuan *the 65th Session of the Commission on Narcotic Drugs* yang diselenggarakan pada 14-18 Maret 2022 di Wina, Austria.
- Indonesia terlibat sejak awal proses negosiasi *text* yang bertujuan untuk mendorong program *alternative development* sebagai bagian dari upaya pencegahan peredaran dan perdagangan narkoba.
- Resolusi tersebut menggarisbawahi pentingnya program *alternative development* yang juga memperhatikan upaya perlindungan lingkungan. Resolusi tersebut juga menekankan perlunya partisipasi berbagai elemen masyarakat, termasuk perempuan dalam pelaksanaan program *alternative development*.

10. Kesepakatan dalam negosiasi *Ad Hoc Committee to Elaborate an International Convention on Countering the Use of ICTs for Criminal Purposes*

- Rangkaian Negosiasi *draft* Konvensi PBB mengenai Siber dalam kerangka *Ad Hoc Committee to Elaborate an International Convention on Countering the Use of ICTs for Criminal Purposes* (AHC) telah bergulir sejak awal tahun 2022.
- Pemri yang diwakili KBRI/PTRI Wina, PTRI New York dan perwakilan dari Unsur Pusat telah mengikuti rangkaian negosiasi yang berlangsung.
- Pada tahun ini terdapat 3 sesi negosiasi yaitu Sesi Pertama 28 Februari – 11 Maret 2022 di New York, Sesi Kedua 30 Mei – 10 Juni 2022 di Wina, dan Sesi Ketiga 29 Agustus – 11 September 2022 di New York.
- Salah satu kesepakatan penting pada guliran negosiasi tersebut yaitu disepakatinya *Road Map* pelaksanaan negosiasi hingga sesi ketujuh AHC yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
- AHC juga telah menyepakati *draft* sistematika Konvensi yang akan memuat antara lain Bab yaitu Bab *General Provision*, Bab *Kriminalisasi*, Bab *Procedural Law* dan

Penegakkan Hukum, Bab Kerja Sama Internasional, Bab Bantuan Teknis dan Pencegahan.

- Negara-negara juga telah menyampaikan masukan mengenai elemen-elemen yang perlu masuk dalam *draft* Konvensi yang dituangkan dalam *consolidated negotiating document*.

Berkaitan dengan posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang Polkam, pada tahun 2022 KBRI/PTRI Wina telah menghadiri rangkaian pertemuan multilateral di bawah kerangka IAEA, CTBTO, UNODC, UNSCEAR dan UNCOUOS. Pada sidang-sidang tersebut, Indonesia aktif berkontribusi menyampaikan posisi atau rekomendasi terkait isu-isu yang tengah dibahas, antara lain:

A. *International Atomic Energy Agency (IAEA)*

Kerja sama RI-IAEA yang difokuskan pada 3 pilar utama IAEA yakni aplikasi iptek nuklir, menjamin keselamatan dan keamanan nuklir, serta mengimplementasikan *nuclear safeguards and verification*. Secara umum, kebijakan Indonesia dalam forum IAEA dapat dijabarkan sebagai berikut.

- Mendukung implementasi aplikasi teknologi nuklir untuk tujuan damai, terutama di sektor pangan, kesehatan, dan lingkungan;
- Mendukung upaya IAEA membantu negara berkembang dalam penguasaan dan pemanfaatan iptek nuklir melalui program *Technical Cooperation*;
- Mendorong pengalokasian pendanaan dan kegiatan IAEA yang memberi manfaat bagi negara berkembang;
- Mendorong keseimbangan alokasi pendanaan dan kegiatan IAEA antara isu promosional dan isu non-promosional;
- Mendukung peran IAEA menjaga perdamaian dunia a.l. melalui verifikasi *Joint Comprehensive Programme Action (JCPOA)* sesuai mandat Resolusi DK PBB 2231;
- Berkontribusi I sebagai *External Auditor* IAEA dalam upaya mempertahankan IAEA sebagai organisasi yang transparan dan kredibel;
- Mendukung inisiatif program baru IAEA dalam peningkatan kapasitas SDM nuklir global diantaranya melalui program MSCFP, Renual+ dan *Safeguards Traineeship*;
- Mendukung peran serta IAEA dalam menanggulangi pandemi COVID-19 melalui program bantuan dan inisiatif penanggulangan *zoonotic disease*; serta
- Menyatakan kesediaan Indonesia berpartisipasi dalam proyek penanganan limbah plastik oleh IAEA (Nutec Plastic).

Sepanjang tahun 2022 Indonesia berperan aktif melalui KBRI/ PTRI Wina dalam sejumlah pertemuan utama IAEA yakni *General Conference*, *International Conferences* dan Pertemuan *Board of Governors (BoG)*, serta kerja sama bilateral Indonesia – IAEA dalam lingkup kerja sama teknis. *Highlight* posisi/prakarsa pada rangkaian pertemuan IAEA sebagai berikut:

1. Board of Governors IAEA

Dalam pertemuan-pertemuan BoG Januari – Desember 2022 Indonesia berperan aktif dalam pembahasan berbagai isu, antara lain:

- a. Pertemuan sesi sidang istimewa ke-1658 *Board of Governors of IAEA* (BoG) di Wina tanggal 23 Desember 2022 yang membahas proposal revisi *Regular Budget* IAEA tahun 2023 dan *draft provisional agenda* sesi sidang istimewa *General Conference* IAEA ke-3 tanggal 27 Januari 2023. Pertemuan BoG berhasil mengadopsi secara konsensus proposal revisi anggaran rutin dan *Technical Cooperation Fund* (TCF) Target IAEA tahun 2023. Pertemuan BoG juga berhasil mengadopsi usulan rencana penyelenggaraan sesi sidang istimewa *General Conference* IAEA ke-3 yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Januari 2023 untuk mengesahkan revisi anggaran IAEA tahun 2023 serta data kontribusi negara anggota terhadap anggaran rutin tahun 2023.

- b. Pertemuan *Board of Governors* di Wina, 16-18 November 2022 yang membahas:

Pertemuan telah mengadopsi 2 (dua) resolusi, yaitu; (i) Resolusi mengenai *NPT Safeguards Agreement with the Islamic Republic of Iran*, dan (ii) Resolusi *Nuclear Safety, Security and Safeguards in Ukraine*. Indonesia sebagai *observer* BoG menyampaikan 3 (tiga) *statements*, yaitu pada agenda: (i) verifikasi dan *monitoring* Nuklir Iran / JCPOA; (ii) *Safeguard* Nuklir Iran; dan (iii) *Agenda Any Other Business* (terkait NNP dan G20).

- c. Pertemuan sesi ke-1650 *Board of Governors of IAEA* tanggal 3 Oktober 2022 yang berhasil menetapkan *Chair* dan *Vice Chairs* BoG untuk periode 2022-2023. Pertemuan juga menetapkan agenda pemilihan Direktur Jenderal IAEA untuk masa jabatan tahun 2023-2027 dan kalender pertemuan BoG tahun 2022-2023.

- d. Pertemuan *Board of Governors* di Wina, Austria, tanggal 12-16 September 2022 yang membahas beberapa isu seperti isu kerja sama trilateral Australia, Inggris dan Amerika Serikat (AUKUS) terkait akuisisi *naval nuclear propulsion* (NNP) , isu nuklir Ukraina, nuklir Iran, nuklir Korut dan nuklir Syria serta pencegahan nuklir dan *Weapon of Mass Destruction* (WMD) di Timur Tengah. Pertemuan juga menyepakati resolusi mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Zaporizhzhia (*Zaporizhzhia Nuclear Power Plant/ ZNPP*) melalui *voting*. Karena pertentangan antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan negara-negara AUKUS, terdapat 3 mata Agenda yang membahas NNP yaitu: (i) Agenda 8.d (usulan Amerika Serikat/AS; (ii) Agenda 10 (usulan RRT); dan Agenda 13 - *Any*

Other Business (usulan Dirjen IAEA).

- e. Pertemuan *Board of Governors* di Wina, Austria, tanggal 6-10 Juni 2022 yang membahas salah satu isu utama, yaitu proyek kepemilikan kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia dalam kerangka AUKUS yang telah dibahas untuk ketiga kalinya dalam Pertemuan BoG IAEA Juni 2022.

2. General Conference

Sesi ke-66 General Conference IAEA diselenggarakan pada tanggal 26-30 September 2022. Pertemuan menghasilkan berbagai resolusi. Indonesia merupakan *penholder* resolusi terkait *Food and Agriculture* yang telah berhasil diadopsi.

Delegasi RI telah menyampaikan *statement* nasional dalam agenda *general debate* dan sejumlah mata agenda pertemuan, terlibat dalam pembahasan rancangan resolusi, dan melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan sejumlah negara anggota maupun IAEA, serta menyelenggarakan sebuah *side event*.

Isu perlindungan fasilitas nuklir di Ukraina dan kerja sama *naval nuclear propulsion* (NNP), termasuk AUKUS, sangat mewarnai proses pembahasan sejumlah mata agenda baik dalam *plenary* maupun *committee of the whole* (CoW).

Pertemuan mencatat laporan Dirjen IAEA yang menjelaskan mengenai beberapa hal, antara lain:

- a. Perkembangan terkini kelangkaan energi global dan *food security* serta perkembangan situasi di Ukraina;
- b. Perlu upaya kolektif mencegah insiden nuklir di Ukraina. DG IAEA telah empat kali melakukan kunjungan ke Ukraina, termasuk kunjungan ke fasilitas nuklir Zaporizhzhia dan Chernobyl. DG IAEA terus berkonsultasi dengan Rusia dan Ukraina mengenai upaya pembentukan *nuclear safety and security protection zone*;
- c. Pemanfaatan teknologi nuklir bagi penanganan *zoonotic disease outbreak*, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ketahanan pangan dan krisis air serta pengobatan kanker dan penanganan limbah di laut serta pemanfaatan energi hijau nuklir;
- d. *Update* perkembangan pembahasan *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material* (CPNNM), pelaksanaan *the First International Conference on Nuclear Law: The Global Debate* tahun 2022;

- e. Kelanjutan negosiasi JCPOA dan komunikasi yang terus dibangun antara IAEA dengan Iran. Untuk Korea Utara, Dirjen mengungkapkan adanya kendala untuk membangun komunikasi;
- f. Mengenai isu *Naval Nuclear Propulsion* (NNP), DG IAEA tekankan perlunya solusi/jawaban teknis dalam kerangka hukum yang ada. Sekretariat masih terus melakukan konsultasi dengan para pihak AUKUS. Sekretariat juga baru pertama kali melakukan konsultasi dengan Brazil, Argentina dan *the Brazilian-Argentine Agency for Accounting and Control of Nuclear Materials* (ABACC) terkait NNP; dan
- g. Komitmen IAEA untuk terus memberikan *technical assistance*, mempertimbangkan *gender equality* dan *geographical distributions* dalam manajemen sumber daya manusia sekretariat.

Kepala BRIN selaku *Head of Delegation* menyampaikan *General Statement Indonesia* yang pada intinya sebagai berikut: (i) Memperkenalkan BRIN sebagai lembaga baru Pemerintah Indonesia yang memiliki peran untuk mengembangkan kebijakan untuk memperkuat, meningkatkan dan mempercepat peningkatan kapasitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk bidang nuklir; (ii) menegaskan kesiapan tingkatkan kerja sama berbagai program dengan IAEA, termasuk inisiatif *pilot program* daur ulang sampah plastik *Nuclear TEChnology (NUTEC) Plastic*, serta program deteksi awal penyakit zoonotik (ZODIAC); (iii) menyampaikan apresiasi Pemri terhadap partisipasi IAEA dalam pertemuan di bawah presidensi G20 Indonesia, termasuk dengan keterlibatan pakar IAEA pada Pokja *Energy Transition* yang berlangsung Juni lalu; (iv) menegaskan harapan agar seluruh negara anggota menjaga perdamaian dunia dan mewujudkan dunia yang bebas senjata nuklir, serta menekankan pentingnya non-proliferasi dan perlucutan senjata, serta pembahasan isu kapal selam bertenaga nuklir (*nuclear naval propulsion*) untuk memastikan *safeguards* IAEA terjamin; dan (v) kembali menegaskan posisi nasional mengenai isu *Naval Nuclear Propulsion* sebagaimana tertuang dalam *working paper* di pertemuan *Non-Proliferation Treaty Review Conference* lalu serta perlunya solusi/*technical answers* mengenai NNP berdasarkan sistem pengaturan yang saat ini berlaku. Pengaturan diperlukan bagi *ongoing and similar future programs*, sebab pengembangan NNP oleh negara non senjata nuklir merupakan sebuah preseden.

3. **The First International Conference on Nuclear Law**

Pertemuan *the 1st the First International Conference on Nuclear Law: The Global Debate* telah berlangsung di Wina, Austria pada tanggal 25-29 April 2022.

Pertemuan ini merupakan forum kajian pengembangan hukum nuklir internasional yang diinisiasi IAEA. Pertemuan sesungguhnya merupakan wadah para pakar untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi mengenai berbagai isu yang belum diatur (*legal vacuum*) atau tidak jelas (*unclear*) pengaturannya atau tidak efektif implementasinya.

Berbagai bahan presentasi yang dikaji dapat digunakan bagi Pemri untuk merumuskan posisi nasional pada *norm setting process* isu nuklir di IAEA atau isu-isu terkait nuklir di forum internasional lainnya.

Bahan kajian dalam Konferensi juga dapat digunakan untuk melakukan *gap analysis* ketentuan hukum nuklir di level domestik nasional dan di level internasional.

4. **Penetapan Kerangka Kerjasama TC RI – IAEA tahun 2022-2023**

Kerangka kerjasama *Technical Cooperation* RI-IAEA untuk tahun 2022-2023 yang telah ditetapkan pada akhir November 2021 menjadi dokumen acuan perencanaan program kerjasama teknis nasional Indonesia dengan IAEA pada siklus tahun anggaran 2022-2023 yang akan difokuskan pada 5 bidang utama kerjasama, sesuai dengan *Country Programme Framework* (CPF) Indonesia-IAEA periode 2021-2024. Kerangka kerjasama ini juga diselaraskan dengan program strategis IAEA pada tingkat regional Asia Pasifik pada bidang penanganan penyakit zoonotik dan limbah plastik.

B. **United Nations Office of Drugs and Crimes (UNODC)**

Kejahatan lintas negara terorganisir (*transnational organized crimes*) terus berkembang dengan berbagai modus operandinya di tengah situasi pemulihan pandemi COVID-19. Berbagai bentuk kejahatan lintas negara terorganisir seperti korupsi, pencucian uang, peredaran dan perdagangan gelap obat-obatan terlarang, perdagangan orang, penyelundupan manusia serta berbagai bentuk baru kejahatan lintas negara

lainnya seperti kejahatan siber, kejahatan terkait pemalsuan identitas (*identity-related crime*), perdagangan barang bersejarah dan budaya (*trafficking in cultural property*), kejahatan satwa liar dan kehutanan (*Wildlife and forest crime*), serta kejahatan pemalsuan alat-alat dan produk kesehatan (*crime in falsified products*), menuntut kerja sama yang lebih erat di antara negara-negara.

Presiden ECOSOC saat sesi pembukaan *the 31st Session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ)* yang berlangsung di Wina, Austria 16-20 Mei 2022 di Wina, Austria, menyebutkan pandemi COVID-19 telah memberikan tantangan terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, khususnya dengan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh jaringan kriminal untuk melaksanakan berbagai aksinya.

Karena itu, di sepanjang tahun 2022, Indonesia terus berkontribusi dan memainkan peran aktif dalam berbagai pembahasan di bawah kerangka *UN Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*, *UN Convention against Corruption (UNCAC)*, *Single Convention on Narcotic Drugs 1961*, *Convention on Psychotropic Substances 1971*, dan *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*.

Beberapa pertemuan dalam kerangka kerja sama pencegahan dan penanggulangan kejahatan lintas negara terorganisir pada tahun 2022 yang dapat di-*highlight* sebagai berikut:

Kerja Sama Terkait Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Gelap Obat-Obatan Terlarang

1. *The 65th Session of the Commission on Narcotic Drugs, Wina, Austria*

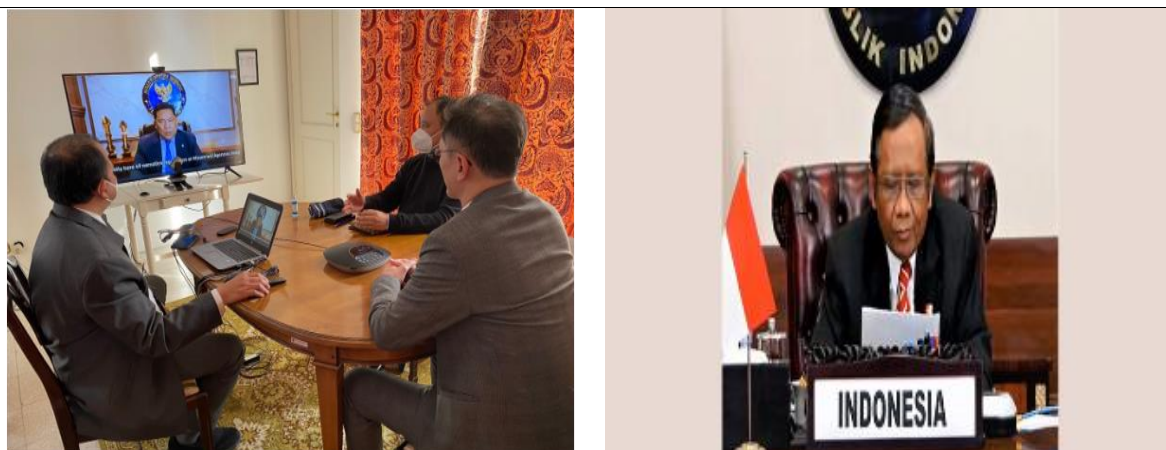


Foto III.32

Pertemuan *the 65th Session of the Commission on Narcotic Drugs (CND)* yang diselenggarakan di Wina, Austria. Pada 14-18 Maret menjadi forum bagi negara-negara untuk bertukar informasi mengenai *trend* dan upaya pencegahan serta penanggulangan terkini kejahatan peredaran gelap narkoba yang terus berkembang di tengah situasi pemulihan ekonomi negara-negara dari Pandemi COVID-19.

Pertemuan yang dilaksanakan dalam format *hybrid* sehubungan masih merebaknya pandemi COVID-19 menghasilkan sejumlah kesepakatan penting di antaranya diadopsinya resolusi mengenai upaya mempromosikan pencegahan dini berbasis bukti yang komprehensif dan ilmiah terkait isu narkoba.

Indonesia c.q KBRI/PTRI Wina berkontribusi dalam rangkaian negosiasi *text* berbagai *draft resolusi* yang dilaksanakan pada saat pertemuan berlangsung. Selain itu, sejumlah kepentingan Indonesia telah terefleksikan dalam beberapa resolusi tersebut, diantaranya terkait upaya mendorong peran kalangan muda dalam pencegahan narkoba, mendorong kerja sama yang lebih erat di antara negara anggota, hingga perlunya upaya serius terkait pencegahan.

Kepala Badan Narkotika Nasional RI yang memimpin Delri dengan beranggotakan unsur dari Kementerian Kesehatan, Kementerian War Negeri, Kepolisian RI, BNN, Badan POM telah menyampaikan pernyataan nasional yang memuat mengenai 3 (tiga) strategi Indonesia untuk mengatasi masalah narkoba yang mencakup:

- a. Pelibatan seluruh stakeholder untuk implementasi Renaksi Nasional Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika 2020-2024;
- b. Perbaikan kebijakari terhadap narkoba untuk meningkatkan efektivitasnya. Saat mi terdapat 49 peraturan nasional terkait narkoba dan 142 peraturan daerah terkait narkoba;
- c. Pengetatan keamanan di perbatasan dan pintu masuk untuk meningkatkan ketahanan negara terhadap potensi masuknya narkoba dari luar negeri; d. Indonesia menegaskan kembali pencalonan Indonesia sebagai anggota CND 2024-2027 dan meminta dukungan dari negara-negara anggota.

2. The 31th Session of Crime Prevention and Criminal Justice, Wina



Foto III.33

Sesi ke-31 *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* (CCPCJ) yang diselenggarakan secara *hybrid* di Wina, Austria, tanggal 16-20 Mei 2022 telah menghasilkan sejumlah komitmen penting dalam mendorong upaya pencegahan dan penegakkan hukum terkait kejahatan pidana.

Delegasi RI dipimpin oleh Dubes/Watap RI Wina, dengan Sekretaris Utama BNPT sebagai Alternate HoD, dan beranggotakan unsur dari BNPT, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, dan KBRI/PTRI Wina.

Sekretaris Utama BNPT telah menyampaikan *national statement* Indonesia yang menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi dalam negosiasi *draft* Konvensi PBB mengenai siber yang sedang berlangsung. Selain itu, Indonesia juga mengangkat mengenai kebijakan Indonesia memberlakukan *restorative justice*, serta mendorong upaya perlindungan yang komprehensif terkait anak yang terasosiasi dengan terorisme.

Selama sesi pertemuan, KBRI/PTRI Wina terlibat dalam pembahasan negosiasi *text* rancangan resolusi sebagai berikut:

- a. Resolusi L.2. *Strengthening the international legal framework for international cooperation to combat and prevent illicit trafficking in specimens of wild fauna and flora.*
- b. Resolusi L.3. *Follow-up to the Fourteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice and Preparations for the Fifteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice.*
- c. Resolusi L.4. *Reducing reoffending through rehabilitation and reintegration.*
- d. Resolusi L.5. *Promoting effective national legal frameworks to protect children from sexual exploitation and abuse by engaging in and fostering multi-stakeholder responses, including public-private partnerships.*

C. United Nations Convention against Corruption (UNCAC)

Dalam kerangka kerja sama UNCAC, terdapat 5 (lima) pertemuan besar yang dilaksanakan dan menghasilkan *outcome document* penting, yaitu:

1. Sesi ke-13 Implementation Review Group of the United Nations Convention Against Corruption (IRG UNCAC), Wina, Austria, 13-17 Juni 2022

Pertemuan Sesi ke-13 IRG UNCAC dihadiri oleh Delegasi RI yang terdiri dari unsur Kemlu, KPK, Kejaksaan Agung, Polri, dan KBRI/PTRI Wina secara *hybrid*. Pertemuan menjadi venue untuk menyampaikan perkembangan proses review implementasi UNCAC oleh negara-negara pihak. Indonesia dalam statementnya menyampaikan telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi dari hasil review implementasi UNCAC. Kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk menginformasikan mengenai prioritas keketuaan Indonesia pada G20 ACWG. Delegasi KPK telah menjadi panelis pada mata agenda (5) *Technical Assistance* dan menyampaikan paparan mengenai "*Developing Fraud Detection System in the Public Procurement*"



Foto III.34

2. The 16th Session of the Open-Ended Working Group on Asset Recovery, 7-11 November 2022

The 16th Session of the Open-Ended Working Group on Asset Recovery, 7-11 November 2022 yang diselenggarakan di Wina, Austria berbagai upaya dan tantangan dalam pengembalian aset hasil korupsi.

Salah satu yang dihasilkan yaitu Sharm El Sheikh Declaration on strengthening international cooperation in the prevention of and fight against corruption during times of emergencies and crises response and recovery.

Salah satu yang dihasilkan yaitu Sharm El Sheikh Declaration on strengthening international cooperation in the prevention of and fight against corruption during times of emergencies and crises response and recovery.

Pada sesi ini, Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK, telah menyampaikan intervensi yang memuat pokok-pokok sebagai berikut:

- a. Indonesia aktif dalam mendorong kerja sama pemulihan dan pengembalian aset hasil korupsi melalui kerja sama formal maupun informal. Terkait MLA, Indonesia memiliki sepuluh perjanjian bilateral dan satu perjanjian regional dengan ASEAN. Indonesia juga aktif dalam berbagai jaringan kerja sama seperti ARIN-AP, CARIN dan GlobE;
- b. Indonesia juga sampaikan keberhasilan dalam membantu Italia dan Belanda dalam memulangkan aset hasil kejahatan dengan skema *Business Email Compromise*;
- c. Pada Januari 2022, sebesar 5.9 juta US dollar berhasil dipulihkan dan dikembalikan ke Indonesia Indonesia atas kerja sama instansi di Indonesia dan Amerika Serikat;
- d. Sejumlah kendala dalam pengembalian aset seperti sistem hukum yang berbeda, tidak adanya dasar hukum untuk kerja sama, interpretasi yang ketat dari prinsip-prinsip hukum, dan adanya kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi; dan

- e. Meminta UNDOC mendorong negara untuk tingkatkan kerjasama dan menciptakan kondisi yang mendukung upaya pelacakan dan pemulihan aset. Pada Konferensi ini, Pemri yang diwakili Wakil Ketua KPK menyampaikan tiga rekomendasi dalam mencegah dan melawan korupsi.

3. The 11th Session of the Open-ended Meeting to Enhance International Cooperation, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

The 11th Session of the Open-ended Meeting to Enhance International Cooperation, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) diselenggarakan di Wina, Austria, pada 7-11 November 2022.

Delegasi RI dipimpin oleh Wakil Kepala Perwakilan KBRI/PTRI Wina dengan alternate Head of Delegation, Direktur Pengembangan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK dan Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK serta beranggotakan unsur dari Kejaksaan, Polri, KPK dan KBRI/PTRI Wina yang hadir secara *in persons*.

Diskusi panel telah dilaksanakan pada sesi pertemuan ini yang salah satunya menekankan pentingnya penggunaan ICTs untuk mendorong kerja sama internasional terkait MLA utamanya pada masa darurat dan pemulihan.

D. Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization (CTBTO)

Pada tahun 2022, KBRI/PTRI Wina telah menorehkan sejumlah posisi/prakarsa penting pada serangkaian pertemuan organ utama CTBTO, yaitu: (i) *Preparatory Commission* (PrepCom); (ii) *Working Group A*; dan (iii) *Working Group B*.

Dalam berbagai kesempatan, Pemerintah RI senantiasa menekankan pentingnya CTBT sebagai rezim internasional untuk perlucutan dan non-proliferasi senjata nuklir yang memiliki tujuan untuk mencegah dan menghapuskan uji coba nuklir secara komprehensif dalam rangka mencapai dunia yang bebas dari senjata nuklir dan mendorong penggunaan nuklir secara damai.

Terkait *entry into force* Traktat CTBT, KBRI/PTRI Wina dalam berbagai perundingan mendorong pentingnya universalisasi Traktat agar semakin banyak negara yang menjadi pihak dan pemberlakuan CTBT serta meminta agar negara-negara, terutama negara-negara pada *Annex II* CTBT yang belum meratifikasi, dapat segera melakukan proses ratifikasi. PTRI Wina juga berperan aktif dalam pembahasan *Article XIV Conference*.

Dalam hal pemanfaatan teknologi nuklir secara damai untuk tujuan sipil dan ilmiah, melalui rejim verifikasi dan *monitoring*, Indonesia selalu menekankan bahwa pengembangan kapasitas dan program pelatihan perlu memperhatikan 4 (empat) pillar utama CTBTO penting bagi pengembangan dan kemampuan *Signatory States*, terutama bagi negara-negara berkembang.

Sehubungan dengan keterwakilan pada organ-organ CTBTO, Indonesia terus mengupayakan agar *geographical distribution and gender balance* dalam rekrutmen PTS di semua *level* pada organ-organ CTBTO dapat ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan semakin banyak pejabat dari negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Indonesia juga mendorong maksimalisasi anggaran CTBT untuk kepentingan *capacity building* dan kerja sama dengan negara anggota.

Pada tahun 2022 terdapat berbagai isu mengemuka dalam pembahasan di forum CTBTO, antara lain:

- a. Pada isu *norm setting* mengemuka beberapa topik utama yaitu keberlakuan (*entry into force*) traktat CTBT dan universalisasi traktat dan bertambahnya keanggotaan beberapa negara baru negara pada traktat CTBT, yaitu Dominika, Equatorial Guinea, São Tomé dan Príncipe, serta Timor-Leste;
- b. Isu kaitan antara *Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT) dan CTBTO yang saling *interconnected*;
- c. Penyelenggaraan *special session of the United Nations General Assembly on the occasion of the International Day Against Nuclear Tests* dan pertemuan *the Friends of the CTBT summit*;
- d. Isu *management CTBTO* di mana audit menemukan bahwa pengangkatan dan perpanjangan masa jabatan 2 orang Direktur CTBT tidak sesuai dengan prosedur internal.
- e. Penyelenggaraan *CTBTO Science Diplomacy Symposium* pada tanggal 6-9 Desember 2022;
- f. Indonesia juga memainkan peran dalam pembahasan berbagai isu seperti misalnya pembahasan mengenai pembentukan *Chief of Cabinet* pada *Office of Executive Secretary*, pemilihan *External Auditor* periode 2022 – 2023;
- g. Isu *Developing guidelines for holding non-scheduled sessions of the Commission*
- h. Isu *Guidance on the Future Use of Radioxenon Background Measurement Systems* di mana berbagai negara masih belum sepakat mengenai upaya penyusunan *guidelines*;
- i. Isu kenaikan anggaran CTBTO tahun 2023 di mana kontribusi tahunan Indonesia mengalami kenaikan kontribusi. Sesuai *2023 Scale of Assessments for Contributions of States Signatories Based on General Assembly Resolution* (Dok. A/RES/76/238) kontribusi Indonesia tahun 2023 naik dari 0.549% menjadi 0.562%.
- j. Pembahasan *Election of Officers*, khususnya kegagalan kelompok *Middle East and South Asia* (MESA) dalam mencalonkan ketua bagi *Preparation Committee* tahun 2023.

Selain itu, Indonesia juga memainkan perannya sebagai *bridge builder* sebagaimana dipercayai oleh kelompok *G-77 and China Chapter Vienna*. Dalam kaitan tersebut, Indonesia senantiasa memainkan perannya guna memfasilitasi pembahasan *Statements of Group 77 and China* untuk seluruh pertemuan *Working Group A, Working Group B*, dan *PrepCom CTBTO* pada tahun 2022.

Di bidang pelatihan dan *capacity building*, KBRI/PTRI terus mendorong agar Indonesia memperoleh berbagai program bantuan kerja sama dari Sekretariat CTBTO. Di bidang

kerja sama bilateral, pada tahun 2022, Indonesia juga telah mengembangkan kerja sama antara lain:

- (i) Kesiapan untuk menjadi tuan rumah (*host*) bagi *CTBTO Regional Infrasound Training and Workshop* tahun 2023;
- (ii) Permintaan untuk mendapatkan *Capacity Building within the NCD For All Initiative*; dan
- (iii) Pengembangan implementasi *Tsunami Warning Arrangement between Indonesia and CTBTO signed on 10 November 2008*.

Selama tahun 2022 juga telah dilakukan rangkaian pertemuan tingkat tinggi, antara lain:

- (i) *Bilateral meeting* Dr. Floyd dengan ketua Delri pada *the Tenth Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* di New York pada bulan Januari 2022;
- (ii) *Bilateral Meeting* Sestama BMKG dan Dr. Floyd di sela-sela *the 144th Assembly and related meetings of Inter-Parliamentary Union*, Bali, 23 Maret 2022; dan
- (iii) *Bilateral Meeting Ambassador* Dr. iur. Damos Dumoli Agusman dengan Dr. Robert Floyd pada tanggal 3 Maret 2022.

E. United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS)

Indonesia berperan aktif dalam pembahasan organ utama UNCOPUOS, yaitu: (i) *Scientific and Technical Subcommittee*, (ii) *Legal Subcommittee*; dan (iii) Komite UNCOPUOS. Ketiganya didirikan berdasarkan keputusan SMU PBB tahun 1961 untuk membahas isu penggunaan ruang angkasa secara damai sebagaimana diatur dalam berbagai *instrument* hukum internasional seperti *Moon Treaty* 1967 dan perjanjian-perjanjian internasional PBB lainnya. Terdapat beberapa isu mengemuka selama tahun 2022, antara lain:

- a. Adanya usulan LAPAN yang berkeinginan untuk mengajukan nama sebagai kandidat guna mengisi jabatan sebagai *Chairman of the Committee* periode 2022-2023. Pada tahun 2022 juga Indonesia menghadiri *World Space Forum: Space for our Future* yang membahas mengenai *space for everyone, everywhere; space for Humanity; space for the Planet; space for Economy; sustainable Future in Space; dan all for Action*.
- b. Isu definisi dan delimitasi di antariksa berkaitan dengan meningkatnya kegiatan keantariksaan termasuk kegiatan komersil;
- c. Status GSO sebagai area khusus yang memerlukan pengaturan hukum dan teknis yang khusus dalam *sui generis regime*, serta kaitannya dengan sistem ITU;
- d. pemanfaatan antariksa yang berdasar pada prinsip adil dan manfaat penghormatan penuh integritas teritorial dan kedaulatan negara-negara;
- e. Isu *safe operations in orbit, space debris, space weather, climate change*, ancaman atas *asteroids, mega constellation, small satellite* dan *dark space*;
- f. Isu *working group on nuclear and outer-space*;
- g. Implementasi *Space Agenda 2030*;
- h. *Potential Legal Models for Activities in the Exploration, Exploitation and Utilization of Space Resources*; dan

- i. *Long-Term Sustainability of Outer Space Activity (LTS Guidelines)*, termasuk penyampaian *contact points* nasional pasca peleburan LAPAN ke dalam BRIN.

Di level domestik, Indonesia berkontribusi pada *Joint Report* pada *APRSAF National Legislation Initiatives* untuk berbagi informasi dan penerapan-penerapan terbaik pada hukum antariksa nasional dan internasional. KBRI/PTRI Wina juga terus mendorong agar Indonesia memperoleh program *capacity building* dari UNCOPUS.

Adapun hasil kesepakatan di forum multilateral yang ditindaklanjuti tercermin dalam berbagai rancangan resolusi dan *outcome documents* yang telah disepakati dalam pertemuan-pertemuan di bawah kerangka IAEA, UNODC, UNCOPUOS dan CTBTO pada tahun 2022.

Seluruh hasil-hasil pertemuan yang diadopsi di tahun 2022 telah dikomunikasikan kepada Pusat melalui berita resmi dan akan dijadikan sebagai rujukan dan panduan dalam implementasi nasional dan pembahasan isu-isu terkait di masa datang.

Analisa (termasuk permasalahan dan tantangan, solusi dan proyeksi ke depan)

Pada tahun 2022, KBRI/PTRI dihadapkan pada **tantangan** besar untuk terus melanjutkan sejumlah pertemuan di bawah kerangka IAEA, UNODC, CTBTO dan UNCOPUOS khususnya di tengah situasi pandemi COVID-19 yang terus meningkat di Austria dan secara global. Hal ini telah berdampak pada penundaan pertemuan besar yang dijadwalkan sebelumnya. Selain itu, selama pandemi juga tidak memungkinkan untuk melakukan pendekatan-pendekatan dan lobi-lobi secara *in persons* sehingga hal ini telah mengubah pendekatan negosiasi yang selama ini dilakukan secara langsung.

Walaupun di tengah tantangan pandemi, pertemuan dialihkan secara virtual (*hybrid*) untuk memfasilitasi pembahasan di antara negara anggota, sejumlah pertemuan tetap ditunda hingga tahun 2022. Hal ini menyebabkan adanya sejumlah posisi/prakarsa/rekomendasi tidak dapat disampaikan pada pertemuan-pertemuan tertentu, terutama yang bersifat substantif.

Dengan adanya perubahan dinamika dimaksud, banyak pertemuan yang umumnya tidak masuk dalam perencanaan (*informal consultation/intersessional meeting*) tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan fasilitas oleh kantor PBB di Wina, Austria.

Hal lain yang menjadi kendala adalah pemotongan anggaran pada tahun 2020 yang menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan untuk dilakukan belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, telah dilakukan **langkah-langkah pemecahan masalah/solusi** antara lain yaitu, melakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan prioritas dan urgensi serta menyesuaikan penjadwalan ulang kegiatan atau pertemuan yang tertunda karena pandemi.

Dalam hal ini, KBRI/PTRI Wina juga mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada untuk menghadiri pertemuan-pertemuan virtual tersebut dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah Austria mengenai pembatasan/pengurangan jumlah orang yang bekerja di kantor.

Lebih lanjut, KBRI/PTRI Wina juga melihat **proyeksi ke depan** perlu terus mempertajam perencanaan kegiatan dan meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik di dalam negeri, untuk menelaah kegiatan-kegiatan prioritas yang perlu dihadiri secara virtual. Dalam hal anggaran, KBRI/PTRI Wina membuat perencanaan anggaran sebaik mungkin dan membuat skala prioritas yang mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegiatan atau pertemuan di luar perencanaan dengan memperhatikan juga tujuan jangka panjang yang ingin dicapai.

B.3 BASIS DATA WNI KBRI/PTRI WINA YANG AKURAT

Basis data WNI yang akurat merupakan salah satu kunci dalam pelaksanaan perlindungan WNI di luar negeri. Oleh sebab itu, KBRI/PTRI Wina terus mendorong WNI di wilayah akreditasi untuk melaporkan data dirinya kedalam Portal Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (PEDULI WNI) guna pelayanan perlindungan dan kekonsuleran yang lebih maksimal.

Pencapaian Sasaran Strategis KBRI / PTRI Wina ‘Basis Data WNI KBRI/PTRI Wina yang Akurat’ diperoleh dari pengukuran 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU-1 “Persentase WNI di Negara Akreditasi KBRI/PTRI Wina yang Terverifikasi di Portal Peduli WNI”.

IKU **B.3.1** **Persentase WNI di Negara Akreditasi KBRI/PTRI Wina yang Terverifikasi di Portal Peduli WNI**

Capaian Kinerja

Pada tahun 2022, KBRI/PTRI Wina secara berkesinambungan terus menghimbau agar seluruh WNI di wilayah akreditasi dapat melakukan daftar diri di Portal Peduli WNI. Himbauan ada tahun 2022, KBRI/PTRI Wina secara berkesinambungan terus menghimbau agar seluruh WNI di wilayah akreditasi dapat melakukan daftar diri di Portal Peduli WNI. Himbauan disampaikan dalam berbagai kesempatan WNI pengguna layanan kekonsuleran yang datang ke kantor KBRI/PTRI Wina dan pada saat *outreach* program KBRI/PTRI Wina yakni Warung Konsuler ke berbagai daerah di Austria dan Slovenia.

Pada awal tahun 2022, jumlah WNI di Austria dan Slovenia yang melakukan lapor diri di portal peduli WNI adalah 301 orang. Per akhir bulan Desember 2022, terdapat kenaikan jumlah WNI yang melakukan lapor diri menjadi 951 orang. Berdasarkan data pada Daftar Pemilih Tetap Pemilu tahun 2019 di KBRI/PTRI Wina, terdapat 727 WNI yang terdaftar.



Gambar III.16

Pada saat pembuatan laporan, presentase jumlah WNI yang di negara Akreditasi KBRI/PTRI Wina yang terdaftar di Portal Peduli WNI dibandingkan dengan DPT Pemilu tahun 2019 adalah sebesar 130,8% dari target KBRI/PTRI Wina pada tahun 2022 sebesar 80%. Dengan realisasi sebesar 130,8% maka capaian KBRI/PTRI Wina untuk persentase WNI di negara akreditasi KBRI/PTRI Wina yang terdaftar di Portal Peduli WNI adalah sebesar 163.5%.

IKU B.3.1	Informasi Kinerja	2022
Presentase WNI di Negara Akreditasi KBRI/PTRI Wina yang Terverifikasi Portal Peduli WNI	Data WNI di Portal Peduli WNI Desember 2022 (WPO)	951
	Data WNI di DPT Tahun 2019 (WDPT)	727
	Realisasi	130,81%
	Target	80%
	Capaian	120%

Tabel III.39

[Analisis \(termasuk kendala, solusi dan proyeksi ke depan\)](#)

Terdapat **beberapa kendala** yang dihadapi antara lain kurang kesadaran diri WNI untuk melakukan pendaftaran dan kesulitan akses menggunakan alat teknologi internet bagi orang tertentu seperti manula.

Realisasi basis data WNI berdasarkan portal peduli WNI dan jumlah yang terdapat pada DPT telah berhasil melampaui target yang ditetapkan untuk KBRI/PTRI Wina di tahun 2022. Peningkatan pesat dalam jumlah data pendaftaran WNI pada Portal Peduli WNI terjadi karena adanya beberapa *break through* sebagai **solusi untuk mengatasi kendala** yang dihadapi, antara lain adalah tidak lepas dari dampak pelaksanaan program Pemutakhiran Data yang dicanangkan Pusat untuk dilakukan semua Perwakilan. Pelaksanaan pemutakhiran data yang dilakukan KBRI/PTRI Wina selama tiga kuartal 2022 sebelumnya sangat terbantu dengan adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang diperuntukkan program Pemutakhiran Data WNI di kuartal terakhir 2022. Keberadaan 2 (dua) Tenaga Harian Lepas (THL) selama tiga bulan yakni Oktober hingga Desember 2022, telah membantu dalam proses verifikasi

database kekonsuleran KBRI/PTRI Wina. Pemilihan petugas THL dari anggota PPI Austria dan tokoh masyarakat Indonesia di Slovenia juga mempermudah akses kontak kepada berbagai kantong masyarakat guna melakukan jemput bola pemutakhiran data WNI.

Database kekonsuleran KBRI/PTRI Wina yang digunakan secara aktif sejak tahun 2004, tercatat terdapat 1.729 orang WNI di wilayah kerja yang terbagi dari 1.625 orang WNI di Austria dan 104 orang di Slovenia. Sementara data WNI yang masuk usia pemilih pada 14 Februari 2024 mencapai 1.306 orang yang terdiri dari 1.242 orang di Austria dan 64 orang di Slovenia. Proses pemutakhiran data menggunakan basis data dari database kekonsuleran KBRI/PTRI Wina berhasil menjemput bola sejumlah 951 orang WNI yang terdiri dari 863 WNI di Austria dan 88 WNI di Slovenia.

Sebagai **proyeksi ke depan**, KBRI/PTRI Wina berharap jumlah WNI yang terdaftar di Portal Peduli WNI dapat mendekati angka di database kekonsuleran KBRI/PTRI Wina saat pelaksanaan pemutakhiran data pemilih oleh Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri di tahun 2023.

Learning and Growth Perspective

L.1 TATA KELOLA ORGANISASI PTRI/KBRI WINA YANG BAIK

IKU
L.1.1

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Wina

Capaian Kinerja

Sasaran startegis ini diterapkan untuk menguukur sejauh mana KBRI Wina telah melakukan penatalaksanaan organisasi yang baik. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kesatuan bagian yang berkerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, tata kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengontrolan dan pengelooaan suatu organsiasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat dalam pengelolalan organsiasi.

Dengan berpedoman pada Permenpan RB No. 12 Tahun 2015, Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Wina pada tahun 2021. Hasil evaluasi AKIP pada tahun 2021 tersebut kemudian menjadi dasar penghitungan Nilai AKIP KBRI Wina untuk tahun 2022.

L.1.1 NILAI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KBRI WINA

Evaluasi AKIP pada KBRI Wina dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen dasar manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, KBRI Wina memperoleh nilai **75,78** atau dengan kategori penilaian **BB (Sangat Baik)** pada tahun 2022. Sebagai informasi, pada tahun 2022, target AKIP KBRI/PTRI Wina adalah **79, BB (Sangat baik)**. Dengan demikian, capaian KBRI/PTRI Wina untuk IKU tersebut pada tahun 2022 adalah sebesar **95,32%**.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, KBRI Wina memperoleh nilai 75,78 atau dengan kategori penilaian BB (Sangat Baik). Nilai tersebut mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan nilai evaluasi AKIP KBRI Wina pada tahun 2021 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Guna mendukung pencapaian kinerja, KBRI/PTRI Wina pada tahun 2022 melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai IKU L.1.1 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

IKU L.1.1.	Informasi Kinerja	2021	2022
Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Wina	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Wina		
	Target	79	79,5
	Realisasi	74,45	75,78
	Capaian		95,32%

Tabel III.40

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2021	Nilai 2022
A	Perencanaan Kinerja	30%	25,68	25,68
B	Pengukuran Kinerja	25%	18,13	18,13
C	Pelaporan Kinerja	15%	9,08	9,08
D	Evaluasi Internal	10%	6,66	7,16
E	Capaian Kinerja	20%	14,90	15,40
	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	100%	74,45	75,78
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Tabel III.41

Selain itu, sebagai perbandingan, realisasi IKU Nilai AKIP KBRI / PTRI Wina tahun 2022 relatif mendekati dengan realisasi IKU Nilai AKIP Kemenlu pada tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU Nilai AKIP KBRI Wina 2022	:	Target : 79,5 (BB) Realisasi : 75,78 (BB)
IKU Nilai AKIP Kemenlu 2021	:	Target : 79 (BB) Realisasi : 74.45 (BB)

Tabel III.42

Analisis (termasuk kendala, solusi dan proyeksi ke depan)

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat **tantangan dan hambatan** yang menyebabkan belum tercapainya target nilai AKIP yang telah ditetapkan oleh KBRI Wina seperti antara lain keterlambatan laporan ataupun keakuratan data.

Sebagai **solusi** maka KBRI Wina akan menyempurnakan dokumen AKIP KBRI/PTRI Wina dengan cara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi yang akurat, tetap dan andal untuk semua IKU;
- b. Menyajikan informasi tentang analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- c. Menyajikan informasi tentang capaian kinerja organisasi secara kumulatif setiap tahunnya.

Sebagai **proyeksi ke depan** maka penetapan target IKU KBRI Wina akan disesuaikan dengan perkembangan yang ada, termasuk aktifitas kebutuhan organisasi dalam masa new normal pandemic COVID-19 agar menjadi lebih realistis.

L.2 PENGELOLAAN ASET KBRI WINA YANG OPTIMAL

IKU
L.2.1

Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri

Capaian Kinerja

Secara umum capaian IKU sarana dan prasarana KBRI Wina yang dipenuhi sesuai dengan rencana telah terpenuhi sesuai dengan target. Seluruh perencanaan pengadaan sarana dan prasarana yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) KBRI Wina dapat terealisasi dan tercermin dalam realisasi anggaran output Layanan Sarana dan Prasarana Internal KBRI Wina TA 2022 yang terserap hingga 98,84%.

Dengan demikian, KBRI/PTRI Wina mencatat bahwa dari target 2,7 (Skala 4), realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 2,86 (Skala 4). Berdasarkan persentase tersebut, capaian KBRI/PTRI Wina untuk IKU pada tahun 2022 adalah sebesar 105,93%.

Adapun efisiensi persentasi sarana dan prasarana KBRI Wina yang dipenuhi sesuai rencana dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

IKU L2.1	Informasi Kinerja	2022 (penilaian tahun 2021)
Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri	
	Realisasi	2,86
	Target	2,7 (skala 4)
	Capaian	(105,93%)

Tabel III.43

[Analisis \(termasuk kendala, solusi dan proyeksi ke depan\)](#)

Guna mendukung pencapaian kinerja, KBRI/PTRI Wina pada tahun 2022 selalu melakukan pemeliharaan Gedung Kedutaan, Wisma Dubes, Wisma Wakkepri, inventarisasi dan pengelolaan data dnegan baik.

KBRI Wina telah melakukan pengadaan renovasi instalasi *fire alarm* di Gedung Kantor. Instalasi *fire alarm* tersebut dilakukan untuk memenuhi rekomendasi Tim Sterilisasi dari Pusat.





Foto III.35

Selain itu, untuk menunjang kenyamanan bekerja bagi pegawai, KBRI Wina telah melakukan pemasangan 8 unit AC Split di beberapa ruang kerja, AC *Portable* untuk ruang serbaguna dan Wisma DCM, printer, kasur untuk Wisma DCM, proyektor di ruang rapat, mesin laminating, alat musik modern, microphone, televisi, dan smart monitor.



Foto III.36 AC

Keberhasilan KBRI/PTRI Wina dalam mencapai target realisasi sebesar 100% disebabkan karena barang-barang yang direncanakan tersedia di pasaran dan pekerjaan renovasi yang selesai tepat waktu.

Untuk memenuhi persentase target realisasi sarana dan prasarana, KBRI/PTRI Wina juga memfokuskan peningkatan pada sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Sarana dan Prasarana Komunikasi

Pada tahun 2022, KBRI/PTRI Wina melakukan peningkatan sarana dan prasarana komunikasi agar dapat mengimbangi kebutuhan kegiatan perkantoran yang dilaksanakan secara daring melalui media *video conference*. Peningkatan sarana tersebut antara lain:

- Melakukan pengadaan paket perangkat *video conference*, antara lain; 1 unit kamera Tenveo, 1 unit layar 43 inch, dan 1 unit speaker termasuk 2 unit *Projector* dengan

resolusi tinggi untuk menunjang berbagai kegiatan *video conference* pada KBRI/PTRI Wina.



Foto III.37

Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi

Selain peningkatan sarana komunikasi, KBRI/PTRI Wina juga melakukan peningkatan prasarana teknologi informasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 9 tahun 2018 tentang Tata Kelola TIK Kemenlu dan Perwakilan RI. Peningkatan yang dilakukan selama tahun 2022 antara lain:

- Melakukan pemasangan 9 unit *access point* untuk mempermudah konektivitas secara nirkabel ke dalam jaringan intranet KBRI/PTRI Wina. *Access point* tersebut dipasang pada tiap-tiap lantai di lingkungan kantor KBRI/PTRI Wina.



Foto III.38 Access Points

KBRI/PTRI Wina juga melakukan peningkatan prasarana teknologi informasi untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan dengan:

- Aplikasi E-Disposisi Perwakilan telah diterapkan secara menyeluruh, sehingga pada tahun 2022 KBRI/PTRI Wina telah menganut sistem *paperless* untuk semua kegiatan persuratan dan pemberitaan.

- Penambahan fitur *drafting* Berita Kirim dengan persetujuan secara hirarki pada Aplikasi E-Disposisi, fitur tersebut mempermudah semua staf pada KBRI/PTRI Wina untuk melakukan pengajuan pengiriman berita karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.

No.	Kode Arsip	Sifat Berita	Perihal Berita	Tgl Berita	Pembuat	Persetujuan Kortung	Persetujuan Wakepri	Persetujuan Keppri	Status Pengiriman	Ubah Draft
15	KB-23-0017	B	Penyampaian Permohonan Penerbitan Rekomendasi Visa dan Exit Permit untuk Ibu Mertua Sri. Dyah Dinanti Puspitasari	17-01-2023	FUNGSI PENSOSBUD / PROTCONS / Prokons - Fritska Emelia Diniovi	✓	✓	✓	✓ Terkirim	-
20	KB-23-0016	B	Penyampaian Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi (Renaksi) dan SK Manual Indikator Kerja Utama (IKU) KBRI/PTRI Wina Tahun 2023	13-01-2023	DCM / Wakepri / DCMWakepri - Alfiano Tamala	✓	✓	✓	✓ Terkirim	-
21	KB-23-0015	B	Penyampaian	13-01-2023	FUNGSI EKONOMI / Eko2 -	✓	✓	✓	✓ Terkirim	-

Gambar III.17
Fitur *Drafting* pada Aplikasi E-Disposisi

Sarana dan Prasarana Pengamanan Informasi

KBRI/PTRI Wina juga melakukan peningkatan prasarana pengamanan informasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengamanan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Adapun peningkatan sarana dan prasarana pengamanan informasi antara lain:

- Melakukan perpanjangan lisensi perangkat *Unified Threat Management (UTM)* yang berguna untuk menjaga keamanan jaringan komputer di KBRI/PTRI Wina dari kebocoran informasi (*Firewall* KBRI/PTRI Wina).
- Mengaktifkan layanan *Virtual Private Network (VPN)* bagi seluruh staf KBRI didalam mendukung kerja secara jarak jauh (teleworking) di luar KBRI secara aman.
- Melakukan pembaruan lisensi anti virus untuk mencegah adanya *malware, trojan,* dan *virus* di masing-masing komputer yang digunakan oleh staf KBRI/PTRI Wina (*Kaspersky Internet Security*).
- Melakukan konfigurasi *access points* dengan membuat segmentasi (pemisahan) akses untuk publik dan internal KBRI dengan berpedoman pada hasil kegiatan sterilisasi yang telah dilakukan oleh Tim Sterilisasi dari Kementerian Luar Negeri.

Terdapat **beberapa hambatan dan tantangan** antara lain lainnya proses penghapusan asset selama tahun 2022 termasuk kendaraan dinas, proses penawaran vendor yang lama dan adaptasi pada aplikasi pendataan.

Guna mengatasi hamatan dan tantangan tersebut, KBRI / PTRI Wina melakukan **langkah solusi** dengan selalu melakukan koordinasi dengan psuat antara lain Biro Perlengkapan dan Biro Keuangan. Selain itu juga KBRI/PTRI Wina menyusun data *record* para vendor yang telah terbiasa melakukan kerja.

Sebagai **proyeksi ke depan**, KBRI/PTRI Wina perlu terus berkoordinasi dengan pusat termasuk dalam beberapa realisasi rencana kerja yang akan datang.

IKU
L.3.1

Nilai Kinerja Anggaran KBRI Wina

L.3 PENGELOLAAN ANGGARAN KBRI/PTRI WINA YANG OPTIMAL DAN AKUNTABEL

Capaian Kinerja

Pada tahun 2022, KBRI / PTRI Wina mendapatkan alokasi anggaran akhir sebesar Rp52.623.248.000,00. Alokasi anggaran tersebut mengalami kenaikan dari alokasi anggaran yang tercantum dalam PK KBRI / PTRI Wina yaitu Rp 52.460.843.000,00. Hal ini disebabkan karena adanya ABT belanja barang operasional dan non operasional. Selain penambahan, anggaran KBRI/PTRI Wina juga mengalami pengurangan anggaran karena penyesuaian pagu belanja modal PNBPN dengan detail sebagai berikut:

Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran dimaksud, capaian realisasi anggaran KBRI / PTRI Wina tahun 2022 adalah Rp 52,037,012,302,00 atau 99,67% dari pagu akhir sebesar Rp Rp 52.623.248.000,00.

Selain itu, berikut rekap realisasi per belanja dan per kegiatan per 13 Desember 2022

Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Pagu: Rp35.519.856.000,00	Pagu: Rp15.203.392.000,00	Pagu: Rp1.900.000.000,00
Realisasi: Rp35.258.651.213,00	Realisasi: Rp14.900.341.390,00	Realisasi: Rp1.878.019.699,00
Persentase Serapan: 99,26%	Persentase Serapan: 98,01%	Persentase Serapan: 98,84%

Tabel III.44

Program	Pagu Anggaran
Dukungan Manajemen	Pagu: Rp49.189.331.000,00 Realisasi: Rp48.652.839.842,00 Persentase Serapan: 98,91%
Diplomasi dan Kerjasama Internasional	Pagu: Rp3.118.076.000,00 Realisasi: Rp3.075.974.839,00 Persentase Serapan: 98,65%
Perlindungan WNI di LN serta Pelayanan Publik	Pagu: Rp315.841.000,00 Realisasi: Rp308.197.621,00 Persentase Serapan: 97,58%

Tabel III.45

ANALISA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Indikator Kinerja Utama KBRI Wina dicapai untuk mendukung pelaksanaan berbagai program dengan metode pengelolaan kinerja berbasis anggaran. Secara umum, capaian kinerja Kemenlu adalah NCKO **107,33%** dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) 98,89% dengan rincian sebagai berikut:

Dari perspektif capaian kinerja, realisasi IKU “Nilai Anggaran KBRI Wina” oleh KBRI / PTRI Wina terbilang cukup baik khususnya pada dua tahun terakhir yang mencapai lebih dari 95% sebagaimana tampak dalam tabel berikut:

IKU L.3.1	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Anggaran KBRI Wina	91	97.65	107,30%	92	97,218	105,67%

Tabel III.46

Selain itu, tampak capaian kinerja sebagai berikut:

IKU L.3.1	Informasi Kinerja	2022	
Nilai Anggaran KBRI Wina	Nilai SMART (60%)	99,67	59,80
	Nilai IKPA (40%)	93,54	37,41
	Realisasi		97,21
	Target		92
	Capaian		105,67%

Tabel III. 47

Sisa anggaran KBRI / PTRI Wina tahun 2022 adalah sebesar Rp 586.235.698,00.

Hambatan - hambatan utama dalam realisasi anggaran pada tahun 2022 adalah fluktuasi kurs nilai tukar yang menyebabkan nilai Rupiah mengalami devaluasi terhadap mata uang setempat dan kesulitan memprediksi ketersediaan anggaran secara riil. **Sebagai salah satu jalan keluar** maka KBRI/PTRI Wina melakukan revisi anggaran.

Ke depan diproyeksikan dengan *new normal* Pandemi COVID-19 di wilayah akreditasi, kebutuhan anggaran untuk membiayai kegiatan akan semakin meningkat. Oleh karena itu, KBRI/PTRI Wina akan terus melakukan kroordinasi dengan pusat untuk mengantisipasi hal tersebut.

ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA KBRI / PTRI WINA

KBRI / PTRI Wina telah melakukan upaya – upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan *resource* yang ada untuk mendukung kinerja organisasi yang lebih baik. Hal ini tercermin dengan telah diterbitkannya Permenlu No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang menjadi acuan bagi seluruh unit kerja termasuk KBRI / PTRI Wina.

Sejalan dengan arahan Presiden RI untuk melakukan efisiensi pada setiap instansi dan dalam rangka penanganan COVID – 19, KBRI / PTRI Wina juga telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian anggaran melalui revisi anggaran sesuai dengan nilai penghematan yang ditentukan Pusat (Cek apa ada dasarnya);
2. Menyediakan anggaran khusus dalam rangka penanganan pandemi COVID – 19;
3. Penggunaan *e-office* dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan kantor sehingga menghemat biaya dokumentasi dan pencetakan.
4. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dengan adanya sistem digital yang dapat mendukung *remote working*, pengembangan sistem *paperless office* dan peningkatan kapabilitas pengelolaan dan analisis data.

Upaya – upaya tersebut mendorong KBRI / PTRI Wina lebih efisien dalam menjalankan tupoksinya dengan tetap menjaga kualitas kinerja.

Meskipun pagu anggaran mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020, KBRI / PTRI Wina tetap dapat mengimbangi peningkatan kinerja dari masing – masing program. Salah satu alasan terciptanya efisiensi tersebut karena adanya konsistensi dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan anggaran dan kegiatan di tiap program.

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa anggaran DIPA akhir 2022 mengalami kenaikan dibandingkan DIPA tahun 2021. Adapun capaian penyerapan anggaran DIPA KBRI/PRI Wina tahun 2022 mencapai angka 99,67%.

Tahun 2021	DIPA Awal: Rp. 55.553.747.000	Capaian NCKO Tahunan: 98.47
	DIPA akhir: Rp. 51.527.390.000	
Tahun 2022	DIPA Awal: Rp. 52.460.843.000	Capaian NCKO Tahunan: 107,11
	DIPA akhir: Rp. 52.623.248.000	

Tabel III.48

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dokumen laporan kinerja KBRI/PTRI Wina tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan KBRI/PTRI Wina kepada seluruh pemangku kepentingan. LKj ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan KBRI/PTRI Wina tahun 2022, yang pada gilirannya dapat memberikan informasi dan masukan untuk perbaikan kinerja KBRI/PTRI Wina di masa mendatang.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa target pencapaian kinerja KBRI/PTRI Wina pada tahun 2022 telah tercapai dengan baik dan memberikan hasil yang positif terhadap upaya diplomasi Pemerintah RI di negara akreditasi, pada tingkat bilateral dan multilateral serta pelayanan kekonsuleran dan perlindungan WNI

Capaian kinerja KBRI/PTRI Wina selama tahun 2022 berdasarkan kategori perspektif masing-masing, yaitu: Selanjutnya, merujuk pada laporan kinerja, Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) Tahunan KBRI/PTRI Wina pada tahun 2022 adalah di **NCKO 107,11**. Terdapat peningkatan nilai NCKO tahun 2022 jika dibandingkan pada tahun 2021 yang berada pada angka 98,47. Peningkatan capaian ini disebabkan salah satunya karena KBRI/PTRI Wina mencoba beradaptasi dan memanfaatkan peluang yang didapatkan dari transformasi metode pelaksanaan kegiatan dan kemajuan teknologi informasi untuk memberikan efisiensi dari segi waktu dan biaya. Di tengah-tengah Pandemi COVID-19 KBRI/PTRI Wina mampu mencapai kinerja bidang multilateral, bilateral, protokol dan konsuler, perlindungan WNI serta kegiatan sosial budaya.

Capaian NCKO 107,11 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Perspektif	Bobot	Nilai Perspektif
<i>Stakeholder</i>	25%	103,46%
<i>Costumer</i>	15%	113,33%
<i>Internal business</i>	30%	111,85%
<i>Learning and Growth</i>	30%	102,31%

Tabel IV.1

Kinerja KBRI/PTRI Wina tersebut juga didukung dengan serapan anggaran sebesar 99,67% dan efisiensi sebesar 100%.

Di bidang diplomasi misalnya, beberapa *notable* capaian KBRI / PTRI Wina dan memiliki dampak besar bagi Indonesia antara lain antara lain: (i) penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) kenengakerjaan dan saling dukung; (ii) kepemimpinan Indonesia sebagai *President Industrial Development Board* (IDB) dalam forum UNIDO yang menempatkan Indonesia secara strategis dalam agenda dan *norm setting* terkait pembangunan industri berkelanjutan dan inklusif; (iii) kepemimpinan Indonesia sebagai *Rapporteur* pada *Ad Hoc Committee to Elaborate a Comprehensive International*

Convention on Cybercrime pada forum UNODC Indonesia berkesempatan untuk berkontribusi pada agenda dan *norm setting* terkait isu kejahatan siber; dan (iv) Pengembangan berbagai kerja sama RI – IAEA sebagai tindak lanjut kunjungan Kepala BRIN dan Kepala BAPETEN.

Namun demikian, secara praktik, pelaksanaan tugas KBRI/PTRI Wina kegiatan operasional KBRI/PTRI Wina perlu mengalami banyak penyesuaian akibat dari pandemi COVID-19.

Pada tahun 2022, hubungan bilateral RI-Austria dan RI – Slovenia diperkirakan tetap berjalan kondusif secara politis. Pengaturan saling dukung di berbagai forum multilateral juga akan tetap dilaksanakan. Pembahasan berbagai perjanjian kerja sama dan implementasi dari berbagai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya akan tetap berjalan dengan dikawal oleh KBRI / PTRI Wina. Sementara untuk Slovenia, KBRI/PTRI Wina melihat adanya keperluan untuk segera merealisasikan Forum Konsultasi Bilateral (FKB) RI – Slovenia di Indonesia yang sebelumnya telah direncanakan, namun tertunda. Pihak Slovenia menyatakan belum dapat melanjutkan rencana FKB karena faktor pandemi COVID-19.

Di bidang ekonomi, partisipasi pada pameran-pameran besar baik di Austria maupun Slovenia masih menjadi strategi untuk memperluas pangsa pasar produk Indonesia di negara-negara akreditasi. KBRI/PTRI Wina juga melanjutkan rencana *outreach* ke sentra-sentra industri di berbagai kota di Austria guna menawarkan proyek-proyek investasi di Indonesia. Untuk itu kiranya dibutuhkan dukungan Pusat dalam mendorong agar delegasi Indonesia yang ke Austria turut membawa pelaku usaha ataupun pejabat teknis terkait sehingga diskusi dan *networking* dapat lebih mendalam sehingga pada akhirnya dapat memberikan hasil yang konkret. Ke depan KBRI/PTRI Wina juga perlu meningkatkan efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Wina.

Di bidang Sosial Budaya, KBRI/PTRI Wina juga akan terus mengupayakan tindak lanjut pelaksanaan MoU Kerja Sama di Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi antara Indonesia dan Austria, dan implementasi kerja sama antara FISIP Universitas Padjadjaran dan FISIP Universitas Ljubljana yang tertunda karena adanya COVID-19. Di samping itu, KBRI Wina juga akan terus mengupayakan peningkatan citra positif Indonesia di negara akreditasi melalui pelaksanaan *soft-power* diplomasi Indonesia, termasuk di antaranya melalui pengembangan program pengajaran Bahasa Indonesia dan untuk membuka kembali kelas musik tradisional Gamelan di universitas dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Austria dan Slovenia maupun pelaksanaan kelas tari tradisional secara virtual. Ke depan juga KBRI/PTRI Wina perlu mendorong peningkatan indeks Citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Wina.

Di bidang kekonsuleran dan perlindungan WNI telah memberikan pelayanan kekonsuleran dan perlindungan terhadap WNI dengan baik. Dalam masa pandemi COVID-19, KBRI/PTRI Wina memberikan perhatian khusus kepada WNI di negara akreditasi berupa penyaluran bantuan logistik dan pengawasan bagi WNI yang dinyatakan positif COVID-19. KBRI/PTRI Wina akan terus berupaya memberikan pelayanan kekonsuleran dan perlindungan WNI yang prima dalam berbagai situasi. Selain itu, terkait dengan aplikasi portal peduli WNI, KBRI/PTRI Wina akan terus mengupayakan bertambahnya jumlah WNI yang mendaftar dalam portal tersebut guna meningkatkan pelayanan kekonsuleran dan perlindungan WNI.

Dalam konteks diplomasi multilateral, dinamika hubungan internasional tidak selalu dapat diprediksi dan pada saat yang sama, masing-masing negara senantiasa mengedepankan dan mengutamakan kepentingan masing-masing negara. Terkait hal tersebut, KBRI/PTRI Wina akan terus memperjuangkan kepentingan nasional, mencari *middle ground solution*, dan menindaklanjuti komitmen-komitmen yang masih memerlukan tindak lanjut ke depan.

Beberapa isu perlu terus mendapat perhatian pemerintah, antara lain upaya meningkatkan kapasitas dan kerja sama teknis dengan berbagai organisasi internasional di Wina, termasuk IAEA, CTBTO dan UNCOPUOS. Selain itu, KBRI/PTRI Wina perlu terus mengawal kepentingan nasional pada pembahasan isu AUKUS / *Nuclear Naval Propulsion* (NNP), pelaksanaan mandat CTBT terkait perlucutan senjata, peningkatan keterwakilan WNI pada organisasi internasional, memperjuangkan pengarusutamaan kejahatan perikanan, pengembalian aset hasil kejahatan korupsi yang berada di luar negeri khususnya melalui *platform* bantuan hukum timbal balik/MLA di bawah kerangka UNCAC, mencegah dekriminalisasi narkoba dan menentang upaya-upaya untuk menghapuskan hukuman mati atas kejahatan narkoba, pemanfaatan ruang angkasa untuk tujuan damai, merealisasikan proposal Indonesia mengenai pembentukan sui generis GSO di UNCOPUOS, pengembangan kerja sama di bidang industri perikanan dan kemaritiman, pembangunan industri yang berkelanjutan dan inklusif di bawah kerangka UNIDO dan reformasi rezim *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) pada forum UNCITRAL.

B. KENDALA UTAMA

Permasalahan Pengelolaan Negara-negara Rangkapan

1. Idealnya negara rangkapan harus mendapatkan perhatian yang cukup dalam konteks peningkatan kerja sama bilateral di berbagai sektor. Dalam hal ini upaya peningkatan kerja sama tidak hanya dibebankan kepada KBRI negara akreditasi utama, namun juga oleh Pusat sehingga mendapatkan apresiasi dari pemerintah negara rangkapan.
2. Dalam konteks negara rangkapan, KBRI/PTRI Wina menilai perlunya upaya khusus untuk menentukan fokus bidang kerja sama (*mutual benefit & mutual interests*) yang potensial dikembangkan kedua negara, sehingga walaupun dari segi intensitas kunjungan belum terlalu tinggi, namun terdapat bidang kerja sama yang berkembang secara konkrit.
3. Tantangan utama dalam mengelola negara-negara rangkapan adalah aspek jarak dan biaya. Waktu tempuh dari Wina ke Ljubljana cukup jauh, yaitu 5 jam perjalanan darat, sehingga kunjungan ke negara tersebut tidak dapat dilakukan secara fleksibel. Setiap pendekatan yang dilakukan ke mitra secara langsung memerlukan alokasi waktu dan biaya yang tidak sedikit.
4. Dengan tingkat biaya yang tinggi di negara akreditasi utama dan negara rangkapan, sulit bagi KBRI untuk secara seimbang mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk kerja sama bilateral dengan Austria dan Slovenia.
5. Selama ini KBRI/PTRI Wina telah berupaya mengoptimalkan peran Konsul Kehormatan RI untuk Slovenia dalam rangka memajukan kepentingan Indonesia.

Permasalahan pada Forum Multilateral

1. Pandemi COVID-19 menyebabkan sulitnya melakukan pertemuan *in person* diberbagai pertemuan. Selama 2022 banyak sidang dilakukan dalam format *virtual / hybrid*, khususnya pada semester pertama tahun 2022. Pertemuan yang dilakukan secara virtual menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan koordinasi dengan Pusat, maupun dalam melakukan negosiasi secara langsung dengan negara mitra organisasi internasional. Selama periode 2022, kehadiran delegasi pusat pun sangat terbatas untuk dapat mendampingi dalam perundingan di Wina.
2. Selama tahun 2022 terdapat juga tantangan untuk menentukan tanggal dan waktu yang tepat bagi delegasi pusat guna melakukan pertemuan dengan pejabat tinggi di organisasi internasional di tengah sidang yang dilakukan secara *hybrid*.
3. Pada semester kedua, sehubungan dengan mulai meredanya pandemi COVID-19, pertemuan mulai kembali dilakukan secara *in person*. Berbagai pertemuan di organisasi internasional lain di luar Austria juga sudah mulai dilakukan secara *in person*. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan kehadiran delegasi PTRI/KBRI Wina untuk hadir dalam perundingan dimaksud. Selain itu, delegasi Pusat mulai datang ke Wina. Namun demikian, kebutuhan menghadiri perundingan di berbagai organisasi internasional dan kehadiran delegasi pusat ini tidak diimbangi dengan perubahan pada postur anggaran KBRI/PTRI Wina bagi penanganan isu multilateral.

Peranan Konsul Kehormatan dalam Menunjuang Misi Perwakilan RI

1. Terdapat beberapa Konsul Kehormatan yang dimiliki Pemri.
2. Dalam pengamatan selama ini, Konsul Kehormatan telah melakukan kewajibannya sesuai dengan Permenlu 04/2014, antara lain terkait pelaporan rencana kerja dan pelaksanaan program mereka secara berkala. Namun demikian, koordinasi dengan KBRI/PTRI dalam pelaksanaan tugas masih perlu ditingkatkan.
3. KBRI/PTRI Wina juga berharap dapat terus mengoptimalkan keberadaan Konsul Kehormatan untuk memberikan masukan/informasi, khususnya terkait data pengusaha lokal yang berpotensi untuk kerja sama dagang maupun investasi di Indonesia. Data ini perlu sebagai bahan kegiatan *business matching* dan peningkatan perdagangan dan investasi di Indonesia.

c. Sinergi Kegiatan Pusat dan Perwakilan di Bidang Diplomasi Ekonomi

1. Setiap awal tahun 2022, Pusat meminta informasi mengenai kegiatan-kegiatan promosi TTI di negara akreditasi (khususnya pameran), dan PTRI/KBRI Wina senantiasa memberikan data tersebut. Namun demikian, masih diperlukan informasi tindak lanjut dari pusat. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya kegiatan.

2. Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang ada, KBRI/PTRI Wina akan terus meningkatkan koordinasi yang baik antara Kemlu dengan kementerian teknis terkait (Kemendag, Kemenparekraf, BKPM) sehingga promosi TTI dapat berjalan secara sinergis, khususnya dalam hal waktu kegiatan, pendanaan, materi promosi, dan keikutsertaan pelaku usaha Indonesia.
3. Sebagai salah satu usulan upaya mengembangkan kinerja, diperlukan suatu *database* pelaku usaha di sektor ekspor utama dan unggulan Indonesia yang kredibel (termasuk kemampuan dan validitas ekspor ke Eropa) agar KBRI/PTRI Wina dapat menjawab *inquiry* dengan percaya diri dan melakukan *business matching* dengan pelaku usaha di negara akreditasi.
4. KBRI/PTRI Wina juga membutuhkan informasi aktual, komprehensif, dan berkala tentang perekonomian Indonesia (secara umum ataupun sektoral), serta peluang investasi yang rinci, yang dapat dijadikan acuan bagi KBRI/PTRI dalam melakukan promosi TTI.
5. Kondisi pandemi COVID-19 yang semakin membaik membuka peluang diplomasi ekonomi kembali dilakukan sebelum saat COVID-19. Dalam hal ini maka postur anggaran KBRI/PTRI Wina juga perlu ditinjau kembali.

d. Hambatan Peningkatan Citra Positif Indonesia dan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan RI dalam masa pandemi Covid-19

Upaya peningkatan citra positif Indonesia umumnya dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan *outreach* seperti promosi kebudayaan dan wisata. Sehubungan adanya pandemi COVID-19 yang berkelanjutan, upaya peningkatan citra positif Indonesia tersebut mengalami hambatan dan tantangan, karena adanya pembatasan kontak fisik yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat.

Di tahun 2022, KBRI/PTRI Wina juga mengubah rencana berbagai kegiatan *outreach* menjadi secara virtual. Hal tersebut membatasi upaya pembagian *questionnaire* untuk mendapatkan penilaian citra positif Indonesia yang umumnya diberikan secara langsung. Hal ini menyebabkan rendahnya antusiasme warga setempat untuk memberikan penilaian atas citra positif Indonesia secara daring.

Sebagai salah satu solusi, KBRI/PTRI Wina akan terus memanfaatkan sarana tersebut untuk mempromosikan diplomasi sosial dan budaya yang pada gilirannya dapat menunjang citra positif Indonesia di negara akreditasi. Selain itu, sebagai upaya promosi sosial dan budaya Indonesia di negara akreditasi, informasi dan konten yang disajikan pada sarana media sosial KBRI/PTRI Wina ke depannya akan lebih terintegrasi dengan media sosial dari berbagai *stakeholders* di Indonesia.

e. Jumlah WNI yang mendaftar dalam portal peduli WNI

Lapor diri dalam portal peduli WNI sepenuhnya bergantung pada kemauan WNI tersebut. Banyak WNI yang masih menganggap lapor diri belum penting atau bahkan dianggap tidak perlu dan bertentangan dengan prinsip perlindungan identitas diri. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala ini KBRI/PTRI Wina selalu melakukan sosialisasi dan meminta kepada setiap WNI yang mengajukan layanan konsuler untuk membawa

bukti lapor diri yang didapat dari portal peduli WNI guna mendorong bertambahnya jumlah WNI yang mendaftar dalam portal tersebut. Selain itu, masih terdapat beberapa kendala teknis dalam proses verifikasi data WNI di portal peduli WNI. Untuk mengatasi hal ini, KBRI Wina selalu berkoordinasi dengan Direktorat PWNI dan BHI ketika menghadapi permasalahan di portal peduli WNI.

f. Isu anggaran;

1. Anggaran KBRI/PTRI Wina Tahun 2022 berjumlah Rp. 52.623.248.000,00 mengalami kenaikan dari anggaran Rp51.527.390.000,00 di tahun 2021. Kenaikan jumlah anggaran pada tahun 2022 terbesar terjadi pada elemen mata anggaran layanan dukungan manajemen internal. Namun demikian, alokasi Anggaran tahun 2022 masih lebih rendah dari pada alokasi anggaran yang tercantum dalam PK KBRI / PTRI Wina tahun 2020, yaitu sebesar Rp. 54.425.831.000,00.
2. Memasuki pertengahan tahun 2022 *new normal* Pandemi COVID-19 mulai diterapkan. Berbagai perundingan di organisasi internasional mulai dilakukan secara *in person*. Secara perlahan dan bertahap, berbagai perundingan sudah beralih dari sidang *virtual* ke bentuk persidangan fisik (*hybrid*). Hal ini mengakibatkan minimal dua kondisi, antara lain: (i) semakin bertambahnya jumlah delegasi RI yang dapat ke Wina; dan (ii) semakin bertambahnya jumlah persidangan di Wina dan berbagai pusat organisasi internasional seperti Jenewa, New York maupun forum organisasi internasional lainnya terkait tuisi PTRI Wina.
3. Fenomena kenaikan jumlah persidangan secara *in person* dan semakin banyaknya delegasi ke Wina tidak diimbangi dengan kecukupan mata anggaran diplomasi kerja sama multilateral. Tercatat jumlah mata anggaran diplomasi dan kerja sama pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.118.076.000 lebih rendah dari tahun 2021 sebesar Rp. 3.190.582.200.
4. Mengingat *new normal* dan semakin banyak persidangan organisasi multilateral terkait tuisi KBRI/PTRI Wina, maka postur anggaran ini perlu ditindak kembali, khususnya pada tahun mendatang paska *new normal* pandemik COVID-19.

C. LANGKAH PERBAIKAN DI MASA MENDATANG UNTUK PENINGKATAN KINERJA

Dalam rangka meningkatkan capaian IKU dan menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta eksekusi anggaran pada Perwakilan RI, KBRI/PTRI Wina akan mengupayakan hal-hal, antara lain:

1. Identifikasi program kegiatan masing-masing Fungsi dan memastikan keselarasannya dengan target-target IKU KBRI/PTRI Wina;
2. Membuat perencanaan anggaran sebaik mungkin dan membuat skala prioritas dengan mengantisipasi adanya kegiatan di luar perencanaan, dan berbagai kondisi di negara akreditasi;
3. Menetapkan skala prioritas terhadap kegiatan-kegiatan KBRI/PTRI Wina dengan memperhatikan tujuan dan manfaat jangka panjang yang ingin dicapai;
4. Mengupayakan kinerja KBRI/PTRI Wina sesuai dengan target dan postur anggaran serta skala prioritas tupoksi KBRI/PTRI Wina;

5. Mengajukan revisi anggaran;
6. Memperkuat koordinasi dengan institusi mitra kerja di negara akreditasi, organisasi-organisasi internasional di Wina, Austria, dan Kementerian / Lembaga serta *stakeholders* terkait di Indonesia;
7. Memaksimalkan penggunaan media sarana internet baik untuk promosi, pelaksanaan tugas, *outreach* kepada publik ataupun proses negosiasi.

BAB V

LAMPIRAN

- I. Matriks Perjanjian Kinerja KBRI Wina;
- II. SK Keppri tentang Peta Strategis Dan Indikator Kinerja Utama Perwakilan RI Wina Tahun 2022;
- III. Matriks Informasi Kinerja;
- IV. Matriks Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO);
- V. Matriks Realisasi Rencana Aksi (Renaksi) PK.



**DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN RI DI WINA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. iur. Damos Dumoli Agusman
Jabatan : Duta Besar LBBP/ Wakil Tetap Republik Indonesia di Wina

selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama,

Nama : Retno L.P. Marsudi
Jabatan : Menteri Luar Negeri RI


selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wina, 26 Januari 2022

Pihak Kedua,

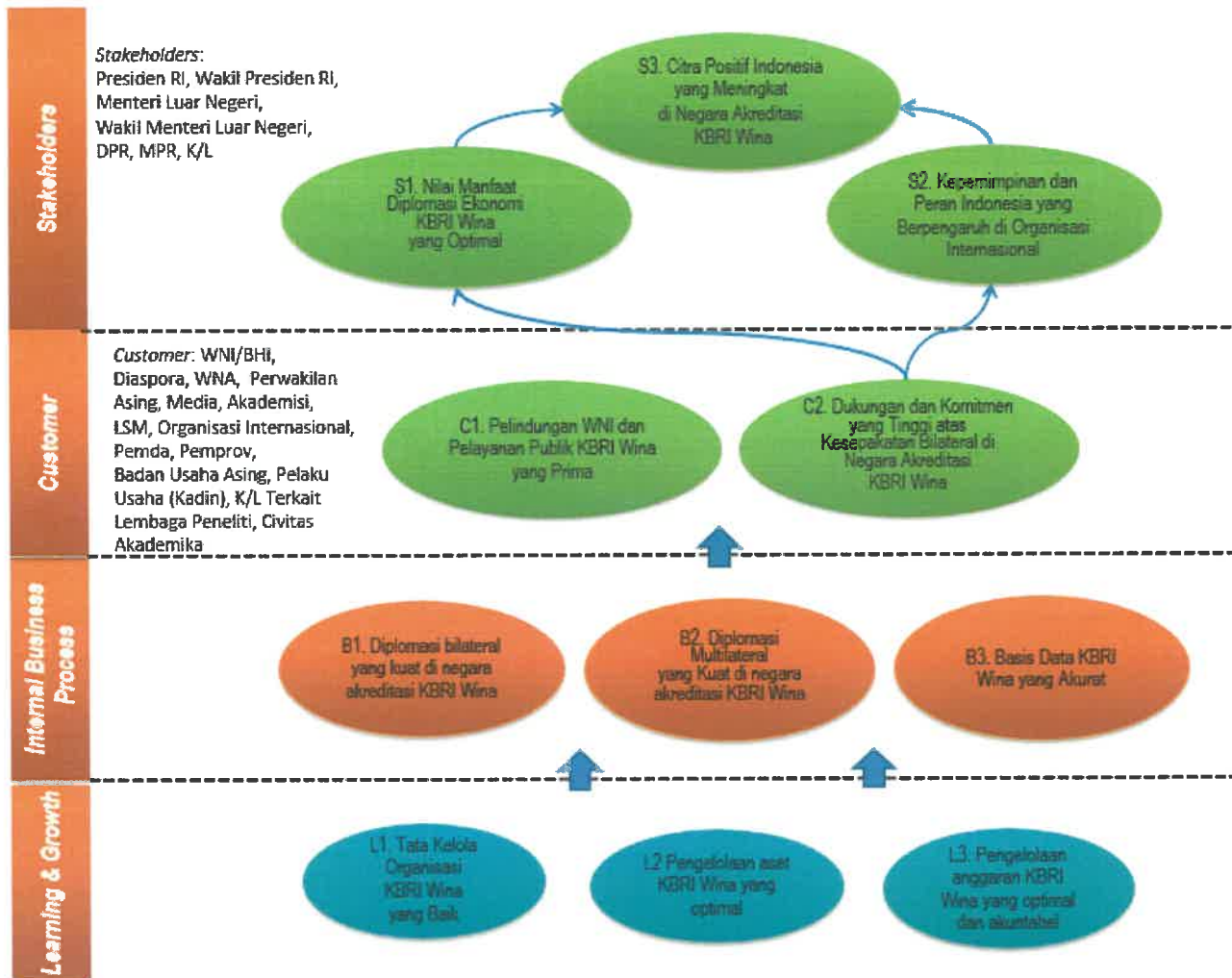

Retno L.P. Marsudi

Pihak Pertama,


Dr. iur. Damos Dumoli Agusman

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA WINA**

PETA STRATEGI PERWAKILAN RI WINA TAHUN 2022



Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Stakeholders Perspective				
S.1	Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KBRI Wina yang Optimal	IKU S.1.1	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Wina	90 %
		SUB IKU 1	Jumlah komitmen perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Wina	1
		SUB IKU 2	Nilai perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Wina	USD 280 juta
		IKU S.1.2	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI Wina	90%
		SUB IKU 1	Jumlah komitmen investasi dengan negara akreditasi KBRI Wina	1
		SUB IKU 2	Nilai investasi dengan negara akreditasi KBRI Wina	USD 50 juta
		IKU S.1.3	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Wina	90%
		SUB IKU 1	Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI Wina ke Indonesia	80%
		SUB IKU 2	Jumlah wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI Wina ke Indonesia	1750
S.2	Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di organisasi internasional	IKU S.2.1	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral	96%
		IKU S.2.2	Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri multilateral	96%
S.3	Citra positif Indonesia yang meningkat di negara akreditasi KBRI Wina	IKU S.3.1	Indeks Citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Wina	4 (skala 5)
Customer Perspective				
C.1	Pelindungan WNI dan pelayanan publik KBRI Wina yang prima	IKU C.1.1	Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Wina yang diselesaikan	80%

		IKU C.1.2	Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI Wina	4 (Skala 4)
		IKU C.1.3	Nilai persepsi kepuasan pelayanan perlindungan WNI KBRI Wina	4 (Skala 4)
C.2	Dukungan dan komitmen yang tinggi atas kesepakatan bilateral di negara akreditasi KBRI Wina	IKU C.2.1	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara akreditasi KBRI Wina	90%

Internal Business Process Perspective

B.1	Diplomasi bilateral yang kuat di negara akreditasi KBRI Wina	IKU B.1.1	Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya dengan negara akreditasi KBRI Wina	4
		IKU B.1.2	Jumlah kesepakatan di bidang politik, keamanan, dan maritim dengan negara akreditasi KBRI Wina	2
		IKU B.1.3	Indeks Respon Positif terhadap informasi data Economic Intelligence/Market Intelligence tentang negara akreditasi KBRI Wina	5 (skala 5)
B.2	Diplomasi multilateral yang kuat di negara akreditasi KBRI Wina	IKU B.2.1	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral di bidang sosial, ekonomi, dan budaya	90%
		IKU B.2.2	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral di bidang politik, keamanan, dan maritim	90%
B.3	Basis data KBRI Wina yang akurat	IKU B.3.1	Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Wina yang terverifikasi di Portal Peduli WNI	80%


Learning and Growth Perspective

L.1	Tata kelola organisasi KBRI Wina yang baik	IKU L.1.1	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Wina	79,5 (BB)
L.2	Pengelolaan aset KBRI Wina yang optimal	IKU L.2.1	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri	2,7 (Skala 4)
L.3	Pengelolaan anggaran KBRI Wina yang optimal dan akuntabel	IKU L.3.1	Nilai Kinerja Anggaran KBRI Wina	92

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional di Perwakilan RI	Rp.2.846.182.000,-
2	Pelayanan dan Pelindungan WNI Perwakilan RI	Rp.271.366.000,-
3	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp.49.343.295.000,-
Pagu Anggaran KBRI Wina 2022		Rp. 52.460.843.000,-

Wina, 26 Januari 2022

Menteri Luar Negeri RI,



Retno L.P. Marsudi

Kepala Perwakilan RI,



Dr. iur. Damos Dumoli Agusman
Duta Besar LBBP/Watap RI

**Matriks Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Perwakilan RI di Wina
Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun 2022	Target (Akumulatif)				Rincian Kegiatan			
				s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV	Uraian	Indikator <i>input/output</i>	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

USD

IKU S.1.2
Tingkat
efektivitas
diplomasi
ekonomi di
sektor investasi
dengan negara
akreditasi KBRI
Wina

IKU S.1.3
Tingkat
efektivitas
diplomasi
ekonomi di
sektor
pariwisata
dengan negara
akreditasi KBRI
Wina

		<p>IKU S.2.2 Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri multilateral</p>									
S3	<p>Citra Positif Indonesia yang Meningkat di</p>	<p>IKU S.3.1 Indeks Citra Indonesia di Negara</p>									

	Negara Akreditasi KBRI Wina	Akreditasi KBRI Wina	
C1	Pelindungan WNI dan Pelayanan Publik KBRI Wina yang Prima	IKU C.1.1 Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Wina yang diselesaikan	
		IKU C.1.2 Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI Wina	

		<p>IKU C.1.3 Nilai persepsi kepuasan pelayanan perlindungan WNI KBRI Wina</p>	
C2	<p>Dukungan dan komitmen yang Tinggi atas Kesepakatan Bilateral di Negara Akreditasi KBRI Wina</p>	<p>IKU C.2.1 Persentase tindak lanjut/implement asi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI Wina</p>	

B1	Diplomasi Bilateral di negara akreditasi KBRI Wina yang Kuat	IKU B.1.1 Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan negara akreditasi KBRI Wina	
		IKU B.1.2 Jumlah kesepakatan bidang politik, keamanan, dan maritime dengan negara akreditasi KBRI Wina	

		<p>IKU B.1.3 Indeks Respon Positif terhadap informasi data <i>Economic Intelligence/Market Intelligence</i> tentang negara akreditasi KBRI Wina</p>	
B2	<p>Diplomasi Multilateral di negara akreditasi KBRI Wina yang kuat</p>	<p>IKU B.2.1 Persentase posisi/prakarsa/r ekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral di bidang sosial,</p>	

ekonomi, dan budaya

IKU B.2.2
Persentase posisi/prakarsa/r ekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral di bidang politik, keamanan, dan maritim

B3

Basis Data WNI KBRI Wina yang Akurat

IKU B.3.1
Persentase WNI di Negara Akreditasi KBRI Wina yang terverifikasi di Portal Peduli WNI

L1	Tata Kelola Organisasi KBRI Wina yang Baik	IKU L.1.1 Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Wina	
L2	Pengelolaan aset KBRI Wina yang optimal	IKU L.2.1 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri	
L3	Pengelolaan Anggaran KBRI Wina yang Optimal dan akuntabel	IKU L.3.1 Nilai Kinerja Anggaran KBRI Wina	

--	--	--	--



SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
DI WINA
NOMOR: SKP/100.1/II/2022
TENTANG
PETA STRATEGIS DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERWAKILAN RI WINA TAHUN 2022

KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA WINA,

- Menimbang :
- a. bahwa Tujuan dan Peta Strategis perlu diterjemahkan kedalam peta strategi yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut atas telah ditetapkannya Perjanjian Kinerja (PK) Perwakilan RI di Wina Tahun 2022, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan SK Kepala Perwakilan Nomor SKP/005A/I/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama KBRI/PTRI Wina tahun 2021.
 - c. bahwa sebagai pedoman dan informasi menyeluruh terkait IKU Perwakilan RI di Wina, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI No. SKP/100.1/II/2022 tentang Peta Strategi dan IKU Perwakilan RI di Wina dengan penjelasan komprehensif yang tertuang dalam Manual IKU Perwakilan RI.
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
 3. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
7. Rencana Strategis 2020-2024 Perwakilan RI

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETA STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI WINA TAHUN 2022.
- KESATU : Memberlakukan Peta Strategi dan IKU Perwakilan RI di Wina sebagai penjabaran dari Tujuan dan Perwakilan RI di Wina tahun 2022 - 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Strategi dan IKU tersebut digunakan sebagai tolak ukur kinerja Tujuan dan Peta Strategis Perwakilan RI di Wina dan acuan dalam dokumen perencanaan kinerja dan anggaran serta evaluasi kinerja dan anggaran Perwakilan RI di Wina.
- KETIGA : Memberlakukan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan RI di Wina sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai dokumen acuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perwakilan RI di Wina
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada seluruh Fungsi di lingkungan Perwakilan RI di Wina untuk:
- a. Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pencapaian kinerja IKU di lingkungan Perwakilan RI sekurang-kurangnya pada setiap triwulan.
 - b. Menyiapkan data target, realisasi, capaian, serta informasi kinerja yang memadai bagi penanggung jawab atau pihak penyedia data yang memiliki kontribusi atas IKU Perwakilan RI di Wina dan Kementerian Luar Negeri.
- KEENAM : Manajer Kinerja Perwakilan bersama-sama dengan seluruh unsur Perwakilan RI memantau dan mengevaluasi realisasi serta capaian kinerja IKU Perwakilan RI bersama Kepala Perwakilan RI sekurang-kurangnya pada setiap triwulan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Perwakilan RI No. SK. SKP/005A/I/2021 Tentang Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama KBRI/PTRI Wina tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan tetap berlaku sampai dikeluarkan Keputusan yang mencabutnya.

Ditetapkan di Wina
Pada tanggal Februari 2022
KEPALA PERWAKILAN RI

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a series of vertical and horizontal strokes, and ending with a long horizontal line that extends to the right.

Dr. iur. Darnes Dumoli Agusman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN RI
NOMOR SKP/100.1/II/2022 TENTANG
PERUBAHAN PETA STRATEGIS DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
2022 PERWAKILAN RI WINA

LAMPIRAN I:



**DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN RI DI WINA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. iur. Damos Dumoli Agusman
Jabatan : Duta Besar LBBP/ Wakil Tetap Republik Indonesia di Wina

selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama,

Nama : Retno L.P. Marsudi
Jabatan : Menteri Luar Negeri RI

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wina, 26 Januari 2022

Pihak Kedua,

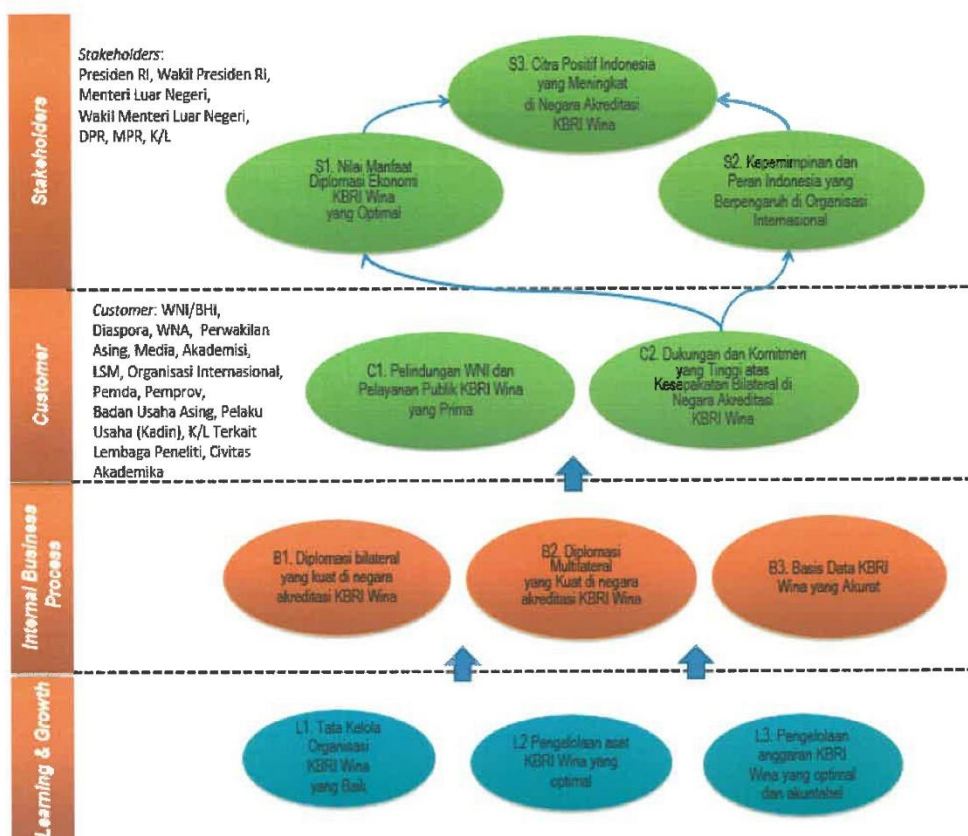
Retno L.P. Marsudi

Pihak Pertama,

Dr. iur. Damos Dumoli Agusman

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA WINA**

PETA STRATEGI PERWAKILAN RI WINA TAHUN 2022




Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Stakeholders Perspective				
S.1	Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KBRI Wina yang Optimal	IKU S.1.1	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Wina	90 %
		SUB IKU 1	Jumlah komitmen perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Wina	1
		SUB IKU 2	Nilai perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Wina	USD 280 juta
		IKU S.1.2	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI Wina	90%
		SUB IKU 1	Jumlah komitmen investasi dengan negara akreditasi KBRI Wina	1
		SUB IKU 2	Nilai investasi dengan negara akreditasi KBRI Wina	USD 50 juta
		IKU S.1.3	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Wina	90%
		SUB IKU 1	Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI Wina ke Indonesia	80%
		SUB IKU 2	Jumlah wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI Wina ke Indonesia	1750
S.2	Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di organisasi internasional	IKU S.2.1	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral	96%
		IKU S.2.2	Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri multilateral	96%
S.3	Citra positif Indonesia yang meningkat di negara akreditasi KBRI Wina	IKU S.3.1	Indeks Citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Wina	4 (skala 5)
Customer Perspective				
C.1	Pelindungan WNI dan pelayanan publik KBRI Wina yang prima	IKU C.1.1	Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Wina yang diselesaikan	80%

		IKU C.1.2	Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI Wina	4 (Skala 4)
		IKU C.1.3	Nilai persepsi kepuasan pelayanan perlindungan WNI KBRI Wina	4 (Skala 4)
C.2	Dukungan dan komitmen yang tinggi atas kesepakatan bilateral di negara akreditasi KBRI Wina	IKU C.2.1	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara akreditasi KBRI Wina	90%
Internal Business Process Perspective				
B.1	Diplomasi bilateral yang kuat di negara akreditasi KBRI Wina	IKU B.1.1	Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya dengan negara akreditasi KBRI Wina	4
		IKU B.1.2	Jumlah kesepakatan di bidang politik, keamanan, dan maritim dengan negara akreditasi KBRI Wina	2
		IKU B.1.3	Indeks Respon Positif terhadap informasi data Economic Intelligence/Market Intelligence tentang negara akreditasi KBRI Wina	5 (skala 5)
B.2	Diplomasi multilateral yang kuat di negara akreditasi KBRI Wina	IKU B.2.1	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral di bidang sosial, ekonomi, dan budaya	90%
		IKU B.2.2	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral di bidang politik, keamanan, dan maritim	90%
B.3	Basis data KBRI Wina yang akurat	IKU B.3.1	Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Wina yang terverifikasi di Portal Peduli WNI	80%
Learning and Growth Perspective				
L.1	Tata kelola organisasi KBRI Wina yang baik	IKU L.1.1	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Wina	79,5 (BB)
L.2	Pengelolaan aset KBRI Wina yang optimal	IKU L.2.1	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri	2,7 (Skala 4)
L.3	Pengelolaan anggaran KBRI Wina yang optimal dan akuntabel	IKU L.3.1	Nilai Kinerja Anggaran KBRI Wina	92

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional di Perwakilan RI	Rp.2.846.182.000,-
2	Pelayanan dan Pelindungan WNI Perwakilan RI	Rp.271.366.000,-
3	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp.49.343.295.000,-
Pagu Anggaran KBRI Wina 2022		Rp. 52.460.843.000,-

Wina, 26 Januari 2022

Menteri Luar Negeri RI,



Retno L.P. Marsudi

Kepala Perwakilan RI,



Dr. iur. Damos Dumoli Agusman
Duta Besar LBBP/Watap RI

LAMPIRAN II:

**MATRIKS PROYEKSI TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA KBRI/PTRI WINA
TAHUN 2022 - 2025**

Kode SS	Peta Strategis (SS)	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Stakeholder Perspective							
S.1	Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KBRI Wina yang Optimal	IKU S.1.1	Persentase Peningkatan Nilai Perdagangan Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI Wina	3%	3%	3%	3%
		IKU S.1.2	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Asing ke Indonesia dari Negara Akreditasi KBRI Wina	3%	3%	3%	3%
		IKU S.1.4	Persentase Peningkatan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia dari Negara Akreditasi KBRI Wina	5%	5%	5%	5%
S.2	Kepemimpinan Indonesia yang Berpengaruh di Organisasi Internasional	IKU S.2.1	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral	96%	96%	96.67%	96.67%
		IKU S.2.2	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum Multilateral	96%	96%	96.67%	96.67%
S.3	Citra Positif Indonesia yang Meningkatkan di Negara Akreditasi KBRI	IKU S.3.1	Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI Wina	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)
Customer Perspective							
C.1	Pelindungan WNI/BHI dan Pelayanan Publik KBRI Wina yang Prima	IKU C.1.1	Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Wina yang diselesaikan	74%	75%	76%	77%
		IKU C.1.2	Indeks Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI Wina	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
		IKU C.1.3	Indeks Kepuasan Pelayanan Perlindungan KBRI Wina	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)

C.2	Dukungan dan Komitmen yang Tinggi atas Kesepakatan Bilateral di Negara Akreditasi KBRI Wina	IKU C.2.1	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI Wina	90,5%	90,5%	91,5%	91,5%
Internal Business Process Perspective							
B.1	Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya KBRI Wina yang kuat	IKU B.1.1	Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya*)	4	4	4	4
		IKU B.1.2	Indeks respon positif terhadap informasi data <i>Economic Intelligence/Market Intelligence</i> KBRI Wina	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)
B.2	Diplomasi Polkam KBRI/PTRI Wina yang Kuat di Negara Akreditasi	IKU B.2.1	Jumlah Kesepakatan Hasil Perundingan di Bidang Diplomasi Polkam	2	2	2	2
		IKU B.2.2	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang polkam yang diterima pada forum multilateral	90%	90%	90%	90%
		IKU B.2.3	Persentase tindak lanjut oleh KBRI/PTRI Wina di bidang Polkam atas hasil kesepakatan di forum multilateral	85%	85%	85%	85%
B.3	Basis Data WNI KBRI Wina yang Akurat	IKU B.3.1	Persentase WNI di Negara Akreditasi KBRI Wina yang Terdaftar di Portal Peduli WNI	98%	98%	98%	98%
Learning and Growth Perspective							
L.1	Tata Kelola Organisasi KBRI Wina yang Baik	IKU L.1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Wina	79 (BB)	80 (BB)	81 (BB)	82 (BB)
L.2	Sarana dan Prasarana KBRI Wina yang Memadai	IKU L.2.1	Persentase Sarana dan Prasarana KBRI Wina yang Dipenuhi Sesuai dengan Rencana	100%	100%	100%	100%
L.3	Pengelolaan Anggaran KBRI Wina yang Optimal	IKU L.3.1	Persentase Realisasi Anggaran KBRI Wina	100%	100%	100%	100%

LAMPIRAN III

Format Lembar Penetapan Manual IKU

LEMBAR PENETAPAN MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bersama ini ditetapkan manual IKU KBRI/PTRI Wina untuk periode Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang meliputi:

- a. Persentase Peningkatan Nilai Perdagangan Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI Wina
- b. Persentase Peningkatan Nilai Investasi Asing ke Indonesia dari Negara Akreditasi KBRI Wina
- c. Persentase Peningkatan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia dari Negara Akreditasi KBRI Wina
- d. Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI Wina;
- e. Presentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang polkam yang diterima pada forum multilateral
- f. Persentase tindak lanjut oleh PTRI Wina di bidang Polkam atas hasil kesepakatan di forum multilateral
- g. Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI Wina
- h. Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Wina yang diselesaikan
- i. Indeks Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI Wina
- j. Indeks Kepuasan Pelayanan Perlindungan KBRI Wina
- k. Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI Wina
- l. Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- m. Indeks respon positif terhadap informasi data *Economic Intelligence/Market Intelligence* KBRI Wina
- n. Jumlah Kesepakatan Hasil Perundingan di Bidang Diplomasi Polkam
- o. Persentase WNI di Negara Akreditasi KBRI Wina yang Terdaftar di Portal Peduli WNI
- p. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Wina
- q. Persentase Sarana dan Prasarana KBRI Wina yang Dipenuhi Sesuai dengan Rencana
- r. Persentase Realisasi Anggaran KBRI Wina

Ditetapkan di Wina, Juni 2022

Manajer Kinerja Perwakilan

Erik Mangajaya

NIP.19790409 200702 1001

Kepala Perwakilan RI

Dr. iur. Damos Dumoli Agusman

NIP. 19630804 198803 1 001

MATRIKS INFORMASI KINERJA

IKU S.2.1. Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Multilateral

No	Kepemimpinan Indonesia di Forum Multilateral	Diterima	Tidak Diterima	Keterangan Kegiatan	Kodifikasi Data Dukung
1.	Sidang <i>Governing Board (GB) OPEC Fund</i> , Wina, Austria, 15 Desember 2022, di Wina, Austria	☑		Forum OPEC Fund	brafaks
2.	<i>Vienna Food Safety Forum</i> , Wina, Austria, 4 Oktober 2022 dengan tema: <i>Cost and Benefits of Remote Audit and Verification in Regulatory Framework.</i>	☑		Forum UNIDO	brafaks
3.	<i>Rapporteur of Ad Hoc Committee to Elaborate a Comprehensive International Convention on Countering the Use of Information and Communications Technologies for Criminal Purposes.</i>	☑		Forum UNODC	brafaks
4.	<i>External Auditor Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) periode 2017-2022</i>	☑		Forum IAEA	brafaks
5.	Sidang sesi ke-66 <i>General Conference IAEA</i> , Wina, Austria, 26 – 30 September 2022	☑		Forum IAEA	brafaks

IKU C.2.1 Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KBR/PTRI Wina

No	Rekomendasi yang Disampaikan	Diterima	Tidak Diterima	Keterangan Kegiatan	Kodifikasi Data Dukung
1.	Membahas implementasi Kerja Sama Peningkatan Balai Vokasi dan Pelatihan Kerja Kemnaker yang mendapat pendanaan melalui skema <i>soft loan</i> .	☑		Kunjungan kerja Menaker RI, Y.M. Ida Fauziyah, dan Direktur Jenderal Pembinaan, Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (Bina Lavotas) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Bapak Budi Hartawan, ke Wina, Austria, pada tanggal 14-15 Juni 2022.	brafaks
2.	Pembahasan tindak lanjut proses pengadaan <i>cable car</i> tahap 1 di IKN yang diharapkan dapat terwujud akhir November 2023 yang dituangkan dalam <i>MoU on Financial Cooperation</i> antara Kementerian Keuangan Austria dan Kementerian Keuangan RI.	☑		Kunjungan Kerja Menteri Transportasi dan Menteri Bappenas ke perusahaan kereta gantung, Doppelmayr Seibahnen di Wolfurt, pada tanggal 1 September 2022	brafaks
3.	Mendorong peningkatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Austria, serta dalam rangka melakukan kajian terkait konstitusi dan sistem ketatanegaraan.	☑		Kunjungan Kerja Wakil Ketua MPR RI, serta Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) dilaksanakan pada tanggal 26-30 September 2022 di Wina, Austria.	brafaks
4.	Negosiasi untuk mengupayakan kelancaran pasokan pupuk dan bahan pokok pembuatan pupuk untuk Indonesia di tengah berbagai hambatan yang	☑		Kunjungan kerja Menteri Pertanian ke kota Wina, Austria pada tanggal 30 – 31 Mei 2022 dan melakukan pertemuan dengan pengusaha lokal.	brafaks

	berasal dari isu global seperti perubahan iklim dan krisis konflik Ukraina.				
5.	Membahas tindak lanjut dari Perpanjangan <i>Memorandum of Understanding between the Indonesian Ministry of Finance and the Austrian Federal Ministry of Finance on Financial Cooperation</i> yang telah ditandatangani pada 9 Juli 2021 di Jakarta dan 18 Agustus 2021 di Vienna.	☑		Kunjungan Kerja Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Pungky Sumadi ke Wina, Austria.	brafaks
6.	Negosiasi tindak lanjut Kerja Sama RSPAD Gatot Subroto dengan VAMED Austria untuk Pembangunan Sistem Unit Radiologi serta Peningkatan Peralatan Kesehatan.	☑		Kunjungan Kerja Kepala RSPAD Gatot Subroto didampingi Ketua Dewan Penasehat sekaligus dahulunya Menteri Kesehatan RI, Bapak Terawan ke VAMED Austria, 16-21 Oktober 2022.	brafaks

IKUB.1.1. Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya dengan negara akreditasi KBRI Wina

No	Jumlah Kesepakatan	Diterima	Tidak Diterima	Keterangan Kegiatan	Kodifikasi Data Dukung
1.	Penandatanganan MOU RI-Austria untuk Kerja Sama Pelatihan Vokasi dan Pelatihan Berbasis Kinerja dilakukan oleh Menaker RI, Ida Fauziyah dan Menteri Federal Austria untuk Ekonomi dan Tenaga Kerja, Martin Kocher.	☑		Jakarta, 10 November 2022.	brafaks

2.	Penandatanganan <i>Agreed Minutes</i> Pertemuan ke-5 Forum Konsultasi Bilateral (FKB) Indonesia-Austria. Dirjen Amerop menjadi <i>Co-Chair</i> dalam pertemuan tersebut bersama Dirjen <i>Political Affairs</i> Austria. Pertemuan membahas kerja sama saling dukung di Organisasi Multilateral, serta kerja sama perdagangan dan investasi dan kerja sama bilateral lainnya.	✓		Wlna, 25 November 2022	brafaks
3.	Penandatanganan <i>MoU Intercultural and Interreligious Dialogue</i> bertujuan untuk mengembangkan dan memperluas kerjasama bilateral di bidang dialog lintas agama dan lintas budaya. Penandatanganan MOU juga merupakan tindak lanjut dari penyelenggaraan pertemuan ke tujuh program Dialog Lintas Agama (DLA).	✓		September 2022	brafaks
4.	Penandatanganan Perpanjangan Tindak Lanjut Kerja Sama RSAL Dr. Ramelan Surabaya dengan VAMED Austria untuk Peralatan Kesehatan. Kesepakatan pertama ditandatangani pada 2019 untuk peningkatan dan pengadaan peralatan kesehatan dan pembangunan unit radiologi. Kerja Sama dilakukan melalui skema <i>soft loan</i> Pemerintah Austria bagi proyek-proyek pembangunan Indonesia.	✓			brafaks

IKU B.1.2 Jumlah kesepakatan di bidang politik, keamanan, dan maritim dengan negara akreditasi KBRI Wina

No	Jumlah Kesepakatan	Diterima	Tidak Diterima	Keterangan Kegiatan	Kodifikasi Data Dukung
1.	Penandatanganan <i>Outcome FKB RI-Austria</i> berupa <i>Agreed Minutes</i> Kesepakatan Kerja Sama Bilateral di Wina, Austria	✓		FKB RI-Austria tanggal 25 November 2022	Brfaks
2.	Kesepakatan bilateral RI – Austria untuk terus melakukan kerja sama saling dukung	✓		FKB RI-Austria tanggal 25 November 2022	Brfaks

IKU B.2.2 Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada Forum Multilateral bidang Polkam

No	Jumlah Kesepakatan	Diterima	Tidak Diterima	Keterangan Kegiatan	Kodifikasi Data Dukung
1.	Penetapan Laboratorium BRIN sebagai <i>Collaborating Centre</i> IAEA Bidang <i>Climate Smart Agriculture</i> , Mei 2022	✓		Mei 2022	Brafaks
2.	Komitmen Kerja Sama Penguatan Regulasi Teknologi Nuklir Baru melalui kerangka inisiatif <i>Nuclear Harmonization and Standardization Initiative</i> (NHSI) IAEA, Juni 2022	✓		Juni 2022	Brafaks
3.	Komitmen Politik dalam kerangka kerjasama <i>Regional Cooperation Agreement</i> (RCA) IAEA, September 2022	✓		September 2022	Brafaks
4.	Kerja Sama Penguatan Riset Transisi Energi dan Lingkungan di bawah Kerangka Keketuaan G20 Indonesia, April - Oktober 2022	✓		Oktober 2022	Brafaks
5.	Komitmen Kerja Sama Penyelenggaraan <i>Postgraduate Educational Course in Radiation Protection and the Safety of Radiation Sources</i> (PGEC)	✓		November 2022	Brafaks
6.	Kesepakatan Kerangka Kerja Sama Pengembangan Kompetensi SDM Riset Nuklir	✓		September 2022	Brafaks
7.	Komitmen politik terkait upaya <i>“Strengthening the international legal framework for international cooperation to combat and prevent illicit trafficking in specimens of wild fauna and flora”</i>	✓		Mei 2022	Brafaks
8.	Komitmen Politik <i>“Strengthening national and international efforts, including with the private sector, to protect children from sexual exploitation and abuse”</i>	✓		Mei 2022	Brafaks
9.	Komitmen Politik <i>“Promoting alternative development as a development-oriented drug control strategy, taking into account measures to protect the environment”</i>	✓		Maret 2022	Brafaks
10.	Kesepakatan dalam negosiasi <i>Ad Hoc Committee to Elaborate an International Convention on Countering the Use of ICTs for Criminal Purposes</i>	✓		Februari, Mei, September 2022	Brafaks

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Bobot IKU	Formulasi	Target				Realisasi s.d TW I				Keterangan			Realisasi s.d TW II				
			s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV	Variabel I / Pembilang	Variabel II / Pembaca	Realisasi	Capaian	Narasi	Kendala	Solusi	Variabel I / Pembilang	Variabel II / Pembaca	Realisasi	Capaian	Narasi
S1.1 Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Wina	33.33%	IKU-1 = (70% * Capaian Sub IKU-1) + (30% * Capaian Sub IKU-2)	-	-	-	90,00%												
Jumlah komitmen perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Wina	70%	(Komitmen perdagangan yang diperoleh / Target komitmen perdagangan) x 100%	-	-	-	1												
Nilai perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Wina	30%	(Nilai perdagangan yang terealisasi / Target nilai perdagangan) x 100%	-	-	-	280.000.000												
S1.2 Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI Wina	33.33%	(70% * Capaian Sub IKU-1) + (30% * Capaian Sub IKU-2)	-	-	-	90,00%												
Jumlah komitmen investasi dengan negara akreditasi KBRI Wina	70%	(Komitmen investasi in-bound yang diperoleh / Target komitmen investasi in-bound) x 100%	-	-	-	1												
Nilai investasi dengan negara akreditasi KBRI Wina	30%	(Nilai investasi in-bound yang terealisasi / Target nilai investasi in-bound) x 100%	-	-	-	50.000.000												
S1.3 Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Wina	33.33%	(70% * Sub IKU-1) + (30% * Capaian Sub IKU-2)	-	-	-	90,00%												
Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI Wina ke Indonesia	70%	(Jumlah responden yang menyatakan ingin berkunjung ke Indonesia) / (Jumlah responden yang mengisi survei) x 100%	-	-	-	45,82%												
Jumlah wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI Wina ke Indonesia	30%	(Realisasi jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia) / (Target jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia) x 100%	-	-	-	1.750												

Keterangan		Realisasi s.d TW III				Keterangan			Realisasi s.d TW IV				Keterangan			Tautan Data Dukung	
Kendala	Solusi	Variabel I/ Pembilang	Variabel II/ Pembasi	Realisasi	Capaian	Narasi	Kendala	Solusi	Variabel I/ Pembilang	Variabel II/ Pembasi	Realisasi	Capaian	Narasi	Kendala	Solusi		
											120,00%	120,00%		COVID-19, perang Ukraina - Rusia dan krisis ekonomi inflasi tinggi Eropa	Mengadakan promosi perdagangan dan upaya B to B contact		
											2	120,00%		Sebagaimana termuat dalam Blue Book Bappenas, pada tahun 2022, terdapat 2 (dua) dokumen komitmen perdagangan yaitu: (i) Komitmen kerja sama perdagangan dalam bentuk revitalisasi peralatan kesehatan (alkes) dengan RS Ramelan sejumlah Euro Rp. 10 Juta. (ii) Komitmen kerja sama pembangunan unit radiologi RSPAD sebesar Euro 15.344.000.	Pembahasan membutuhkan waktu cukup lama	Pempererat koordinasi dengan instansi teknis khususnya Kemenkeu dan Bappenas agar proses pembahasan berjalan lebih lancar	LIST OF MEDIUM-TERM PLANNED EXTERNAL LOANS 2022 2024https://perputakaan.bappenas.go.id/files/updates/kegiatan-kerja-sama-pembahasan-blue_and_Green_Book_Puku%20DRPLN-JM%20Blue%20Book%202020-2024%20Revisi%202021.pdf
											580.300.000	120,00%		Berdasarkan data Kemendag RI, nilai perdagangan Indonesia dengan Austria untuk bulan Januari sampai dengan November 2022 adalah sebesar USD 391,7 juta, naik dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu sebesar 18,77%. Selain itu, terjadi kenaikan nilai perdagangan bilateral RI – Slovenia yang cukup signifikan. Terlihat bahwa nilai perdagangan periode Januari sampai dengan November 2021 sebesar USD 131,1 juta, meningkat menjadi USD 188 juta di tahun 2022. Dengan kata lain, kenaikan mencapai 43,80%.	COVID-19, perang Ukraina - Rusia dan krisis ekonomi inflasi tinggi Eropa	Mengadakan promosi perdagangan, koordinasi dengan pusat dan koordinasi dengan instansi negara akreditasi serta stakeholders lainnya	Data dapat dilihat dari laman: https://statdata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/neraca-perdagangan-dengan-mitra-dagang juga lihat
											120,00%	120,00%		Komitmen investasi Austria dan Slovenia ke Indonesia tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021.		Mengelar promosi investasi	
											2	120,00%		Investasi utama Austria di Indonesia terjadi pada 46 proyek dan komitmen investasi Slovenia sebanyak 17 proyek. Jumlah realisasi proyek investasi tersebut lebih tinggi dari pada target awal 2 proyek.	Krisis ekonomi Eropa dipicu COVID-19 dan perang Ukraina sedikit banyak mempengaruhi komitmen investasi	Memperkuat promosi dan B to B contact	https://nawi.bkpm.go.id/data_statistik
											71.112.000	120,00%		Berdasarkan data BKPM RI, realisasi investasi Austria di Indonesia pada tahun 2022 adalah sebesar USD 67.369.100. Sementara itu, realisasi komitmen investasi Slovenia di Indonesia pada tahun 2022 berada di angka USD 3.713.000. Dengan demikian, jumlah total investasi Austria dan Slovenia dapat mencapai 71.112.000.	Krisis ekonomi Eropa dipicu COVID-19 dan perang Ukraina sedikit banyak mempengaruhi nilai investasi	memperkuat promosi	https://nawi.bkpm.go.id/data_statistik
											77,03%	85,59%		Kendatipun persentase keinginan wisman Austria dan Slovenia ke Indonesia menurun, tetapi realisasi angka wisma yang datang ke Indonesia mengalami kenaikan	Pandemik COVID-19, perang Ukraina serta krisis ekonomi inflasi tinggi di Eropa		https://www.bps.go.id/indicator/16/18211/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-ke-indonesia-memurut-kebangsaan.html
									34	58	58,62%	58,62%		Jumlah persentase potensi kunjungan wisatawan setelah mengikuti atau melihat materi promosi pariwisata dan budaya yang diselenggarakan KBRI/PTRI Wina pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021.	Pandemik COVID-19 dan perang Ukraina - Rusia serta krisis inflasi tinggi Eropa turut berpengaruh pada persentase keinginan wisman datang ke Indonesia	mengalakan promosi pariwisata di berbagai media sosial dan acara	https://www.bps.go.id/indicator/16/18211/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-ke-indonesia-memurut-kebangsaan.html
											13.527	120,00%		Jumlah wisatawan Austria yang berkunjung ke Indonesia selama tahun 2022 mencapai 12.188 orang, meningkat cukup drastis dibandingkan jumlah wisatawan pada 2021 sebanyak 2.103 orang. Adapun jumlah jumlah wisatawan dari Slovenia juga menunjukkan peningkatan menjadi 1339 orang di tahun 2022, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 423 orang.	Pandemik COVID-19 dan perang Ukraina - Rusia serta krisis ekonomi inflasi tinggi di Eropa	Mengalakan promosi pariwisata baik secara virtual melalui media sosial maupun media lainnya. Pada tahun 2022 KBRI/PTRI Wina bekerja sama dalam memasing paparan rekame destinasi wisata Indonesia pada titik-titik strategis di Kota Wina.	https://www.bps.go.id/indicator/16/18211/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-ke-indonesia-memurut-kebangsaan.html

S2.1 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral	50%	(Jumlah pertemuan yang dipimpin/diseenggarakan oleh Indonesia + Jumlah pencalonan yang berhasil)/(Jumlah pertemuan yang disepakati untuk dipimpin/diseenggarakan oleh Indonesia + Jumlah pencalonan yang diusulkan) x 100%	20%	40%	75%	96%	1	5	20,00%	100,00%	KBRI/PTRI Wina telah berhasil menjabat 1 posisi sebagai ketua AVC periode Januari – Juni 2022 menggantikan Vietnam.	Pendemik COVID-19 mengakibatkan sulitnya pertemuan in person di mana sebagai delegasi RI sering mengalami kendala internet dan perbedaan time zone	memperbaiki sistem jaringan internet untuk virtual meeting dan sarankan agar ada dedicated officer untuk meeting yang sampai berjalan larut malam waktu Jakarta	2	5	40,00%	100,00%	BPK RI dipercaya menjadi External Auditor Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) periode 2017-2022. Dalam pertemuan Programme and Budget Committee IAEA ke-319 tanggal 9-10 Mei 2022, Ketua BPK RI – Isma Yulun menyampaikan laporan hasil audit tim BPK RI terhadap anggaran dan kinerja IAEA selama periode tahun anggaran 2021.
S2.2 Persentase prakeras dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri multilateral	50%	(Jumlah rekomendasi dan prakeras yang diterima)/(Jumlah rekomendasi dan prakeras yang disampaikan) x 100%	20%	40%	75%	96%	0	4	0,00%	0,00%	Tidak ada pertemuan level tinggi dan menteri pada triwulan pertama	Tidak ada jadwal level tinggi pada awal tahun. Selain itu, COVID-19 mengakibatkan pertemuan hanya dapat diselenggarakan secara hybrid dan tidak full in person.	sebagai rapporteur terus meningkatkan koordinasi dengan pihak sekretariat UN	1	4	25,00%	62,50%	Indonesia berhasil mengisaf pembahasan pengembangan standar regulasi teknologi Small Modular Reactors (SMR) dalam pertemuan 1st Nuclear Harmonization and Standardization Initiative Meeting of IAEA bulan 23-24 Juni 2022.
S3.1 Indeks Citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Wina	100,00%	(Total Indeks Rata-Rata Seluruh Responden / Jumlah Total Responden)	-	-	-	4 (skala 5)												
C1.1 Persentase kasus WNI di negara akreditasi I	33,33%	((55% x (A/B) + (45% x (C/D)))	25%	50%	73%	80%		1	120,00%	Dalam situasi pandemik yang berkepanjangan menimbulkan kemungkinan satu keluarga untuk menjalani karantina karena anggota keluarga yang lain terkena COVID-19.	tantangan isu perlindungan data pribadi atau data privacy di Austria dan Eropa pada umumnya, menjadi perhatian. Selain itu, pada beberapa kasus, KBRI/PTRI Wina baru mengetahui WNI positif COVID-19 setelah WNI tersebut sembuh dan	Pendekatan persuasif dan organisasi kemasyarakatan serta terus melakukan sosialisasi mengenai pelayanan konsuleran kepada WNI	1	120,00%	terdapat beberapa kasus umum seperti kasus pidana dan minninggal dunia (pemulangan jenazah)			
Persentase kasus khusus yang diselesaikan	55%	Dimana: A. Jumlah Kasus Khusus WNI yang Diselesaikan				25	25	100,00%				25	25	100,00%				
Persentase kasus umum yang diselesaikan	45%	B. Total kasus khusus WNI yang ditangani C. Jumlah Kasus Umum WNI yang Diselesaikan D. Total kasus umum WNI yang ditangani				2	2	100,00%				2	2	100,00%				
C1.2 Nilai persepsi kepuasan pelayanan konsuleran KBRI Wina	33,33%	Untuk nilai persepsi kepuasan pelayanan konsuleran dihitung sebagai berikut: a. Untuk realisasi Triwulan II (Nilai Persepsi TW II) = rata-rata kuesioner Januari s.d. Maret. b. Untuk realisasi Triwulan III (Nilai Persepsi TW III) = rata-rata kuesioner April s.d. Juni. c. Untuk realisasi Triwulan IV (Nilai Persepsi TW IV) = rata-rata kuesioner Juli s.d. September. d. Untuk realisasi Triwulan V = [(rata-rata kuesioner Oktober s.d. Desember) + (Nilai Persepsi TW I + Nilai Persepsi TW II + Nilai Persepsi TW III)] / 4.	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)		4	100,00%	Secara umum, KBRI/PTRI Wina dapat memperlakukan realisasi kepuasan pelayanan konsuleran di tahun 2022	Hambatan yang dihadapi terkait layanan Konsuler adalah perubahan kebijakan dari Pusat yang belum dibarengi dengan sosialisasi menyeluruh dan petunjuk teknis kepada seluruh Perwakilan RI di luar negeri. Beberapa contohnya adalah pembukaan kembali layanan visa kunjungan wisata, pencetakan kolom tanda tangan pada halaman endorsement paspor, apostille dan penerbitan paspor 10 tahun.	Untuk mengatasi hambatan tersebut, sepanjang tahun 2022, KBRI/PTRI Wina telah berpartisipasi pada kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang diadakan oleh Pusat, dan lebih lanjut KBRI/PTRI Wina juga telah mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat Indonesia dan Slovenia.	4	100,00%	Secara umum, pada triwulan kedua, KBRI/PTRI Wina dapat mempertahankan realisasi kepuasan pelayanan konsuleran di tahun 2022.			

Keterbatasan anggaran meeting yang sangat panjang (sekitar 14 hari)	penugasan untuk jaldis hanya dibayar selama 7 hari saja	0	5	0,00%	0,00%					5	5	100,00%	104,17%	<p>KBRI/PTRI Wina mendorong kepemimpinan Indonesia di dalam berbagai pertemuan baik sebagai President, Vice Chair, Task Leader, Rapporteur, antara lain: 1. memimpin 4 dari target 2 pertemuan yang dilaksanakan, yaitu: 1. Sidang Governing Board (GB) OPEC Fund tanggal 15 Desember 2022 di Wina, Austria. 2. Kepala BKPM KKP sebagai Pembicara Panelis Utama pada acara UNIDO pada Vienna Food Safety Forum pada tanggal 4 Oktober 2022 3. Rapporteur pada Ad Hoc Committee to Elaborate a Comprehensive International Convention on Countering the Use of Information and Communications Technologies for Criminal Purposes. 4. pada periode Januari – Juni 2022 menggantikan Vietnam. Dalam kapasitas tersebut, Dubes/Watap RI memimpin seluruh jalannya pertemuan AVC pada periode tersebut yang berjumlah 2 pertemuan pada bulan Januari dan Juli 2022.</p>	<p>Pandemik COVID-19 mengakibatkan meeting masih dalam virtual dan hybrid mode sehingga belum dapat dilakukan dalam bentuk fisik. Selain itu, isu perang Ukraina-Rusia juga mempengaruhi proses negosiasi di berbagai forum multilateral politik.</p>	<p>Meningkatkan fasilitas jaringan meeting virtual dan terus menjadi bridging builder bagi para pihak bertikai dalam konflik internasional</p>	<p>1. https://twitter.com/asiapi_org/status/1552891538073651712. 2. https://www.unwto.org/documents/pdf/copure/2022/State-of-the-Union%20Indonesia%20June%20FM%2022. 3. https://id.amb.france.org/Pendatangannya-Nota-Kesepakatan-Mol-Landau-IG-N-dan-BRIN-3. 4. https://kemlu.go.id/venia/en/news/2113294-konferensi-umum-badan-energi-atom-internasional-indonesia-dan-organisasi-negara-berkolaborasi-dengan-badan-riset-dan-inovasi-nasional. 5. https://twitter.com/INAVienna/status/1652710246808163716. 6. https://www.unido.org/ipo/centerofdocuments/download/2639. 7. https://undofiles-26397419.https://doccenter.oda.un.org/lmpj/5832936_76376343_6.html. 8. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4550/menko-arif-angga-berlama-unido-mendorong-paradigmal-energi-sektor-industri-untuk-keberlanjutan-pemulihan-ekonomi-dunia. 9. https://documents.dfs.ny.gov/public/LINDOC/GEN/222/278/1E/PPF/2222781E.pdf?OpenElement. 10. https://www.unido.org/ipo/centerofdocuments/download/2639. 11. https://kemlu.go.id/venia/en/news/2113294-konferensi-umum-badan-energi-atom-internasional-indonesia-ajak-negara-negara-berkolaborasi-dengan-badan-riset-dan-inovasi-nasional. 12. https://brin.go.id/news/110486/indonesia-dukung-program-nucleo-plastics. 13. https://kjp.go.id/bkpm/galeri/14817-vienna-food-safety-forum-2022.</p>	
Pandemik COVID-19 mengakibatkan pertemuan tidak dapat dilakukan secara in person	Melakukan koordinasi dengan pusat dan juga Sekretaris UN untuk penyelenggaraan sidang secara virtual	0	4	0,00%	0,00%					4	4	100,00%	104,17%	<p>1. Inisiatif pembahasan peran energi nuklir dalam global clean energy transition, termasuk melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi reaktor nuklir maju dalam rangkaian pertemuan dalam kerangka ketertarikan G20 Indonesia, khususnya pada Pokja Energy Transition; 2. Inisiatif pembahasan pengembangan standar regulasi teknologi Small Modular Reactors (SMR) dalam pertemuan 1st Nuclear Harmonization and Standardization Initiative Meeting of IAEA bulan 23-24 Juni 2022; 3. Inisiatif pembahasan penguatan kapasitas penanganan penyakit kanker melalui program Rays of Hope dalam General Conference of IAEA, pada Sidang Sesi ke-66 di Wina, pada 26 – 30 September 2022; dan 4. Proposal Indonesia mengenai perlunya untuk terus mengkaji aspek legal, teknis, dan prosedural NNP/IAUKUS pada Sidang Sesi ke-66 IAEA di Wina, pada 26 – 30 September 2022.</p>	<p>Adanya tantangan untuk menyusun jadwal pejabat tinggi negara dengan pejabat tinggi organisasi internasional.</p>	<p>agar melakukan perencanaan jauh-jauh hari sebelumnya</p>	<p>1. https://kemlu.go.id/venia/en/news/2113294-konferensi-umum-badan-energi-atom-internasional-indonesia-ajak-negara-negara-berkolaborasi-dengan-badan-riset-dan-inovasi-nasional. 2. https://brin.go.id/news/110486/indonesia-dukung-program-nucleo-plastics. 3. https://kjp.go.id/bkpm/galeri/14817-vienna-food-safety-forum-2022.</p>	
Hambatan tidak ada	melakukan koordinasi dengan pihak keluarga di tanah air dan ketampok masyarakat Indonesia di Austria	1	120,00%							1	120,00%		3,81	97,69%	<p>Pengukuran IKU "Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI/PTRI Wina" diukur melalui survei yang dilakukan oleh 58 (lima puluh delapan) responden, baik secara online maupun offline (manual), yang kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi database website yang dapat diakses</p>	<p>Kendala situasi ekonomi akibat perang di Ukraina dan dampak pandemi hingga pertengahan tahun yang berkelanjutan menghambat rencana kegiatan promosi dan terus berdampak negatif secara global terhadap keyakinan masyarakat untuk berwisata dan berbisnis pada tahun 2022.</p>	<p>melakukan kegiatan promosi, khususnya melalui media sosial dianggap lebih efektif dalam masa pandemi</p>	<p>1. https://oltrindonesia.kemlu.go.id</p>
hambatan tidak ada	melakukan koordinasi dengan pihak keluarga di tanah air dan ketampok masyarakat Indonesia di Austria	30	30	100,00%						131	131	100,00%			<p>Pada tahun 2022, realisasi presentasi kasus WNI di negara akreditasi</p>	<p>cukup kompleksnya aspek administrasi hukum nasional Austria</p>	<p>terus melakukan koordinasi dengan pihak bevenang di Austria</p>	<p>laporan brafaks</p>
Hambatan yang dihadapi terkait layanan Konsuler adalah perubahan kebijakan dari Pusat yang belum dibarengi dengan sosialisasi menyeluruh dan petunjuk teknis kepada seluruh Perwakilan RI di luar negeri, beberapa contohnya adalah pembukaan kembali layanan visa kunjungan wisata, pencetakan kolom tanda tangan pada halaman endorsement paspor, apostille dan penerbitan paspor 10 tahun.	Untuk mengatasi hambatan tersebut, sepanjang tahun 2022, KBRI/PTRI Wina telah berpartisipasi pada kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang diadakan oleh Pusat, dan lebih lanjut KBRI/PTRI Wina juga telah mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat Indonesia dan Slovenia.	4	2	100,00%						10	10	100,00%		100,00%	<p>Pada tri-wulan ke-empat, secara umum, KBRI/PTRI Wina dapat mempertahankan realisasi kepuasan pelayanan konsuleran di tahun 2022</p>	<p>Hambatan yang dihadapi terkait layanan Konsuler adalah perubahan kebijakan dari Pusat yang belum dibarengi dengan sosialisasi menyeluruh dan petunjuk teknis kepada seluruh Perwakilan RI di luar negeri, beberapa contohnya adalah pembukaan kembali layanan visa kunjungan wisata, pencetakan kolom tanda tangan pada halaman endorsement paspor, apostille dan penerbitan paspor 10 tahun.</p>	<p>Untuk mengatasi hambatan tersebut, sepanjang tahun 2022, KBRI/PTRI Wina telah berpartisipasi pada kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang diadakan oleh Pusat, dan lebih lanjut KBRI/PTRI Wina juga telah mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat Indonesia dan Slovenia.</p>	<p>Laporan brafaks</p>
Secara umum, pada tri-wulan ke-empat, secara umum, KBRI/PTRI Wina dapat mempertahankan realisasi kepuasan pelayanan konsuleran di tahun 2022. Hambatan yang dihadapi terkait layanan Konsuler adalah perubahan kebijakan dari Pusat yang belum dibarengi dengan sosialisasi menyeluruh dan petunjuk teknis kepada seluruh Perwakilan RI di luar negeri, beberapa contohnya adalah pembukaan kembali layanan visa kunjungan wisata, pencetakan kolom tanda tangan pada halaman endorsement paspor, apostille dan penerbitan paspor 10 tahun. Untuk mengatasi hambatan tersebut, sepanjang tahun 2022, KBRI/PTRI Wina telah berpartisipasi pada kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang diadakan oleh Pusat, dan lebih lanjut KBRI/PTRI Wina juga telah mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat Indonesia dan Slovenia.																		

<p>C1.3 Nilai persepsi pelayanan perlindungan WNI KBRI Wina</p>	<p>33,33%</p>	<p>Untuk nilai persepsi kepuasan pelayanan perlindungan WNI dihitung sebagai berikut: Untuk realisasi Triwulan I (Nilai Persepsi TW I) = rata-rata kuesioner Januari s.d. Maret. Untuk realisasi Triwulan II (Nilai Persepsi TW II) = rata-rata kuesioner April s.d. Juni. Untuk realisasi Triwulan III (Nilai Persepsi TW III) = rata-rata kuesioner Juli s.d. September. Untuk realisasi Triwulan IV = [(rata-rata kuesioner Oktober s.d. Desember) + (Nilai Persepsi TW I + Nilai Persepsi TW II + Nilai Persepsi TW III)] / 4.</p>	<p>4 (skala 4)</p>	<p>4 (skala 4)</p>	<p>4 (skala 4)</p>	<p>4 (skala 4)</p>			<p>4</p>	<p>100,00%</p>	<p>Pada triwulan pertama, responden pada umumnya telah merasa puas terhadap kualitas pelayanan perlindungan yang diberikan oleh KBRI/PTRI Wina.</p> <p>Nilai realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan hasil kuesioner terhadap kualitas pelayanan perlindungan yang diisi oleh para pemohon. Total jumlah kuesioner yang telah dikembalikan dan diisi secara lengkap adalah 50 kuesioner dan angka rata-rata kepuasan yang diperoleh adalah 4 dari target 4.</p>	<p>Banyaknya faktor penentu di negara akreditasi yang mempengaruhi proses penyelesaian kasus seperti sistem hukum dan birokrasi setempat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, sepanjang tahun 2021 dan juga tahun 2022.</p>	<p>Sebagai langkah solusi, KBRI/PTRI Wina telah dan akan terus melakukan peningkatan kapasitas internal berupa peningkatan pemahaman atas aturan negara setempat untuk mendukung upaya perlindungan WNI di luar negeri.</p>			<p>4</p>	<p>100,00%</p>	<p>Pada triwulan kedua, responden pada umumnya telah merasa puas terhadap kualitas pelayanan perlindungan yang diberikan oleh KBRI/PTRI Wina.</p> <p>Nilai realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan hasil kuesioner terhadap kualitas pelayanan perlindungan yang diisi oleh para pemohon. Total jumlah kuesioner yang telah dikembalikan dan diisi secara lengkap adalah 100 kuesioner dan angka rata-rata kepuasan yang diperoleh adalah 4 dari target 4.</p>
<p>C2.1 Persentase tindak lanjut/Implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara akreditasi KBRI Wina</p>	<p>100%</p>	<p>(Jumlah kesepakatan bilateral yang ditindaklanjuti/diimplementasikan/Jumlah rencana kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara akreditasi/wilayah kerja beserta negara rangkapan yang akan ditindaklanjuti sesuai dokumen pemetaan) x100%</p>	<p>15%</p>	<p>25%</p>	<p>60%</p>	<p>90,00%</p>	<p>0</p>	<p>4</p>	<p>0,00%</p>	<p>0,00%</p>	<p>Tidak ada penandatanganan ataupun tindak lanjut kesepakatan</p>	<p>Sulitdicapainya kesepakatan untuk menentukan tanggal pertemuan di awal tahun</p>	<p>Terus melakukan koordinasi internal dan koordinasi dengan pihak Austria dan Slovenia</p>	<p>1</p>	<p>4</p>	<p>25,00%</p>	<p>100,00%</p>	<p>Menteri Pertanian telah melakukan kunjungan kerja ke kota Wina, Austria pada tanggal 30 – 31 Mei 2022. Kunjungan dimaksudkan untuk mengupayakan kelancaran pasokan pupuk dan bahan pokok pembuatan pupuk untuk Indonesia. Terdapat 2 (dua) perusahaan pupuk besar yang ditemui Menteri Pertanian adalah EuroChem dan Jordan Phosphate Mines Co. Plc.</p>
<p>B1.1 Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya dengan negara akreditasi KBRI Wina</p>	<p>33,33%</p>	<p>Jumlah kesepakatan yang dicapai di bidang ekonomi, sosial dan budaya</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>			<p>0</p>	<p>0,00%</p>	<p>Tidak ada penandatanganan kesepakatan karena tidak berhasil menyepakati jadwal pertemuan</p>	<p>Belum berhasilnya finalisasi berbagai kesepakatan</p>	<p>terus melanjutkan proses negosiasi teks kesepakatan</p>			<p>0</p>	<p>0,00%</p>	<p>Penandatanganan Perjanjian Tindak Lanjut Kerja Sama RSAL Di Ramelan Surabaya dengan VAMED Austria untuk Peralatan Kesehatan tanggal 21 April 2022.</p>
<p>B1.2 Jumlah kesepakatan di bidang politik, keamanan, dan maritim dengan negara akreditasi KBRI Wina</p>	<p>33,33%</p>	<p>Jumlah kesepakatan yang dicapai di bidang politik, keamanan dan maritim</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>2</p>			<p>0</p>	<p>0,00%</p>	<p>Tidak ada pertemuan an kesepakatan</p>	<p>Kesulitan menentukan jadwal pertemuan dan substansi pembahasan</p>	<p>terus melanjutkan komunikasi dan koordinasi dengan counterpart baik di pusat dan di negara akreditasi dengan menggunakan sarana nota diplomatik, surel dan video conference.</p>			<p>0</p>	<p>0,00%</p>	<p>Tidak ada kesepakatan dan pertemuan</p>
<p>B1.3 Indeks Respon Positif terhadap informasi data Economic Intelligence/Market Intelligence</p>	<p>33,33%</p>	<p>Hasil Survei Kuesioner</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>5 (skala 5)</p>												

Banyaknya faktor penentu di negara akreditasi yang mempengaruhi proses penyelesaian kasus seperti sistem hukum dan birokrasi setempat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, sepanjang tahun 2021 dan juga tahun 2022.	Sebagai langkah solusi, KBR/PTRI Wina telah akan terus melakukan peningkatan kapasitas internal berupa peningkatan pemahaman alas aturan negara setempat untuk mendukung upaya perlindungan WNI di luar negeri.			4	100,00%	Pada tvi-wulan ketiga, responden pada umumnya telah merasa puas terhadap kualitas pelayanan perlindungan yang diberikan oleh KBR/PTRI Wina. Nilai realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan hasil kuisioner terhadap kualitas pelayanan perlindungan yang diisi oleh para pemohon. Total jumlah kuisioner yang telah dikembalikan dan diisi secara lengkap adalah 175 kuisioner dan angka rata-rata kepuasan yang diperoleh adalah 4 dari target 4.	Banyaknya faktor penentu di	Sebagai langkah solusi, KBR/PTRI Wina telah dan akan terus	4	100,00%	Pada tvi-wulan keempat, responden pada umumnya telah merasa puas terhadap kualitas pelayanan perlindungan yang diberikan oleh KBR/PTRI Wina. Nilai realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan hasil kuisioner terhadap kualitas pelayanan perlindungan yang diisi oleh para pemohon. Total jumlah kuisioner yang telah dikembalikan dan diisi secara lengkap adalah 300 kuisioner dan angka rata-rata kepuasan yang diperoleh adalah 4 dari target 4.	Banyaknya faktor penentu di	Sebagai langkah solusi, KBR/PTRI Wina telah dan akan terus	4	100,00%	Pada tvi-wulan keempat, responden pada umumnya telah merasa puas terhadap kualitas pelayanan perlindungan yang diberikan oleh KBR/PTRI Wina. Nilai realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan hasil kuisioner terhadap kualitas pelayanan perlindungan yang diisi oleh para pemohon. Total jumlah kuisioner yang telah dikembalikan dan diisi secara lengkap adalah 300 kuisioner dan angka rata-rata kepuasan yang diperoleh adalah 4 dari target 4.	Banyaknya faktor penentu di	Sebagai langkah solusi, KBR/PTRI Wina telah dan akan terus	4	100,00%	Pada tvi-wulan keempat, responden pada umumnya telah merasa puas terhadap kualitas pelayanan perlindungan yang diberikan oleh KBR/PTRI Wina. Nilai realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan hasil kuisioner terhadap kualitas pelayanan perlindungan yang diisi oleh para pemohon. Total jumlah kuisioner yang telah dikembalikan dan diisi secara lengkap adalah 300 kuisioner dan angka rata-rata kepuasan yang diperoleh adalah 4 dari target 4.						
Krisis ekonomi global yang dipicu COVID-19 dan Pemag Ukraina	Terus melakukan proses neosiasi	2	4	50,00%	83,33%	1. Kunjungan Kerja Menteri Transportasi dan Menteri Bappenas ke perusahaan kereta gantung Doppelmayr Seabahn di Wofurt, pada 1 September 2022, sebagai tindak lanjut kerja sama keuangan RI-Austria. Hasil pertemuan adalah tindak lanjut proses pembahasan pengadaan cable car tahap 1 di IKN yang diharapkan dapat terwujud akhir November 2023. 2. Kunjungan Kerja Wakil Ketua MPR RI, serta Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) dilaksanakan pada tanggal 26-30 September 2022 di Wina, Austria. Tujuan kunjungan kerja adalah untuk mendorong peningkatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Austria, serta dalam rangka melakukan kajian terkait konsultasi dan sistem ketetangsaan.	Sulitnya menentukan tanggal	Terus melakukan koordinasi se	6	4	150,00%	120,00%	Kunjungan Kerja Kepala RSPAD Gatot Subroto didampingi Ketua Dewan Penasehat sekaligus dahulunya Menteri Kesehatan RI, Bapak Terawan ke VAMED Austria, 16-21 Oktober 2022. Kunjungan merupakan inspection visit sekaligus tindak lanjut Kerja Sama RSPAD Gatot Subroto dengan VAMED Austria untuk Pembangunan Sistem Unit Radiologi serta Peningkatan Peralatan Kesehatan. Kerja Sama dilakukan melalui skema soft loan Pemerintah Austria bagi proyek-proyek pembangunan Indonesia.	Sulitnya menentukan tanggal	Terus melakukan kordinasi internal Pemri dan koordinasi dengan pihak counter-part	6	4	150,00%	120,00%	Kunjungan Kerja Kepala RSPAD Gatot Subroto didampingi Ketua Dewan Penasehat sekaligus dahulunya Menteri Kesehatan RI, Bapak Terawan ke VAMED Austria, 16-21 Oktober 2022. Kunjungan merupakan inspection visit sekaligus tindak lanjut Kerja Sama RSPAD Gatot Subroto dengan VAMED Austria untuk Pembangunan Sistem Unit Radiologi serta Peningkatan Peralatan Kesehatan. Kerja Sama dilakukan melalui skema soft loan Pemerintah Austria bagi proyek-proyek pembangunan Indonesia.	Sulitnya menentukan tanggal	Terus melakukan kordinasi internal Pemri dan koordinasi dengan pihak counter-part	6	4	150,00%	120,00%	Kunjungan Kerja Kepala RSPAD Gatot Subroto didampingi Ketua Dewan Penasehat sekaligus dahulunya Menteri Kesehatan RI, Bapak Terawan ke VAMED Austria, 16-21 Oktober 2022. Kunjungan merupakan inspection visit sekaligus tindak lanjut Kerja Sama RSPAD Gatot Subroto dengan VAMED Austria untuk Pembangunan Sistem Unit Radiologi serta Peningkatan Peralatan Kesehatan. Kerja Sama dilakukan melalui skema soft loan Pemerintah Austria bagi proyek-proyek pembangunan Indonesia.
Penentuan tanggal untuk melakukan penandatanganan	terus melakukan komunikasi intensif sampai level tertinggi menteri agar dapat segera terrealisasi			0	0,00%	belum selesainya beberapa teks	terdapat kendala untuk menentukan tanggal perundingan secara virtual			4	100,00%	1. Penandatanganan: MoU Intercultural and Interreligious Dialogue tanggal 25 November 2022. 2. Kesepakatan kerja sama saling dukung di Organisasi Multilateral, serta kerja sama perdagangan dan investasi dan kerja sama bilateral lainnya dalam pertemuan ke-5 Forum Konsultasi Bilateral (FKB) Indonesia-Austria diselenggarakan pada 25 November 2022 di Wina, Austria. 3. Penandatanganan MoU RI-Austria untuk Kerja Sama Pelatihan Vokasi dan Pelatihan Berbasis Kinerja	Implementasi dari	Sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut maka KBR/PTRI wina terus melakukan koordinasi dengan pusat, khususnya dalam pengolahan data.	laporan brafaks	Implementasi dari	Sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut maka KBR/PTRI wina terus melakukan koordinasi dengan pusat, khususnya dalam pengolahan data.	5	100,00%	Untuk IKU "Indeks Respon Positif terhadap Informasi Data Economic/Market Intelligence KBR/PTRI Wina", KBR/PTRI Wina menargetkan hasil survei 4 dari skala 5. Pada 2022, KBR/PTRI Wina mendapat hasil survei 5 dari skala 5. Dengan demikian, capaian untuk IKU tersebut adalah 100%.	Tantangan dalam penyusunan data economic / market intelligence tahun 2022 terkait dengan masih adanya pembatasan kontak sosial akibat pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan keterbatasan SDM dalam menyusun dokumen economic intelligence yang cakupannya luas.	Sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut maka KBR/PTRI wina terus melakukan koordinasi dengan pusat, khususnya dalam pengolahan data.	laporan brafaks				
Hambatan teknis dari KIL untuk implementasi tawaran dari counter-part	melakukan negosiasi untuk mencapai middle ground solution			0	0,00%	1. Kesepakatan komitmen Politik dalam kerangka Kerjasama Regional Cooperation Agreement (RCA) (IEA, September 2022. 2. Kesepakatan Kerangka Kerjasama Pengembangan Kompetensi SDM Riset Nuklir, 27 September 2022. 3. Kesepakatan dalam negosiasi Ad Hoc Committee to Elaborate an International Convention on Countering the Use of ICTs for Criminal Purposes, September 2022.				2	100,00%	Penandatanganan Agreeed Minutes Pertemuan FKB tahun 2022 dan kesepakatan politik mengenai saling dukung	Implementasi dari	Sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut maka KBR/PTRI wina terus melakukan koordinasi dengan pusat, khususnya dalam pengolahan data.	laporan brafaks	Implementasi dari	Sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut maka KBR/PTRI wina terus melakukan koordinasi dengan pusat, khususnya dalam pengolahan data.	5	100,00%	Untuk IKU "Indeks Respon Positif terhadap Informasi Data Economic/Market Intelligence KBR/PTRI Wina", KBR/PTRI Wina menargetkan hasil survei 4 dari skala 5. Pada 2022, KBR/PTRI Wina mendapat hasil survei 5 dari skala 5. Dengan demikian, capaian untuk IKU tersebut adalah 100%.	Tantangan dalam penyusunan data economic / market intelligence tahun 2022 terkait dengan masih adanya pembatasan kontak sosial akibat pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan keterbatasan SDM dalam menyusun dokumen economic intelligence yang cakupannya luas.	Sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut maka KBR/PTRI wina terus melakukan koordinasi dengan pusat, khususnya dalam pengolahan data.	laporan brafaks				

B2.1 Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral di bidang sosial, ekonomi, dan budaya	50%		25%	40%	60%	90,00%	0	2	0,00%	0,00%	Tidak ada kesepakatan bidang ekonomi	Pembatasan pertemuan fisik dan sulitnya mencari jadwal pertemuan.	Terus melakukan koordinasi dengan pusat dan counter-part di negara akreditasi	0	2	0,00%	0,00%	Tidak ada kesepakatan yang dicapai
B2.2 Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral di bidang politik, keamanan, dan maritim	50%		25%	40%	60%	90,00%	1	2	50,00%	120,00%	Komitmen Politik "Promoting alternative development as a development-oriented drug control strategy, taking into account measures to protect the environment", Maret 2022	Tidak ada jadwal pertemuan di forum multilateral	terus melakukan koordinasi dengan pusat dan sekretariat organisasi internasional	5	2	250,00%	120,00%	1. Kerja Sama Penguatan Riset Transisi Energi dan Lingkungan di bawah Kerangka Keputusan G20 Indonesia, April - Oktober 2022; 2. Penetapan Laboratorium BRIN sebagai Collaborating Centre IAEA Bidang Climate Smart Agriculture, Mei 2022; 3. Komitmen politik terkait upaya "Strengthening the international legal framework for international cooperation to combat and prevent illicit trafficking in specimens of wild fauna and flora", Mei 2022; 4. Komitmen Kerja Sama Penguatan Regulasi Teknologi Nuklir Baru melalui kerangka inisiatif Nuclear Harmonization and Standardization Initiative (NHSI) IAEA, Juni 2022; 5. Komitmen Politik "Strengthening national
B3.1 Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Wina yang terverifikasi di Portal Peduli WNI	100%	(DPTV / DPTT) x 100%	20%	40%	60%	80%	301	727	41,40%	120,00%	Pada awal tahun 2022, jumlah WNI di Austria dan Slovenia yang melakukan lapor diri di portal peduli WNI adalah 301 orang.	kurangnya kesadaran untuk melapor diri	terus melakukan sosialisasi mengenai pelayanan konsuleran kepada WNI	400	727	55,02%	120,00%	jumlah yang melakukan pendaftaran diri semakin meningkat
L1.1 Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Wina	100%	-	-	-	-	79,5 (BB)												
L2.1 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri	100%	Nilai yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan	-	-	-	2,7 (skala 1-4)												
L3.1 Nilai Kinerja Anggaran KBRI Wina	100%	60% Nilai SMART + 40% Nilai IKPA	15%	40%	72%	92			70,384	120,00%						82,274	120,00%	
Nilai SMART Kementerian Luar Negeri	60%								52,52							72,85		
Nilai IKPA Kementerian Luar Negeri	40%								97,18							96,41		

Tidak ada jadwal pertemuan	terus melakukan koordinasi sesuai jadwal rencana forum multilateral	0	2	0,00%	0,00%	Tidak ada kesepakatan yang dicapai	Tidak ada jadwal pertemuan di forum multilateral	terus melakukan koordinasi dengan pusat	2	2	100,00%	111,11%	1. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan (BKPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi pembicara pada Vienna Food Safety Forum pada tanggal 4 Oktober 2022 pada Plenary sesi ke-4, P01 11:30-13:00 dengan tema: Cost and Benefits of Remote Audit and Verification in Regulatory Framework. Selain Kepala BKPM, pada sesi yang sama, juga hadir pembicara dari Komisi Uni Eropa, Badan Perikanan Kamboja, Kementerian Agrrikultur dan Ternak Brazil serta Analis OECD. 2. Pertemuan ke 182 Governing Board (GB) OPEC Fund dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2022 di Wina, Austria, Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, Bapak Isa Rachmatarwata selaku Governor of Indonesia, berpartisipasi pada rangkaian pertemuan tersebut. Pertemuan menyepakati diantarnya anggaran administratif 2023, Business Plan 2023-2025, Capital Expenditure Budget 2023-2025 dan mencatat implementasi Strategic	Terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi antara lain masih terbatasnya pertemuan fisik di masa pandemi COVID-19 yang menyulitkan proses negosiasi in person.	Sebagai upaya solusi untuk mengatasi masalah tersebut maka KBRI/PTRI Wina terus melakukan koordinasi dengan pusat, khususnya dalam proses pembahasan mengenai jadwal pertemuan dan substansi proposal ataupun rekomendasi pembahasan.	laporan brafaks	
Penentuan posisi substansi pembahasan pembahasan dan kesapan KIL teknis	terus melakukan koordinasi dengan pusat dan pihak IAEA	2	2	100,00%	120,00%	1. Indonesia mengambil peran	Sulitnya menentukan jadwal	melakukan koordinasi dengan p	10	2	500,00%	120,00%	Tercapainya seluruh pertemuan bilateral dan proposal RI diterimanya seluruh proposal RI. Pada periode triwulan ke-4 disepakati hal-hal sebagai berikut. Proposal Indonesia penguatan rezim keselamatan nuklir melalui forum kerja sama dibawah kerangka IAEA, yang salah satunya diwujudkan melalui komitmen Pemri menjadi host kegiatan tahunan Postgraduate Educational Course in Radiation Protection and the Safety of Radiation Sources (PGECS) mulai tahun 2023.	Sulitnya menentukan jadwal pertemuan bilateral dengan pimpinan organisasi internasional	Terus melakukan koordinasi dengan pusat dan sekretariat organisasi internasional	laporan brafaks	
	terus melakukan sosialisasi	800	727	110,04%	120,00%	jumlah yang mendaftarkan diri terus meningkat	kurangnya kesadaran diri untuk melapor diri	terus melakukan sosialisasi	951	727	130,81%	120,00%	Pada akhir bulan Desember 2022, terdapat kenaikan jumlah WNI yang melakukan lapor diri menjadi 951 orang. Jumlah ini lebih tinggi dari pada data pada Daftar Pemilih Tetap Pemilu tahun 2019 di KBRI/PTRI Wina yang mencatat terdapat 727 WNI yang terdaftar.	kurang kesadaran untuk melapor diri	terus melakukan sosialisasi antara lain dengan melakukan warung konsuler	laporan brafaks	
				84,52	120,00%						75,78	95,32%					
				80,2							2,86	105,93%					
				91							97,218	105,67%					
											99,67						
											93,54						